



Katalog BPS: 1103018

RINGKASAN METADATA STATISTIK DASAR 2018



BADAN PUSAT STATISTIK

RINGKASAN METADATA STATISTIK DASAR 2018



RINGKASAN METADATA STATISTIK DASAR 2018

ISSN: 2598-568X

No. Publikasi: 03210.2002

Katalog/Catalog: 1103018

Ukuran Buku: 18,5 x 25 cm

Jumlah Halaman: xx + 278 halaman

Tim Penyusun

Pengarah :

Dr. Suhariyanto

Penanggung Jawab :

M. Ari Nugraha, M.Sc

Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat

Ir. Ahlam, M.Si

Penyunting :

Syaefudin S.ST, M.E.

Sebo Hari Sumbogo SST.,MT

Triana Rachmaningsih, SST.,S.Si SE.,M.Si

Kompilator:

Esya Herdiyanto S.Kom., M.T.

Ade Widiantera, S.Tr.Stat.

Layout dan Ilustrasi:

Esya Herdiyanto S.Kom., M.T.

Ade Widiantera, S.Tr.Stat.

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa iin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator kegiatan statistik di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPS melakukan fungsi Koordinasi, Integrasi, Standardisasi, dan Sinkronisasi. Dengan demikian, BPS harus dapat menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan statistik. Oleh sebab itu, BPS menyediakan layanan konsultasi kegiatan statistik kepada penyelenggara kegiatan statistik. Bahkan, khusus untuk instansi pemerintah BPS memberikan rekomendasi kegiatan statistik.

Sementara itu, berdasarkan pemanfaatannya, statistik di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, sektoral, dan khusus. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Statistik dasar dan sektoral pemanfaatannya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu statistik khusus pemanfaatannya tidak terbuka, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkannya.

Sebagai koordinator kegiatan statistik, BPS menyediakan informasi metadata yang tersimpan dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). Informasi tersebut dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun karena dibangun dengan berbasis web. Akan tetapi, untuk meningkatkan akses informasi metadata, juga disediakan ringkasan metadata dalam bentuk publikasi tercetak maupun elektronik yang dapat digunakan secara *stand-alone* atau tidak harus terhubung dengan internet.

Buku ini menyajikan berbagai ringkasan metadata kegiatan statistik yang dikumpulkan pada tahun 2018. Meskipun demikian, dibatasi pada pengumpulan di tingkat pusat untuk ketiga jenis statistik, dan di tingkat BPS provinsi untuk statistik sektoral dan khusus. Adapun metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus pada

tingkat kabupaten/kota dipublikasikan oleh BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota dalam bentuk laporan.

Sementara itu, upaya pemutakhiran informasi statistik dasar, sektoral dan khusus terus dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi para penyelenggara kegiatan statistik maupun pengguna data (data user), antara lain:

- a. dapat menjadi acuan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi kegiatan yang hendak dilaksanakan. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk integrasi dan dokumentasi informasi kegiatan statistik bagi para penyelenggara kegiatan;
- b. memudahkan identifikasi berbagai jenis kegiatan statistik yang diperlukan, sehingga dapat dengan mudah melakukan penelusuran dan perolehan data. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hal teknis dari sensus/survei sehingga memudahkan dalam melakukan analisa maupun evaluasi.

Mengingat banyaknya metadata yang dikumpulkan maka publikasi ini dibagi menjadi dua yaitu Ringkasan Metadata Statistik Dasar serta Ringkasan Metadata Statistik Sektoral dan Khusus. Buku ini terwujud berkat kerjasama yang baik antara tim penyusun dan unit penyelenggara kegiatan statistik terkait. Untuk itu diucapkan terima kasih atas dedikasinya. Namun demikian, ibarat pepatah “tiada gading yang tidak retak”, maka kritik dan saran masih kami harapkan. Masukan tersebut dapat dikirim secara langsung ke Subdirektorat Rujukan Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik BPS atau melalui email **sirusa@bps.go.id**.

Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2019

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

Contents

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Penjelasan.....	xii
STATISTIK DASAR BIDANG SOSIAL	1
Pendataan Potensi Desa (Podes)	3
Pilot Sensus Penduduk 2020	5
Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).....	7
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	9
Survei Perdagangan Lintas Batas Indonesia	11
Uji Coba Post Enumeration Survey Pilot SP2020	13
STATISTIK DASAR BIDANG EKONOMI	15
Direktori Perusahaan Kehutanan	17
Implementasi SEEA dalam Sisnerling Indonesia	19
Kompilasi Statistik Keuangan BUMN.....	21
Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan	22
Penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP).....	24
Survei Harga Konsumen	26
Survei Harga Konsumen Perdesaan	28
Survei Harga Produsen Perdesaan	30
Survei Hortikultura Potensi.....	32
Survei Komoditas Strategis Perkebunan Untuk Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga	34
Survei Konversi Gabah Ke Beras	36
Survei Pertanian Hortikultura	38
Survei Perusahaan Hortikultura	40
Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam.....	42
Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.....	44
Survei Tahunan Perusahaan Perkebunan	46
Survei Perusahaan Perkebunan Triwulanan.....	48



Survei Statistik Keuangan BUMD	50
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa	52
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	53
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi	55
Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura	57
Survei Tendensi Bisnis	59
Survei Volume Penjualan Eceran Beras	61
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI BIDANG SOSIAL.....	63
Analisis Isu Terkini	65
Kompilasi Data Indikator Pembangunan Berkelanjutan	66
Kompilasi Data Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat	68
Kompilasi Data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia	70
Kompilasi Data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir	72
Kompilasi Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia	73
Penyusunan Indeks Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender	75
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI BIDANG EKONOMI.....	77
Analisis SE2016-L: Analisis Potensi Wilayah Indonesia	79
Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian	81
Kompilasi Data Indikator Ekonomi.....	83
Kompilasi Data Laporan Perekonomian Indonesia	85
Kompilasi Data Statistik Ekspor	87
Kompilasi Data Statistik Impor	90
Kompilasi Statistik Indonesia.....	92
Penyesuaian Musiman (Seasonal Adjustment) pada Data PDB Triwulanan menurut Pengeluaran	94
Penyusunan Konsumsi Pemerintah Triwulanan/Tahunan Tahun Dasar 2010	95
Penyusunan Neraca Pemerintahan Pusat Triwulanan	96
Penyusunan Neraca Pemerintahan Umum	98
Penyusunan PDB Indonesia Tahunan	100
Penyusunan PDB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (2010=100)	101
Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota	102
Penyusunan PDRB Provinsi Menurut Lapangan Usaha (2010=100)	104
PENYUSUNAN TABEL I-O PARIWISATA	106
INDIKATOR KEGIATAN STATISTIK DASAR BIDANG SOSIAL.....	107



Angka Buta Huruf (ABH).....	109
Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR).....	110
Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR).....	111
Angka kelahiran umum (General Fertility Rate/GFR)	112
Angka Kematian Anak (AKA/Child Mortality Rate).....	113
Angka Kematian Balita (AKBa/ Childhood Mortality Rate).....	114
Angka Kematian Baru Lahir (Neo-Natal Death Rate).....	115
Angka kematian bayi (AKB/IMR).....	116
Angka Kematian Ibu (AKI)	117
Angka Melek Huruf (AMH)	118
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SM, PT (19-24 tahun) dan PT (19-23 tahun)	119
Angka Partisipasi Murni	121
Angka Partisipasi Sekolah	123
Content Error.....	124
Coverage Error	125
Jumlah Desa/Kelurahan dengan Keluarga Pengguna Listrik.....	126
Jumlah Desa/Kelurahan dengan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk Pertanian.....	127
Jumlah Desa/Kelurahan dengan Tenaga Kesehatan yang Tinggal/Menetap di Desa/Kelurahan	128
Jumlah Desa Kelurahan Tepi Laut.....	129
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam.....	130
Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki SD	131
Jumlah Penduduk	132
Jumlah Penduduk Bekerja (agregat) Menurut 17 Kategori Lapangan Usaha.....	133
Jumlah Penduduk Bekerja (agregat) Menurut Karakteristik Lapangan Usaha dan Status	134
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan	135
Nilai Impor dan Ekspor Non Dokumen PEB/PIB di Wilayah Perbatasan	136
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 tahun ke atas	137
Persentase Penyandang disabilitas	138
Persentase Komuter.....	139
Persentase Migran Risen	140
Persentase Migran Seumur Hidup.....	141

Persentase Migran Total	142
Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri dan Tidak Memiliki Rumah Lain Selain yang Ditempati.....	143
Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak	144
Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Atap Terluas	145
Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas	146
Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas	147
Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Perkapita	148
Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	149
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama.....	150
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	151
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak	152
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni.....	154
Persentase Sirkuler	156
Rasio Anak Ibu (Child Woman Rate/CWR)	157
Rasio Jenis Kelamin	158
Rasio Ketergantungan	159
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	160
Rate Emigran.....	162
Setengah penganggur.....	163
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	164
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	165
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	166
Total Fertility Rate	167
Volume Impor dan Ekspor Non Dokumen PEB/PIB di Wilayah Perbatasan.....	169
INDIKATOR KEGIATAN STATISTIK DASAR BIDANG EKONOMI.....	171
Banyaknya dan Nilai Pengadaan dan Penggunaan Produksi Perusahaan HTI, Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya.....	173
Banyaknya Pekerja Tetap Perusahaan HTI, Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya	174
Current Ratio BUMD	175
Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Hortikultura	176
Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Perikanan	177
Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Peternakan	178

Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Tanaman Pangan	179
Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat	180
Indeks Harga Konsumen (IHK)	181
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).....	182
Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)	183
Indeks Indikator Kini (IIK).....	184
Indeks Indikator Mendatang (IIM)	185
Indeks Yang Dibayar (IB).....	186
Indeks Yang Diterima (IT).....	187
Intensitas Energi.....	188
It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Hortikultura	189
It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Perikanan/Budidaya.....	190
It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Peternakan	191
It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Tanaman Pangan	192
It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat	193
Jumlah Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan menurut Provinsi dan Luas Areal	194
Jumlah Perusahaan Hortikultura Berbadan Hukum.....	195
Jumlah Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan.....	196
Jumlah Perusahaan Penangkapan Ikan menurut Badan Hukum.....	197
Jumlah Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).....	198
Jumlah Perusahaan Pengelola Hasil Hutan Alam (HPH)	199
Jumlah Perusahaan Pengelola Hasil Hutan Tanaman (HPHT).....	200
Jumlah Usaha Non Rumah Tangga Hortikultura.....	201
Luas Lahan yang dikuasai Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan lainnya	202
Nilai Penggunaan Produksi Kayu Bulat.....	203
Nilai Produksi Kayu Bulat Menurut Provinsi dan Jenis Kayu.....	204
Nilai Produksi Perusahaan Penangkapan Ikan yang Berbadan Hukum.....	205
Nilai Tukar Petani (NTP).....	206
Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTPH)	207
Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan (NTN)	208
Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT).....	209
Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP).....	210
Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	211
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP).....	212

Pengeluaran Perusahaan Penangkapan Ikan yang Berbadan Hukum.....	213
Penggunaan Lahan yang dikuasai Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya.....	214
Persentase jenis/kualitas beras terbesar.....	215
Pertumbuhan Produksi Jenis Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan (BST) .	216
Produk Domestik Neto 1 (PDN 1).....	217
Produksi Hasil Hutan Non Kayu.....	218
Produksi Kayu Bulat.....	219
Produksi Kayu Bulat Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan.....	220
Produksi Kayu Bulat Perusahaan Pengelola Hutan Alam.....	221
Produksi Kayu Olahan.....	222
Produksi Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya Menurut Jenis Tanaman dan Jenis Produksi.....	223
Produktivitas Tanaman Biofarmaka.....	224
Produktivitas Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan (BST).....	225
Produktivitas Tanaman Hias.....	226
Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim.....	227
Produktivitas Tanaman Tebu.....	228
Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim (SBS), dan Tanaman Biofarmaka (TBF).....	229
Profit Margin BUMN.....	230
Proporsi Tutupan Hutan.....	231
Rata-rata Produksi Tanaman Perkebunan.....	232
R/C Ratio.....	233
Return On Asset (ROA) BUMD.....	234
Return On Asset (ROA) BUMN.....	235
Return On Equity (ROE) BUMD.....	236
Return On Equity (ROE) BUMN.....	237
Solvabilitas/Total Debt to Total Assets BUMD.....	238
Solvabilitas/Total Debt to Total Assets BUMN.....	239
Struktur Biaya Produksi.....	240
Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota.....	241
Tingkat Kemandirian Pemerintah Desa.....	242
Tingkat Kemandirian Pemerintah Provinsi.....	243
Total Debt to Equity Ratio (DER) BUMD.....	244



Upah/Gaji Pekerja Tetap	245
Volume Penggunaan Produksi Kayu Bulat.....	246
Volume Produksi Perusahaan Penangkapan Ikan yang Berbadan Hukum.....	247
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI BIDANG SOSIAL	249
IKG (Indeks Ketimpangan Gender).....	251
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI BIDANG EKONOMI	255
Distribusi PDRB terhadap Jumlah PDRB 34 Prrovisi menurut lapangan Usaha	257
Distribusi Persentase PDB Tahunan	258
Distribusi Persentase PDB Triwulanan.....	259
Indeks Berantai Produksi Subsektor Pertanian	260
Indeks Harga Implisit menurut Lapangan Usaha.....	262
Indeks Produksi Subsektor Pertanian.....	263
Index Unit Value Impor	265
Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/ Kota menurut Lapangan Usaha.....	266
Laju Pertumbuhan PDB Tahunan	267
Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan.....	268
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha	269
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha	270
PDRB Perkapita	271
PDRB Per Kapita	272
Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	273
Produktivitas Tanaman	274
Sumbangan Subsektor Pertanian.....	275
Total Nilai Ekspor Migas Indonesia	276
Total Nilai Ekspor Non Migas Indonesia	277
Unit Value Indeks	278

Penjelasan

Pendahuluan

Sistem Statistik Nasional (SSN) merupakan suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik maupun Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pembangunan SSN merupakan tanggung jawab BPS sebagai pembina dan koordinator statistik nasional.

Salah satu bagian dalam tatanan ini adalah adanya pusat rujukan statistik yang memberikan informasi terkait dengan kegiatan dan produk statistik. Informasi tersebut dikembangkan dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) dengan bentuk info-metadatabase. Info-metadatabase tersebut dikumpulkan melalui pengumpulan metadata statistik dasar, sektoral, dan khusus baik di tingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota.

Pada sisi lain, metadata kegiatan statistik ini disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina maupun koordinator statistik nasional. Melalui penghimpunan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus ini, BPS dapat menyampaikan kepada masyarakat kegiatan statistik yang ada di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Metadata yang dikumpulkan tersebut disimpan dalam situs web *sirusa.bps.go.id*. Pada situs web ini tersedia informasi metadata kegiatan statistik secara lengkap dan komprehensif, baik kegiatan statistik dasar, sektoral, maupun khusus. Selain itu, juga tersedia metadata indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik dasar dan metadata variabel. Metadata tersebut dapat membantu para pengguna data untuk lebih memahami perolehan data maupun indikator. Masyarakat atau pengguna dapat memanfaatkan SIRuSa ini, untuk keperluan pemahaman data

maupun memantau kualitas kegiatan statistik di Indonesia. Walaupun demikian, sangat disadari bahwa kebutuhan informasi tersebut juga memerlukan adanya ringkasan atau *summary* dari keseluruhan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, daftar ringkasan metadata kegiatan statistik perlu dibangun, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam menjadikan metadata sebagai acuan untuk mencari kegiatan pengumpulan data yang pernah dilaksanakan BPS, instansi pemerintah, dan instansi non pemerintah (swasta) seperti perguruan tinggi/universitas dan lembaga lainnya.

Mengingat banyaknya metadata yang tersedia maka, daftar kegiatan statistik tersebut dibagi menjadi dua yaitu **Ringkasan Metadata Statistik Dasar** dan **Ringkasan Metadata Statistik Sektoral dan Khusus**. Ringkasan Metadata Statistik Dasar memuat kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS, sedangkan Ringkasan Metadata Statistik Sektoral dan Khusus memuat kegiatan statistik yang dilakukan oleh institusi pemerintah (kementerian/lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah/OPD) dan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintahan seperti lembaga pendidikan maupun lembaga riset nasional maupun regional.

Dalam rangka melengkapi informasi kegiatan statistik, BPS melakukan pengumpulan metadata dengan menggunakan daftar isian Q-Metadata. Hal ini dilakukan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Untuk pelaksanaan di tingkat pusat dilakukan secara berkesinambungan dari tahun 2000, sedangkan di tingkat BPS provinsi dilakukan mulai tahun 2005. Sementara itu, pengumpulan metadata kegiatan statistik di tingkat kabupaten/kota dimulai tahun 2015/2016.

Pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2016 semakin ditekankan mengingat bahwa terdapat tuntutan pembuktian terhadap pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada peraturan pemerintah tersebut, dituntut adanya rekomendasi kegiatan statistik sebagai salah satu kriteria teknis penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada pemerintahan daerah. Hal ini terdapat pada Lampiran T dari peraturan pemerintah tersebut. Pada dasarnya pemberian rekomendasi merupakan bentuk bantuan teknis BPS kepada

penyelenggara kegiatan statistik seperti ketepatan metodologi, kecukupan sampel, penentuan metode analisis dan estimasi, dan sebagainya. Bahkan berdasarkan surat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik tertanggal 18 April 2013, instansi/lembaga pemerintah yang mengajukan rekomendasi kegiatan statistik dapat memperoleh peta desa/kelurahan dan peta blok sensus (termasuk daftar nama dan kode wilayah). Peta-peta tersebut dapat digunakan sebagai panduan petugas lapangan dan sekaligus sebagai kerangka sampel. Bahkan, peta tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk diseminasi hasil kegiatan dengan level penyajian hingga tingkat desa.

Mengingat pentingnya, informasi kegiatan statistik maka perlu adanya penyajian metadata secara ringkas. Pada buku ini, penyajian metadata kegiatan statistik dasar dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok Sensus dan Survei serta kelompok Kompilasi Data Administrasi dan Kompilasi Data Sekunder. Pada buku ringkasan ini, kegiatan statistik dasar yang disajikan merupakan kegiatan yang dikumpulkan pada tahun 2018. Jumlah kegiatan tersebut sebanyak 89 kegiatan statistik yang terdiri dari 49 kegiatan Sensus/Survei dan 40 kegiatan berupa kompilasi produk administrasi dan kompilasi data sekunder. Lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Metadata Kegiatan Statistik Dasar Pengumpulan 2018

Kategori	Bidang		Jumlah
	Sosial	Ekonomi	
Sensus/Survei	11	38	49
Kompilasi	15	25	40
Jumlah	26	63	89

Kegiatan statistik dasar merupakan kegiatan yang melekat pada tugas dan fungsi BPS. Oleh sebab itu, penyajian metadata kegiatan dibedakan menurut unit kerja di BPS sampai dengan eselon III. Adapun dasar unit kerja tersebut adalah berdasarkan struktur yang telah ditetapkan tahun 2009 serta perubahannya. Hal yang perlu

dipahami bahwa kualitas informasi metadata kegiatan ini sangat ditentukan oleh pemahaman petugas penghubung (*liaison officer*) yang terdapat pada unit kerja. Guna meminimalkan perbedaan persepsi, maka telah dilakukan pertemuan koordinasi bersama sebanyak dua kali. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan juga pengertian terkait dengan pengisian metadata kegiatan statistik dasar dan indikatornya.

Tujuan

Penyusunan Buku Ringkasan Metadata pada dasarnya memiliki beberapa tujuan baik untuk pengguna data, penyedia data, maupun lembaga. Tujuan tersebut antara lain:

a. Bagi Penyedia Data

- Menginformasikan kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh BPS pada kelompok statistik dasar maupun oleh kementerian/lembaga pada kelompok statistik sektoral, serta instansi non-kementerian/lembaga pada kelompok statistik khusus. Hal ini juga didukung dengan adanya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kegiatan.
- Menjadi media untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan statistik. Melalui informasi yang tersedia, maka penyedia data dapat mengoptimalkan untuk memanfaatkan hasil-hasil kegiatan statistik yang telah ada dibandingkan dengan melakukan kegiatan statistik yang sama.

b. Bagi Pengguna Data:

- Memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam menentukan pilihan sumber data yang akan digunakan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi terkait kualitas pengumpulan dan pengolahan data.
- Menjadi sarana yang dapat membantu dalam menyusun dan menyelenggarakan kegiatan statistik yang diperlukan, khususnya dalam melakukan dan mengembangkan penelitian. Informasi yang tersedia akan membantu pengguna dalam melakukan perancangan kegiatan survei maupun studi.

c. Bagi Lembaga Penyelenggara:

- Menjadi media dokumentasi tercetak untuk menyediakan informasi bagi pengembangan penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.
- Menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan statistik termasuk hasil yang diperoleh dan yang dapat dikembangkan dikemudian hari

Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup publikasi terpilah menjadi dua yaitu ruang lingkup statistic dasar dan ruang lingkup statistik sektoral/khusus. Ruang lingkup publikasi ringkasan statistik dasar ini dibatasi pada konten dan tahun. Pembatasan tersebut dilakukan mengingat banyaknya kegiatan statistik dari tahun ke tahun maupun isian dari metadata kegiatan statistik. Pembatasan tahun dilakukan pada pengumpulan tahun 2018, sedangkan pembatasan pada konten metadata kegiatan statistik ditujukan pada empat kelompok informasi yaitu tujuan dan manfaat, variabel/data, metodologi, dan keluaran. Walaupun demikian, dari empat kelompok informasi tersebut terdapat 14 informasi yang disajikan yaitu:

- **Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

Informasi ini menggambarkan tujuan utama dan manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan statistik baik berupa sensus atau survei atau kompilasi.

- **Variabel Pengumpulan Data**

Penekanan masih terbatas pada variabel utama yang dikumpulkan. Beberapa variabel penting tertera dalam daftar isian atau kuesioner dari kegiatan statistik.

- **Frekuensi Kegiatan**

Informasi ini akan membantu pengguna data untuk mengetahui periode atau selang waktu penyelenggaraan kegiatan statistik. Kegiatan statistik tersebut dapat dilaksanakan tahunan (setiap tahun), triwulanan (setiap 3 (tiga) bulan) maupun dalam periode lainnya. Dengan mengetahui frekuensi kegiatan ini, maka pengguna data dapat memperkirakan frekuensi data yang dapat diperoleh.

- **Frekuensi Pengumpulan Data**

Berbeda dengan Frekuensi kegiatan, frekuensi pengumpulan data merupakan periode atau selang waktu pengumpulan data pada satu penyelenggaraan

kegiatan statistik. Ada kemungkinan satu kegiatan dilakukan setiap tahun (tahunan) tetapi dalam pengumpulan datanya menggunakan bermacam kuesioner dengan waktu pengumpulan yang berbeda, yaitu mingguan, bulanan dan triwulanan.

- **Tahun Data.**

Informasi ini akan membantu pengguna data dalam perolehan data. Informasi ini merupakan deretan tahun-tahun dimana data tersebut tersedia. Sangat dimungkinkan adanya kegiatan dengan frekuensi triwulanan tetapi ketersediaan data adalah tahunan. Selain itu, tahun data ini merupakan tahun ketersediaan data yang terakhir.

- **Cakupan Wilayah**

Cakupan wilayah merupakan cakupan dari kegiatan statistik. Cakupan wilayah ini akan sama dengan wilayah yang dapat diestimasi oleh data hasil kegiatan statistik tersebut. Jika mencakup hanya beberapa wilayah saja (misal beberapa provinsi saja), maka isinya adalah nama wilayah-wilayah yang dicakup tersebut.

- **Cakupan Responden**

Cakupan responden merupakan obyek sumber informasi yang dicacah dalam kegiatan statistik. Jika responden merupakan sampel dari sebuah kelompok obyek/populasi, maka cakupan responden adalah penjelasan kelompok obyek/populasi tersebut, yang merupakan kerangka sampelnya. Contoh: seluruh perusahaan industri pengolahan, dengan jumlah tenaga kerja 20 orang atau lebih.

- **Unit Observasi**

Unit observasi merupakan unit penelitian atau obyek penelitian terkecil yang informasinya dikumpulkan dalam kegiatan statistik. Unit observasi ini harus disesuaikan dengan konteks yang tertuang dalam tujuan kegiatan statistik.

- **Unit Analisis**

Unit Analisis merupakan unit penelitian atau obyek penelitian terkecil yang digunakan untuk analisa. Misalnya susenas, unit analisisnya adalah rumah tangga, meskipun unit observasinya sampai dengan anggota rumah tangga.

- **Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data merupakan metode atau cara perolehan/pengumpulan data dari responden. Umumnya pengumpulan data menggunakan metode wawancara langsung dengan responden. Namun dalam beberapa survei, pengumpulan data dilakukan dengan cara lain, misal pengisian sendiri (swacacah) dan pengamatan/pengukuran langsung terhadap obyek yang diteliti.

- **Jenis Kuesioner**

Informasi ini dapat membantu pengguna data dalam mengetahui instrumen yang digunakan dalam kegiatan statistik termasuk jenis kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data.

- **Nama Indikator yang Dihasilkan**

Informasi ini dapat membantu pengguna data dalam mengetahui indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik.

- **Level Terendah Penyajian Data Dalam Publikasi**

Level terendah data dalam publikasi merupakan tingkat atau level wilayah administrasi yang terendah dalam penyajian data pada publikasi. Level terendah ini identik dengan *the power estimate* dari kegiatan sensus atau survei atau kompilasi. *Power estimate* merupakan kemampuan data untuk mendapatkan tingkat estimasi terbaik dengan akurasi dan reliabilitas terhadap fenomena.

- **Publikasi yang Dihasilkan**

Informasi ini berisi judul publikasi BPS yang memuat hasil kegiatan statistik tersebut baik berupa indikator ataupun laporan. Hal ini akan memudahkan pengguna data untuk melakukan penelusuran hasil.

Sementara itu, pada konten metadata indikator penyajian meliputi bagian umum, teknis, dan penyajian. Dari tiga bagian tersebut terdapat 7 (tujuh) informasi metadata yang disajikan. Ketujuh informasi tersebut adalah:

- **Definisi**

Informasi ini berisi konsep atau definisi dari indikator tersebut. Hal ini akan memudahkan pengguna dalam memahami pengertian dari indikator tersebut. Akan tetapi perlu diketahui bahwa konsep tersebut dapat berubah sesuai dengan ketentuan dasar dalam penghitungan. Selain itu, definisi ini merupakan definisi indikator statistik dasar yang dapat berbeda dengan indikator statistik sektoral maupun khusus.

- **Manfaat**

Informasi tentang manfaat indikator akan membantu pengguna dalam memahami lebih lanjut indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik tersebut. Pengguna juga dapat lebih mudah mendapatkan ketepatan pemanfaatan indikator dengan mengetahui manfaat indikator tersebut.

- **Rumus Penghitungan**

Rumusan penghitungan ini akan membantu pengguna data dalam memperoleh indikator yang dihasilkan berdasarkan data yang diperolehnya.

Interpretasi

Interpretasi merupakan informasi yang memuat cara penafsiran dari indikator yang diperoleh. Hal ini akan membantu para analis dalam melakukan penafsiran terhadap indikator tersebut.

- **Level Estimasi**

Perlu diketahui bahwa setiap indikator yang diperoleh dari kegiatan statistik tidak selalu memiliki tingkat perkiraan yang sama terhadap populasi. Melalui level estimasi ini, pengguna dapat memperoleh informasi batasan estimasi yang tepat dari indikator yang dibangun melalui data statistik dasar.

- **Publikasi Keberadaan Indikator**

Publikasi keberadaan indikator dalam hal ini adalah publikasi BPS. Terkadang, publikasi yang memuat indikator ini tidak selalu berasal dari penyelenggara kegiatan statistik tetapi juga dapat diperoleh melalui publikasi yang diterbitkan oleh unit kerja lain, bahkan juga instansi lain. Akan tetapi, dalam ringkasan metadata ini, publikasi keberadaan indikator diperoleh berdasarkan identifikasi dari petugas penghubung pada masing-masing penyelenggara kegiatan statistik.

- **Variabel Pembentuk Indikator**

Informasi variabel pembentuk indikator ini akan membantu dalam melakukan penghitungan. Melalui informasi ini dapat diperoleh sumber data dan nama variabel yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penghitungan indikator.

Kodifikasi

Kodifikasi dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pengelompokan kegiatan maupun indikator statistik. Terdapat dua komponen yaitu komponen kegiatan dan komponen hasil. Pada komponen kegiatan statistik dasar, kegiatan statistik disusun dengan berdasarkan pada urutan kode yang meliputi kode bidang kegiatan, direktorat/biro, dan subdirektorat/bagian, nomor urut kegiatan. Adapun komponen hasil merupakan nomor urut dari hasil kegiatan tersebut, yang dalam hal ini merupakan indikator. Dalam kodifikasi ini pengkodean yang dilakukan untuk kegiatan hanya sampai digit keenam, sedangkan untuk indikator sampai delapan digit.

Dengan demikian, susunan kodifikasi secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

z.yy.x.ww.vv

dimana:

- z = kode bidang kegiatan dan cara pengumpulan data, terdiri atas 1 (satu) digit.
 - 1 = Sensus/Survei Bidang Statistik Sosial
 - 2 = Sensus/Survei Bidang Statistik Ekonomi
 - 3 = Kompilasi Data Sekunder Bidang Statistik Sosial
 - 4 = Kompilasi Data Sekunder Bidang Statistik Ekonomi
- yy = kode direktorat/biro penyelenggara kegiatan statistik, terdiri atas 2 (dua) digit.
- x = kode subdirektorat/bagian penyelenggara kegiatan statistik, terdiri atas 1 (satu) digit.
- ww = nomor urut kegiatan statistik pada satu subdirektorat/ bagian, terdiri atas 2 (dua) digit.
- vv = nomor urut indikator pada satu kegiatan, terdiri atas 2 (dua) digit.



STATISTIK DASAR BIDANG SOSIAL



<https://www.kps.go.id>

Pendataan Potensi Desa (Podes)



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Ketahanan Wilayah
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi: sarana dan prasarana wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan daerah2. Menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi wilayah (seperti: perkotaan-perdesaan, wilayah tertinggal, wilayah pesisir dan sebagainya) dan penyusunan statistik wilayah kecil3. Melengkapi penyusunan kerangka sampling untuk kegiatan statistik lain lebih lanjut.



DATA

Variabel pengumpulan data	Status Pemerintahan Desa; Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari); Topografi Wilayah; Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap hutan; Penduduk dan keluarga; Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Agen TKI; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK); Kantor kepala desa/lurah; Wilayah desa berbatasan langsung dengan laut; Sumber Air Minum; Sumber Air untuk Mandi; Lembaga pendidikan; Sarana Kesehatan; Tenaga Kesehatan; Kejadian Luar Biasa dan Wabah Penyakit; Gizi Buruk; Sarana hiburan dan olahraga; Sarana informasi dan komunikasi; Program TV; Pengguna Listrik; Bahan Bakar; Tempat Buang Air Besar; Tempat Buang Sampah; Tempat Pembuangan Limbah Cair; Mitigasi Bencana Alam; Pendidikan Keterampilan; Penyandang cacat; Pemerintah Desa; Koperasi; Fasilitas perbankan; Tindak Kejahatan; Alokasi Dana Desa ; Aset Desa; Sarana perekonomian; Fasilitas perkreditan; Jenis/jenjang lembaga pendidikan SD/MI; Sumber Penghasilan Utama; Jenis komoditi/sub sektor jika sumber penghasilan utama adalah sektor pertanian; Bencana Alam; Jaminan Kesehatan; Industri mikro dan kecil menurut bahan baku utama; Pendapatan Asli Desa ; Dana Desa
Frekuensi Kegiatan	Tiga kali dalam 10 tahun

Frekuensi pengumpulan data Tiga kali dalam 10 tahun



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Semua Kepala Desa/Lurah; Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT); Kepala Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT); aparatur kecamatan (camat atau narasumber lain yang relevan); aparatur kabupaten; narasumber di beberapa kantor-kantor dinas yang relevan di seluruh kabupaten/kota (yaitu Dinas Pertambangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian)
Unit Observasi	Desa/kelurahan dan wilayah dengan sebutan lain yang setingkat desa/kelurahan untuk Podes Desa; Kecamatan untuk Podes kecamatan; Kabupaten untuk podes kabupaten
Unit Analisis	Desa
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	PODES2018-DESA; PODES2018-KAB/KOTA; PODES2018-NAGARI; PODES2018-JORONG; PODES2018-KEC



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan Jumlah Desa/Kelurahan dengan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk Pertanian ; Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam ; Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan; Jumlah Desa/Kelurahan dengan Tenaga Kesehatan yang Tinggal/Menetap di Desa/Kelurahan ; Jumlah Desa Kelurahan Tepi Laut; Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki SD ; Jumlah Desa/Kelurahan dengan Keluarga Pengguna Listrik .

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Potensi Desa Indonesia 2018	Provinsi	2018

Pilot Sensus Penduduk 2020



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	BPS
	BPS
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Pilot SP2020 yang dilaksanakan pada tahun 2018 bertujuan untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan instrumen sensus (kuesioner dan buku pedoman), serta organisasi dan manajemen lapangan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan sensus sesungguhnya tahun 2020. Pilot SP2020 akan diselenggarakan dalam bentuk “sensus mini”, dimana seluruh tahapan kegiatan sensus akan diujicobakan yang bertujuan untuk mengkaji semua aspek terkait pelaksanaan sensus penduduk., Pilot SP2020 juga untuk mendapatkan pengalaman melaksanakan SP dalam lingkup wilayah desa/kelurahan, dalam kondisi lapangan terkini, sesuai dengan rencana metodologi maupun instrumen tertentu yang dibuat untuk pelaksanaan SP2020.



DATA

Variabel pengumpulan data	Kewarganegaraan; Agama; Hubungan dengan Kepala Keluarga; Suku Bangsa; Anggota Rumah Tangga; Jenis kelamin ; Jumlah penduduk; Status Perkawinan; Anak Lahir Hidup (ALH); Anak Masih Hidup (AMH); Tidak bersekolah lagi; Umur Anak Saat Meninggal; Kegiatan sirkuler; Migrasi Internasional; Lapangan pekerjaan; Status pekerjaan; Dapat membaca dan menulis; Buta Aksara/Huruf; Partisipasi sekolah; Tidak/belum pernah sekolah; Jumlah kematian karena kehamilan/ saat persalinan/ masa 2 bulan setelah persalinan keguguran.; Migrasi seumur hidup; Migrasi risen; Kegiatan yang Terbanyak Dilakukan; Sementara Tidak Bekerja; Masih bersekolah; Migrasi total; Kegiatan komuting/ulang-alik/nglaju/pp; Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti; Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki; Gangguan penglihatan; Gangguan pendengaran; Kesulitan mengurus diri sendiri; Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki; Rata-rata Lama Sekolah; Gangguan mengingat/konsentrasi; Gangguan perilaku dan atau emosional; Gangguan komunikasi; Gangguan mobilitas ; Pendidikan tertinggi yang ditamatkan; Kesulitan/gangguan fungsional
Frekuensi Kegiatan	Sepuluh Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Sepuluh tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	KRT atau ART yang mewakili
Unit Observasi	Rumah Tangga dan bangunan
Unit Analisis	Penduduk dan rumah tangga
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	Pilot SP2020-L1; Pilot SP2020-L2; Pilot SP2020-C1; Pilot SP2020-C2; Pilot PK.SP2020-C1; Pilot PK.SP2020-C2; Pilot PK.SP2020-SC; SP2020-KRP



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	<p>Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Atap Terluas; Total Fertility Rate; Angka kelahiran umum (General Fertility Rate/GFR); Persentase Migran Seumur Hidup; Persentase Migran Risen; Persentase Migran Total; Persentase Sirkuler; Rasio Anak Ibu (Child Woman Rate/CWR); Angka Kematian Baru Lahir (Neo-Natal Death Rate); Rate Emigran; Persentase Komuter; Jumlah Penduduk Bekerja (agregat) Menurut 17 Kategori Lapangan Usaha; Jumlah Penduduk Bekerja (agregat) Menurut Karakteristik Lapangan Usaha dan Status; Angka Partisipasi Sekolah ; Angka Buta Huruf (ABH); Rasio Jenis Kelamin; Rasio Ketergantungan; Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR); Jumlah Penduduk; Rata-rata Lama Sekolah (RLS); Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR); Angka kematian bayi (AKB/IMR); Angka Kematian Anak (AKA/Child Mortality Rate); Angka Kematian Balita (AKBa/ Childhood Mortality Rate); Angka Kematian Ibu (AKI); % Penyandang disabilitas; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SM, PT (19-24 tahun) dan PT (19-23 tahun); Angka Melek Huruf (AMH); Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak ; Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni; Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama; Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Perkapita; Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak; Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas; Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 tahun ke atas; Angka Partisipasi Murni; Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas; Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri dan Tidak Memiliki Rumah Lain Selain yang Ditempati; Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak .</p>
--------------------------------	---

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Subdit. Stat. Ketenagakerjaan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas Tahunan 2017 adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Sakernas Tahunan dilaksanakan pada bulan Agustus, bersamaan dengan pelaksanaan Sakernas semester II. Sampel Sakernas Tahunan sebanyak 20.000 blok sensus untuk menghasilkan estimasi hingga level kabupaten/kota.



DATA

Variabel pengumpulan data	Jenis kelamin; Umur; Pendidikan; Kegiatan yang Terbanyak Dilakukan; Sementara Tidak Bekerja; Mencari pekerjaan; Mempersiapkan usaha; Alasan Tidak Mencari Pekerjaan/ Mempersiapkan Usaha; Jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan; Lapangan pekerjaan; Status pekerjaan; Jenis pekerjaan; Upah/Gaji Bersih
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Anggota Rumah Tangga (ART) 5 tahun ke atas
Unit Observasi	Rumah tangga biasa
Unit Analisis	Penduduk
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	SAK18.K; SAK18.AK; SAK18.DSRT

Nama indikator yang dihasilkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); Setengah penganggur.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2018	Provinsi	2015-2018
Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018	Provinsi	2018
Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2017	Provinsi	2016-2017
Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2018	Provinsi	2017-2018

<https://www.bps.go.id>

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Subdit. Stat. Ketenagakerjaan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas Semesteran 2017 adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Sakernas semester I (Februari) sebanyak 5.000 blok sensus menghasilkan estimasi level provinsi, sedangkan Sakernas semester II (Agustus) sebanyak 20.000 blok sensus menghasilkan estimasi level kabupaten/kota.



DATA

Variabel pengumpulan data	Jenis kelamin; Umur; Pendidikan; Kegiatan yang Terbanyak Dilakukan; Sementara Tidak Bekerja; Mencari pekerjaan; Mempersiapkan usaha; Alasan Tidak Mencari Pekerjaan/ Mempersiapkan Usaha; Jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan; Lapangan pekerjaan; Status pekerjaan; Jenis pekerjaan; Upah/Gaji Bersih
Frekuensi Kegiatan	Semesteran
Frekuensi pengumpulan data	Semesteran



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Anggota Rumah Tangga (ART) 5 tahun ke atas
Unit Observasi	Rumah tangga biasa
Unit Analisis	Penduduk
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	SAK18.K; SAK18.DSRT; SAK18.AK



Nama indikator yang dihasilkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Tingkat Kesempatan Kerja (TKK); Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2018	Provinsi	2018
Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2018	Provinsi	2017-2018
Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018	Provinsi	2015-2018

<https://www.bps.go.id>

Survei Perdagangan Lintas Batas Indonesia



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Distribusi Subdit. Stat. Impor
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan nilai dan kuantitas perdagangan yang tidak tercatat dalam dokumen PEB/PIB2. Menentukan jenis dan komposisi komoditas yang diperdagangkan non dokumen PEB/PIB3. Mencari metode pencacahan yang tepat untuk survei selanjutnya.



DATA

Variabel pengumpulan data	Nilai Barang; Negara Asal; Negara Tujuan; Valuta/Mata Uang; Berat Barang; HS 2 Dijit
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Pelaku usaha perdagangan ekspor/impor non-dokumen PEB/PIB di wilayah perbatasan
Unit Observasi	Pelaku usaha perdagangan ekspor/impor non-dokumen PEB/PIB di wilayah perbatasan
Unit Analisis	Komoditas
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Nilai Impor dan Ekspor Non Dokumen PEB/PIB di Wilayah Perbatasan; Volume Impor dan Ekspor Non Dokumen PEB/PIB di Wilayah Perbatasan.
--------------------------------	--

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Laporan Hasil Survei Impor Daerah Perbatasan Tahun 2017	Kabupaten/Kota	2017

<https://www.bps.go.id>

Uji Coba Post Enumeration Survey Pilot SP2020



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Peng. Metodologi Sensus dan Survei Subdit. Pengembangan Desain Sensus dan Survei
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Secara umum tujuan UC PES adalah mengujicobakan rangkaian kegiatan dan instrumen yang akan digunakan pada PES, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Memperoleh metode pencacahan dan kuesioner yang efisien untuk pelaksanaan PES.• Memperoleh prosedur matching yang efektif, efisien, dan operasional.• Memperoleh prosedur pengolahan yang efektif, efisien, dan operasional untuk entri data, analisis cakupan, dan analisis isian.• Mengukur kesalahan cakupan dan kesalahan isian Pilot SP



DATA

Variabel pengumpulan data	Anggota Rumah Tangga; Bekerja
Frekuensi Kegiatan	Sepuluh Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Ad hoc



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Kepala rumah tangga/anggota rumah tangga lain
Unit Observasi	Rumah Tangga
Unit Analisis	Rumah tangga dan anggota rumah tangga
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	SP2020-PES2; SP2020-PES1; SP2020-PES4; SP2020-PES3; SP2020-LPES1

Nama indikator yang dihasilkan

Content Error; Coverage Error.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Laporan hasil uji coba PES Pilot SP2020	Hanya Wilayah Tertentu	2017-2018

<https://www.bps.go.id>

**STATISTIK DASAR
BIDANG EKONOMI**



<https://www.bps.go.id>

Direktori Perusahaan Kehutanan



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Mendapatkan daftar perusahaan kehutanan yang masih aktif/masih berproduksi pada tahun berjalan. Daftar tersebut akan digunakan sebagai responden pada Survei Perusahaan Kehutanan tahun berikutnya (HPH, HPHT/Perum, dan TSL).



DATA

Variabel pengumpulan data	Kondisi/Status Perusahaan Kehutanan; Jumlah Perusahaan; Alamat Perusahaan Kehutanan; Luas Areal
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota; Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia
Unit Observasi	Kementerian, dinas, dan organisasi terkait
Unit Analisis	Perusahaan
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Pencocokan direktori perusahaan kehutanan BPS tahun sebelumnya dengan direktori perusahaan Kementerian Kehutanan/Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan pengecekan lapangan
Jenis Kuesioner	-



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Jumlah Perusahaan Pengelola Hasil Hutan Alam (HPH); Jumlah Perusahaan Pengelola Hasil Hutan Tanaman (HPHT); Jumlah Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).
--------------------------------	--

Publikasi yang dihasilkan

<u>Judul Publikasi</u>	<u>level terendah penyajian data</u>	<u>Tahun data yang disajikan</u>
Direktori Perusahaan Kehutanan	Provinsi	2018

<https://www.bps.go.id>

Implementasi SEEA dalam Sisnerling Indonesia



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Mengadopsi SEEA-CF 2012 agar Sisnerling Indonesia memiliki nilai keterbandingan dengan negara lain dari segi cakupan, konsep, dan definisi variabel.



DATA

Variabel pengumpulan data	Produksi barang dan jasa lingkungan; Konsumsi Antara; Konsumsi akhir aktual rumahtangga
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Orang yang memiliki pengetahuan mengenai laporan keuangan perusahaan/unit usaha
Unit Observasi	Perusahaan/unit usaha
Unit Analisis	Sumber Daya Alam
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung; Data Sekunder
Jenis Kuesioner	ID.SEEA-18



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Proporsi Tutupan Hutan; Intensitas Energi; Produk Domestik Neto 1 (PDN 1).
--------------------------------	--

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Laporan Uji Coba Neraca Arus Energi Indonesia	Nasional	2011-2015
Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia	Nasional	2013-2017

<https://www.bps.go.id>

Kompilasi Statistik Keuangan BUMN



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyediakan dan menyajikan data aktiva, pasiva, pendapatan, biaya, laba, dan rasio keuangan perusahaan secara sektoral maupun kelompok usaha serta tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan negara dalam sumber daya yang ada.



DATA

Variabel pengumpulan data	Kegiatan Perusahaan; Neraca; Laba-Rugi; Jenis Perusahaan Negara
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Kementrian BUMN
Unit Observasi	Kementrian BUMN
Unit Analisis	Perusahaan BUMN
Metode pengumpulan data	Kompilasi Produk Administrasi dengan cara data sekunder



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Return On Equity (ROE) BUMN; Return On Asset (ROA) BUMN; Solvabilitas/Total Debt to Total Assets BUMN; Profit Margin BUMN.
Publikasi yang dihasilkan	

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017	Nasional	2016-2017

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat di subsektor kehutanan.



DATA

Variabel pengumpulan data	Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi; Produksi kayu olahan; Ekspor kayu olahan; Ekspor kayu olahan; Keterangan perusahaan HPH (IUPHHK-HA); Perusahaan HPHT/PERUM PERHUTANI/HTI (IUPHHK_HT); Perusahaan penangkaran satwa dan tumbuhan liar (STL); Luas lahan kritis
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Triwulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Dinas Kehutanan Provinsi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Unit Observasi	Dinas Kehutanan Provinsi (DKT-PROV)
Unit Analisis	Nasional dan pulau
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Wawancara langsung; Mengisi kuesioner sendiri (swacach)
Jenis Kuesioner	DKT.PROV1; DKT.PROV2; DKT.PROV4; DKT.PROV3



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Produksi Kayu Olahan; Produksi Kayu Bulat; Produksi Hasil Hutan Non Kayu.
--------------------------------	---

Publikasi yang dihasilkan

<u>Judul Publikasi</u>	<u>level terendah penyajian data</u>	<u>Tahun data yang disajikan</u>
Statistik Produksi Kehutanan 2018	Nasional	2018

<https://www.bps.go.id>

Penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP)



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Perikanan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Mendapatkan data lengkap mengenai perusahaan penangkapan ikan meliputi data produksi, nilai produksi, data pendapatan lain, data pengeluaran untuk pekerja, sarana produksi, bahan bakar, listrik, air dan gas serta pengeluaran lainnya selama setahun.



DATA

Variabel pengumpulan data	Jumlah pekerja; Produksi Perikanan Tangkap; Pekerja di Darat; Pekerja di Laut; Nilai Produksi; Pengeluaran Bahan bakar, listrik, Air dan gas; Jumlah Perahu, motor tempel, dan Kapal motor
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Pemilik perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum
Unit Observasi	Perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum dengan kondisi hasil pencacahan adalah aktif atau sementara tidak aktif
Unit Analisis	Perusahaan penangkapan ikan
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Mengisi kuesioner sendiri (swacach)
Jenis Kuesioner	DAFTAR-LTP



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Jumlah Perusahaan Penangkapan Ikan menurut Badan Hukum; Volume Produksi Perusahaan Penangkapan Ikan yang Berbadan Hukum; Nilai Produksi Perusahaan Penangkapan Ikan yang Berbadan
--------------------------------	---

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Perusahaan Perikanan 2017	Provinsi	2017

<https://www.bps.go.id>

Survei Harga Konsumen



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga konsumen
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Mendapatkan data harga konsumen yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan Indeks Harga Konsumen serta memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.



DATA

Variabel pengumpulan data	Harga Barang dan Jasa
Frekuensi Kegiatan	Bulanan
Frekuensi pengumpulan data	Mingguan; Bulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Pedagang eceran, rumah sakit, dokter, dan sebagainya yang jenis barang/jasanya relatif banyak dikonsumsi oleh masyarakat kota setempat, sesuai dengan jenis barang/jasa yang telah ditentukan dalam paket komoditas IHK.
Unit Observasi	Pedagang eceran di pasar tradisional/modern/outlet, Rumah tangga (upah pembantu RT), Institusi (tarif PAM, Listrik, uang sekolah, dll)
Unit Analisis	IHK/Inflasi dan Harga eceran/konsumen
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung; Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Indeks Harga Konsumen (IHK).
--------------------------------	------------------------------

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Harga Konsumen Beberapa Kelompok Makanan	Kabupaten/Kota	2016
Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Kesehatan, Pendidikan, Transpor	Kabupaten/Kota	2016
Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Sandang	Kabupaten/Kota	2016
Perkembangan Mingguan Harga Eceran Beberapa Jenis Bahan Pokok	Kabupaten/Kota	2016
Indeks Harga Konsumen	Kabupaten/Kota	2016
Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Perumahan	Kabupaten/Kota	2016
Harga Konsumen Nasional Beberapa Barang dan Jasa	Kabupaten/Kota	2016

<https://www.bps.go.id>

Survei Harga Konsumen Perdesaan



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan data harga konsumen perdesaan (sektor pertanian) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan indeks konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) dan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) serta indikator harga lainnya. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang perencanaan dan pengamatan dini pada pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya pertanian. Survei harga-harga ini telah menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Berita Resmi Statistik (BRS), Indikator Ekonomi, dan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE). Disamping itu, juga diterbitkan publikasi seri tahunan baik untuk indeks harga maupun data harganya.



DATA

Variabel pengumpulan data	Harga-harga komoditas konsumen perdesaan pada bulan pencacahan
Frekuensi Kegiatan	Bulanan
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Pedagang di pasar, penyedia jasa transportasi, komunikasi, kesehatan dan pendidikan
Unit Observasi	Pasar
Unit Analisis	Provinsi
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	HKD-1; HKD-2.1; HKD-2.2



Nama indikator yang dihasilkan

Indeks Yang Diterima (IT); Indeks Yang Dibayar (IB); Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan (NTN); Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTPH); Nilai Tukar Petani (NTP); Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP); Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR); Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP); Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT).

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Berita Resmi Statistik (BRS) NTP	Provinsi	2018
Publikasi Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Makanan	Provinsi	2018

<https://www.bps.go.id>

Survei Harga Produsen Perdesaan



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan data harga produsen perdesaan (sektor pertanian) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) serta indikator harga lainnya. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang perencanaan dan pengamatan dini pada pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya pertanian. Survei harga-harga ini telah menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Berita Resmi Statistik (BRS), Indikator Ekonomi, dan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE). Disamping itu, juga diterbitkan publikasi seri tahunan baik untuk indeks harga maupun data harganya.



DATA

Variabel pengumpulan data	Harga Komoditas-Komoditas Produksi; Harga Komoditas-Komoditas Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
Frekuensi Kegiatan	Bulanan
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Rumah tangga tangga tani (tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan tangkap & budidaya), pedagang di pasar, penyedia jasa transportasi, dan penyedia jasa buruh
Unit Observasi	Rumah tangga
Unit Analisis	Provinsi
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	HD-2 ; HD-5.1 ; HD-4; HD-3; HD-1 ; HD-5.2



Nama indikator yang dihasilkan

It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Hortikultura; It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat; It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Peternakan; It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Perikanan/Budidaya; Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Hortikultura; Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Peternakan; Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Tanaman Pangan; Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Hortikultura; Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Perikanan; Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat; It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Tanaman Pangan; Nilai Tukar Petani (NTP); Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib); Indeks Harga Yang Diterima Petani (It); Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTPH); Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan (NTN); Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT); Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP); Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR); Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP).

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Publikasi Statistik Harga Produsen Pertanian (Subsektor Peternakan dan Perikanan)	Provinsi	2018
Publikasi Upah Buruh Tani	Provinsi	2018
BRS Upah Buruh	Nasional	2018
Publikasi Statistik Harga Produsen Pertanian (subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, TPR)	Provinsi	2018
Berita Resmi Statistik (BRS)	Provinsi	2018

Survei Hortikultura Potensi



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memperoleh data estimasi produksi dan standing crop tanaman hortikultura potensi untuk penyusunan data PDB/PDRB Hortikultura per triwulan dengan pendekatan rumah tangga tahun berjalan2. Memperoleh karakteristik tanaman hortikultura potensi3. Menyempurnakan sistem CAPI yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan membuat sistem manajemen survei yang terintegrasi (monitoring online, pengumpulan data secara online, penarikan sampel, <i>weighting</i>, hingga tabulasi online)4. Melakukan studi penjaminan kualitas berdasarkan BPS <i>Quality Assurance Framework</i> (BPS QAF) dan <i>standard operating procedure</i> berdasarkan BPS <i>Statistical Business Process Model</i> (BPS SBPM).



DATA

Variabel pengumpulan data	Jumlah Tanaman Rusak; Jumlah Tanaman Menghasilkan; Jumlah Tanaman Sedang Tidak Menghasilkan; Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan; Produksi; Luas Panen Belum Habis; Luas Rusak/Tidak Berhasil (puso); Luas Panen Habis/ Dibongkar; Luas Penanaman Baru (Tambah Tanam); Luas Tanaman Awal Bulan; Jumlah Tanaman Awal Bulan; Jumlah Tanaman Baru/Penyisipan
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Rumah tangga yang mengusahakan tanaman hortikultura
Unit Observasi	Rumah tangga
Unit Analisis	Rumah tangga yang membudidayakan tanaman hortikultura terpilih

Metode pengumpulan data Survei dengan cara Wawancara langsung

Jenis Kuesioner SHOPI2018.P; SHOPI2018.S



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan Produktivitas Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan (BST); Produktivitasvitas Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim (SBS), dan Tanaman Biofarmaka (TBF).

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Laporan Hasil Survei Hortikultura Potensi dengan Menggunakan Teknologi Pengumpulan Data Berbasis Computer Assisted Personal Interviewing Tahun 2018	Kabupaten/Kota	2018

<https://www.bps.go.id>

Survei Komoditas Strategis Perkebunan Untuk Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Tanaman Perkebunan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan uji coba pengumpulan data rumah tangga usaha tebu dengan metode CAPI• Memperoleh estimasi data luas dan produksi rumah tangga tebu di level Kabupaten, serta pola distribusi produksi tebu• Mengaplikasikan sistem pendataan secara online dengan manajemen survei yang terintegrasi mulai dari pengumpulan data, validasi, monitoring (tabulasi), dan penarikan sampel rumah tangga, weighting, hingga tabulasi online.



DATA

Variabel pengumpulan data	Estimasi Luas Panen; Estimasi Produksi Tebu; Pola distribusi hasil produksi tebu
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Rumah tangga yang mengusahakan tanaman tebu
Unit Observasi	Rumah tangga yang mengusahakan tanaman tebu
Unit Analisis	Rumah tangga yang mengusahakan tanaman tebu
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	E-form VTEBU2018.DSRT; E-form VTEBU2018.S; VTEBU2018.DSBS; E-form VTEBU2018.P



Nama indikator yang dihasilkan

Produktivitas Tanaman Tebu.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Laporan Kegiatan Survei Komoditas Strategis Perkebunan Untuk Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga Tahun 2018		2018

<https://www.bps.go.id>

Survei Konversi Gabah Ke Beras



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Tanaman Pangan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Memperoleh data/informasi tentang: <ul style="list-style-type: none">• Angka konversi pengeringan dari Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG)• Rendeman penggilingan untuk bahan penghitungan produksi beras dari padi kualitas GKG• Faktor-faktor yang memengaruhi besaran (variasi) angka konversi pengeringan dan rendemen penggilingan



DATA

Variabel pengumpulan data	Kadar air gabah dan beras; Berat gabah
Frekuensi Kegiatan	Adhoc
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	<ol style="list-style-type: none">1. Konversi Pengeringan: rumah tangga yang menguasai/mengusahakan tanaman padi (mencakup padi sawah dan padi ladang) dan panen pada Bulan Maret–April 2018 (perwakilan musim hujan SR I) dan Bulan Juni-Agustus 2018 (perwakilan musim kemarau SR II)2. Konversi Penggilingan: perusahaan/usaha penggilingan padi baik skala besar, menengah, kecil, dan mikro yang melakukan proses penggilingan padi pada Bulan Maret–April 2018 (perwakilan musim hujan SR I) dan Bulan Juni-Agustus 2018 (perwakilan musim kemarau SR II)
Unit Observasi	<ol style="list-style-type: none">1. Konversi Pengeringan: rumah tangga yang menguasai/mengusahakan tanaman padi (mencakup padi sawah dan padi ladang) pada Bulan Maret–April 2018

(perwakilan musim hujan SR I) dan Bulan Juni-Agustus 2018
(perwakilan musim kemarau SR II)

2. Konversi Penggilingan: perusahaan/usaha penggilingan padi (dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 10631) skala besar, menengah, kecil, dan mikro hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)

Unit Analisis

Rumah tangga dan perusahaan

Metode pengumpulan data

Survei dengan cara Wawancara langsung; Pengamatan (Observasi)

Jenis Kuesioner

VK2018-DSRT C; VK2018-DSRT; VK2018-KERING; VK2018-GILING

<https://www.bps.go.id>

Survei Pertanian Hortikultura



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan
	Subdit. Stat. Hortikultura
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan data luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan2. Mendapatkan data jumlah produsen benih, luas penangkaran, produksi benih, jumlah pedagang benih, jumlah benih yang diperdagangkan, serta jumlah penggunaan benih.



DATA

Variabel pengumpulan data	Luas Panen Habis/ Dibongkar; Luas Panen Belum Habis; Luas Penanaman Baru; Luas Tanaman Akhir Bulan yang lalu; Luas Rusak/Tidak Berhasil/Puso; Jumlah Tanaman Akhir Triwulan yang Lalu; Tanaman Produktif yang Menghasilkan; Tanaman Produktif yang Sedang Tidak Menghasilkan; Tanaman Tua/Rusak; Produksi; Jumlah Tanaman Akhir Triwulan Laporan; Luas Tanaman Akhir Triwulan yang Lalu; Tanaman Baru/ Penanaman Baru; Tanaman Belum Menghasilkan; Luas Panen Habis/ Dibongkar; Luas Penanaman Baru (Tambah Tanam); Produksi Belum Habis; Luas Tanaman Akhir Triwulan Laporan; Produksi Dipanen Habis/ Dibongkar; Luas Tanaman Akhir Triwulan yang Lalu; Luas Panen Habis/ Dibongkar; Luas Panen Belum Habis; Luas Rusak/Tidak Berhasil (puso); Luas Tanaman Akhir Bulan Laporan; Produksi Dipanen Habis/Dibongkar; Produksi Belum Habis; Luas Panen Belum Habis; Luas Rusak/Tidak Berhasil (puso); Luas Penanaman Baru (Tambah Tanam); Produksi Dipanen Habis/ Dibongkar; Produksi Belum Habis; Luas Tanaman Akhir Triwulan Laporan
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan; Triwulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
-----------------	------------------------

Cakupan Responden	Dalam kegiatan ini, tidak ada responden karena prosedur penentuan luasan dan produksi dilakukan melalui <i>eye estimate</i> dan dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap sumber informasi, misal petani atau perangkat desa.
Unit Observasi	Kecamatan
Unit Analisis	Nasional dan Provinsi
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara <i>eye estimate</i>
Jenis Kuesioner	SPH-TBF; SPH-BST; SPH-TH; SPH-SBS



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim; Produktivitas Tanaman Biofarmaka; Produktivitas Tanaman Hias; Pertumbuhan Produksi Jenis Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan (BST).

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Indonesia 2018	Provinsi	2017-2018
Statistik Tanaman Biofarmaka Indonesia 2018	Provinsi	2017-2018
Statistik Tanaman Hias Indonesia 2018	Provinsi	2017-2018
Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Indonesia 2018	Provinsi	2017-2018

Survei Perusahaan Hortikultura



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyediakan direktori perusahaan hortikultura berbadan hukum dan usaha hortikultura lainnya serta data produksi, nilai produksi, upah/gaji dan tenaga kerja.



DATA

Variabel pengumpulan data	Perusahaan Hortikultura; Jumlah Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan pada Akhir Tahun; Jenis Usaha; Pekerja tidak tetap; Pekerja Asing; Upah/gaji; Upah/gaji Pekerja Harian Lepas/ Borongan; Upah Lembur; Uang transport dan makan; Kondisi NRT; Kondisi Perusahaan Hortikultura; Bentuk badan hukum; Status Perusahaan Hortikultura; Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan; Jumlah Tanaman Tua/Rusak; Jumlah Tanaman Produktif; Luas Lahan Usaha Budidaya Tanaman Hortikultura; Luas Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan pada Akhir Tahun; Nilai Produksi Benih; Produksi Primer ; Nilai Produksi Primer; Luas Tanam Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim, Tanaman Hias dan Tanaman Biofarmaka; Luas Panen Habis Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim, Tanaman Hias dan Tanaman Biofarmaka; Pekerja Kantor/Administrasi; Pekerja Tetap; Pekerja Lapangan; Luas Panen Belum Habis Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim, Tanaman Hias dan Tanaman Biofarmaka; Bonus, hadiah, dan lain-lain; Usaha Hortikultura Lainnya (NRT); Luas Lahan Usaha Budidaya Tanaman Hortikultura; Tanaman Belum Menghasilkan; Tanaman Produktif; Tanaman Tua/Rusak; Produksi Primer ; Nilai Produksi Primer; Luas Tanam Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim, Tanaman Hias dan Tanaman Biofarmaka; Luas Panen Habis Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim, Tanaman Hias dan Tanaman Biofarmaka; Luas Panen Belum Habis Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim, Tanaman Hias dan Tanaman Biofarmaka; Persentase Produksi; Pekerja dibayar; Pekerja Tidak Dibayar
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	1. Perusahaan hortikultura 2. Usaha hortikultura lainnya (NRT)
Unit Observasi	1. Perusahaan hortikultura 2. Usaha hortikultura lainnya (NRT)
Unit Analisis	Perusahaan dan usaha hortikultura lainnya
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	VP-Horti; VN-Horti



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan Jumlah Usaha Non Rumah Tangga Hortikultura; Jumlah Perusahaan Hortikultura Berbadan Hukum.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2018	Provinsi	2017

Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat di subsektor kehutanan.



DATA

Variabel pengumpulan data	Jumlah Perusahaan; Luas Areal; Produksi kayu bulat
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Perusahaan pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) di seluruh Indonesia
Unit Observasi	Perusahaan
Unit Analisis	Nasional dan Provinsi
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Wawancara langsung; Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Jenis Kuesioner	VT17.HPH



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Nilai Produksi Kayu Bulat Menurut Provinsi dan Jenis Kayu; Volume Penggunaan Produksi Kayu Bulat; Nilai Penggunaan Produksi Kayu Bulat; Upah/Gaji Pekerja Tetap; Jumlah Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan menurut Provinsi dan Luas Areal; Produksi Kayu Bulat Perusahaan Pengelola Hutan Alam.
--------------------------------	--

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tahun 2016	Provinsi	2017

<https://www.bps.go.id>

Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Mendapatkan data statistik yang lengkap di subsektor kehutanan.



DATA

Variabel pengumpulan data	Jumlah Perusahaan; Penguasaan dan penggunaan lahan; Produksi kayu bulat
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Perusahaan pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) dan Kesatuan Pemangku Hutan Perum Perhutani di seluruh Indonesia
Unit Observasi	Perusahaan
Unit Analisis	Nasional dan Provinsi
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Wawancara langsung; Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Jenis Kuesioner	VT17.HPHT; VT17.Perum



Nama indikator yang dihasilkan

Luas Lahan yang dikuasai Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan lainnya; Penggunaan Lahan yang dikuasai Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya; Produksi Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya Menurut Jenis Tanaman dan Jenis Produksi; Banyaknya dan Nilai Pengadaan dan Penggunaan Produksi Perusahaan HTI, Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya; Jumlah Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan; Produksi Kayu Bulat Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan; Banyaknya Pekerja Tetap Perusahaan HTI, Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2017	Provinsi	2017

<https://www.bps.go.id>

Survei Tahunan Perusahaan Perkebunan



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Tanaman Perkebunan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Untuk mengumpulkan data subsektor perkebunan per komoditi.



DATA

Variabel pengumpulan data	Jenis kantor perusahaan perkebunan, kantor administratur, kantor pusat, dan group perusahaan; Jenis tanaman perkebunan tahunan atau semusim yang diusahakan; Kemitraan usaha perkebunan; Unit pengolahan produksi; Jenis perkebunan; Jenis kondisi tanaman; Tahun tanam tanaman perkebunan tahunan di kebun plasma yang belum dikonversi/kemitraan; Luas tanaman perkebunan tahunan di kebun plasma yang belum dikonversi/kemitraan; Tahun tanam tanaman perkebunan tahunan di kebun sendiri/inti; Luas tanaman perkebunan tahunan di kebun sendiri/inti; Nilai produksi primer tanaman perkebunan tahunan; Luas tanam tanaman perkebunan semusim; Luas panen tanaman perkebunan semusim; Pengeluaran lainnya untuk budidaya tanaman perkebunan; Penggunaan sarana produksi tanaman perkebunan tahunan; Pekerja Kantor/Administrasi; Jumlah pekerja kebun tetap; Pekerja kebun/lapangan; Pekerja tetap usaha; Pekerja Tidak Tetap; Pendapatan bersih perusahaan perkebunan dari usaha tanaman perkebunan; Pendapatan tanaman perkebunan tahunan; Pendapatan bersih perusahaan perkebunan dari usaha pertanian lainnya ; Produksi primer tanaman perkebunan tahunan; Produksi primer tanaman semusim
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Perusahaan Perkebunan
Unit Observasi	Administratur Kebun

Unit Analisis	Nasional
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	SKB17-TAHUNAN



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan Rata-rata Produksi Tanaman Perkebunan.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Direktori Perusahaan Perkebunan Karet	Provinsi	2017
Statistik Teh Indonesia	Provinsi	2016-2017
Statistik Tebu Indonesia	Provinsi	2016-2017
Statistik Kelapa Sawit Indonesia	Provinsi	2016-2017
Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	Provinsi	2017
Statistik Karet Indonesia	Provinsi	2016-2017

<https://www.bps.go.id>

Survei Perusahaan Perkebunan Triwulanan



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Tanaman Perkebunan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Untuk mengumpulkan data perusahaan perkebunan triwulanan untuk komoditi kakao, karet, kelapa sawit, kopi, tebu, teh, tembakau.



DATA

Variabel pengumpulan data	Produksi Laporan Triwulanan Tembakau; Produksi Laporan Triwulanan Gula; Produksi Laporan Triwulanan Teh; Produksi Laporan Triwulanan Karet; Produksi Laporan Triwulanan Sawit; Produksi Laporan Triwulanan Kopi; Produksi Laporan Triwulanan Kakao
Frekuensi Kegiatan	Triwulanan
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Perusahaan Perkebunan
Unit Observasi	Administratur kebun
Unit Analisis	Perusahaan Perkebunan
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	SKB18-TEBU; SKB18-KELAPA SAWIT; SKB18-KOPI; SKB18-TEH; SKB18-KAKAO; SKB18-KARET; SKB18-TEMBAKAU



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	-
--------------------------------	---

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Teh Indonesia	Nasional	2017
Statistik Tebu Indonesia	Nasional	2017
Direktori Perusahaan Perkebunan Karet	Nasional	2017
Indikator Ekonomi, Sub Bab Produksi (Rilis tiap bulan tanggal 25)	Nasional	2017
Statistik Karet Indonesia	Nasional	2017
Statistik Kelapa Sawit Indonesia	Nasional	2017
Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	Nasional	2017

<https://www.bps.go.id>

Survei Statistik Keuangan BUMD



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyediakan dan menyajikan data aktiva, pasiva, pendapatan, biaya, laba, dan rasio keuangan perusahaan secara sektoral maupun kelompok usaha serta tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan daerah dalam sumber daya yang ada.



DATA

Variabel pengumpulan data	Kepemilikan Perusahaan Daerah; Kegiatan Perusahaan; Tenaga kerja; Neraca; Laba-Rugi
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Perusahaan BUMD
Unit Observasi	Perusahaan BUMD
Unit Analisis	Laporan Keuangan Perusahaan BUMD
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Mengisi kuesioner sendiri (swacakah)
Jenis Kuesioner	V-BUMD18



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Return On Equity (ROE) BUMD; Solvabilitas/Total Debt to Total Assets BUMD; Total Debt to Equity Ratio (DER) BUMD; Current Ratio BUMD; Return On Asset (ROA) BUMD.
--------------------------------	---

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017	Provinsi	2016-2017

<https://www.bps.go.id>

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyediakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan realisasi APBDesa secara berkala setiap tahunnya.



DATA

Variabel pengumpulan data	Pendapatan desa/nagari; Belanja desa/nagari; Pendapatan asli desa/nagari; Belanja barang jasa; Alokasi dana desa; Belanja pegawai; Belanja Modal; Dana Desa
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Desa Perdesaan dan Desa Perkotaan
Unit Observasi	Pemerintah Desa/Nagari
Unit Analisis	APBDesa dan Realisasi APBDesa
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Jenis Kuesioner	K-3



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan Tingkat Kemandirian Pemerintah Desa.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2018	Kabupaten/Kota	2017-2018

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan data tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota2. Mendapatkan indikator tentang efektivitas kinerja keuangan daerah dan penggunaannya untuk belanja daerah.



DATA

Variabel pengumpulan data	Dana Perimbangan; Pendapatan Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Daerah; Belanja Pegawai; Belanja Barang Jasa; Belanja Modal
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia
Unit Observasi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Unit Analisis	APBD dan Realisasi APBD Kabupaten/Kota
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Mengisi kuesioner sendiri (swacach)
Jenis Kuesioner	K-2; APBD-2



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota.
--------------------------------	-------------------------------------

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017 - 2018	Kabupaten/Kota	2017-2018

<https://www.bps.go.id>

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan data tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi2. Mendapatkan indikator tentang efektifitas kinerja keuangan daerah dan penggunaannya untuk belanja daerah.



DATA

Variabel pengumpulan data	Belanja Modal; Pendapatan Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Belanja Daerah; Belanja Pegawai; Belanja Barang Jasa
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Seluruh Pemerintahan Provinsi di Indonesia
Unit Observasi	Pemerintah Provinsi
Unit Analisis	APBD Provinsi dan Realisasi APBD Provinsi
Metode pengumpulan data	Sensus dengan cara Mengisi kuesioner sendiri (swacach)
Jenis Kuesioner	K-1; APBD-1



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Tingkat Kemandirian Pemerintah Provinsi.
Publikasi yang dihasilkan	

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015 - 2018	Provinsi	2015-2018

<https://www.bps.go.id>

Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	a. Mendapatkan data profil petani usaha tanaman hortikultura. b. Mendapatkan data struktur ongkos usaha tanaman hortikultura. c. Mendapatkan data karakteristik usaha tanaman hortikultura.



DATA

Variabel pengumpulan data	Banyaknya anggota rumah tangga (10 tahun ke atas) yang menjadi petani [tanaman hortikultura terpilih]
Frekuensi Kegiatan	ad hoc
Frekuensi pengumpulan data	ad hoc



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Rumah Tangga Pertanian Yang Mengusahakan Tanaman Hortikultura Terpilih
Unit Observasi	Rumah Tangga Pertanian
Unit Analisis	Rumah Tangga yang membudidayakan Tanaman Hortikultura Terpilih
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung
Jenis Kuesioner	SOUH2018-DSRT (P); SOUH2018-S; SOUH2018-DSRT (C); SOUH2018-DSRT



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Struktur Biaya Produksi; R/C Ratio.
--------------------------------	-------------------------------------

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Laporan Hasil SOUH2018	Provinsi	2018

<https://www.bps.go.id>

Survei Tendensi Bisnis



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Analisis Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan informasi yang dini tentang perkembangan perekonomian dari sisi pengusaha pada kondisi triwulan berjalan2. Memberikan perkiraan kondisi bisnis tiga bulan mendatang.



DATA

Variabel pengumpulan data	Order Barang Input; Order dari luar negeri; Pendapatan Usaha; Rata-rata jam kerja; Penggunaan kapasitas produksi; Order dari dalam negeri; Harga jual
Frekuensi Kegiatan	Triwulanan
Frekuensi pengumpulan data	Triwulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Pimpinan perusahaan atau yang berwenang
Unit Observasi	Perusahaan skala menengah dan besar
Unit Analisis	Kategori lapangan usaha
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Jenis Kuesioner	STB18.BE; STB18.F; STB18.G; STB18.H; STB18.I; STB18.KS; STB18.A



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Indeks Indikator Kini (IIK); Indeks Indikator Mendatang (IIM).
--------------------------------	--

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen	Nasional	2018

<https://www.bps.go.id>

Survei Volume Penjualan Eceran Beras



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga konsumen
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui volume penjualan eceran beras menurut jenis dan kualitas yang diperjualbelikan di pasar-pasar2. Mengetahui daya serap pasar terhadap berbagai jenis kualitas beras3. Mengetahui peranan masing-masing pasar dalam pembentukan harga beras di suatu kota.



DATA

Variabel pengumpulan data	Rata-rata Volume Penjualan Beras Sehari
Frekuensi Kegiatan	Semesteran
Frekuensi pengumpulan data	Semesteran



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Pedagang Eceran Beras dan Pedagang Besar Merangkap Eceran Beras
Unit Observasi	Pedagang Eceran Beras dan Pedagang Beras Merangkap Eceran Beras
Unit Analisis	Kabupaten/kota
Metode pengumpulan data	Survei dengan cara Wawancara langsung; Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Jenis Kuesioner	-



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Persentase jenis/kualitas beras terbesar.
--------------------------------	---

**KOMPILASI
PRODUK
ADMINISTRASI
BIDANG SOSIAL**



<https://www.bps.go.id>

Analisis Isu Terkini



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Analisis Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis Dampak Fluktuasi Harga Beras Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia,2. Analisis Dampak Kebijakan Trump Terhadap Kondisi Perdagangan Internasional dan Moneter Indonesia,3. Analisis Negara Potensi Tujuan Ekspor Indonesia Pasca Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.



DATA

Variabel pengumpulan data	Harga Beras; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga; impor beras; Nilai Tukar Valuta
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan; Triwulanan; Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	-
Unit Observasi	Nasional
Unit Analisis	Provinsi
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara Mengolah dari raw data dan data sekunder



KELUARAN

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Analisis Isu Terkini 2018	Nasional	2010-2018

Kompilasi Data Indikator Pembangunan Berkelanjutan



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Lingkungan Hidup
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi yang menggambarkan keadaan dan usaha-usaha penanggulangan kerusakan terhadap alam secara berkesinambungan2. Menyediakan informasi yang komprehensif, mengenai tekanan, dampak, dan respon terhadap kegiatan sosial ekonomi pada lingkungan hidup3. Menyajikan data dan informasi tentang perkembangan keadaan dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia.



DATA

Variabel pengumpulan data	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Sanitasi Layak; Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Rasio Elektrifikasi; Konsumsi Listrik Perkapita; Bauran Terbarukan; Populasi Penduduk Perkotaan yang Tinggal di Daerah Kumuh; Hunian Layak dan Terjangkau; Korban Bencana; Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman; Kawasan Konservasi Perairan; Akses Air Minum Layak
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	<ol style="list-style-type: none">1. BMKG (Seluruh Provinsi)2. Dinas Kelautan dan Perikanan (Seluruh Provinsi)3. Badan Lingkungan Hidup (Seluruh Provinsi)4. Dinas Kebersihan Kota (Seluruh Provinsi)
Unit Observasi	<ol style="list-style-type: none">1. BMKG (Seluruh Provinsi)2. Dinas Kelautan dan Perikanan (Seluruh Provinsi)3. Badan Lingkungan Hidup (Seluruh Provinsi)4. Dinas Kebersihan Kota (Seluruh Provinsi)

Unit Analisis

Provinsi

Metode pengumpulan data

Kompilasi Produk Administrasi dengan cara Kompilasi data dan studi literatur



KELUARAN

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB)	Provinsi	2012-2017

<https://www.bps.go.id>

Kompilasi Data Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Indikator Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan gambaran umum tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu yang mencakup pengkajian bidang-bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup2. Memberikan gambaran umum tentang perbandingan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antar provinsi maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan) yang mencakup pengkajian bidang Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya3. Memberikan gambaran tentang kondisi sosial ekonomi wilayah perbatasan yang merupakan bagian penting dari agenda pemerintah yang tercantum dalam Nawacita.



DATA

Variabel pengumpulan data	Pola Konsumsi; Perumahan; Lingkungan; Kemiskinan; Sosial Lainnya; Kependudukan; Kesehatan; Gizi; Ketenagakerjaan; Permukiman kumuh perkotaan; Backlog perumahan; Perumahan Layak Huni; Akses terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau; Akses air minum dan sanitasi yang layak
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Penanggungjawab teknis di BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan
Unit Observasi	BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan

Unit Analisis

Penduduk dan Rumah Tangga

Metode pengumpulan data

Kompilasi Statisti dengan cara pengolahan raw data



KELUARAN

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi

level terendah penyajian data Tahun data yang disajikan

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018 Provinsi

2014-2017

<https://www.bps.go.id>

Kompilasi Data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Lingkungan Hidup
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan informasi yang menggambarkan keadaan dan usaha-usaha penanggulangan alam secara berkesinambungan2. Mengevaluasi ketersediaan dan potensi sumber daya alam3. Menyediakan informasi yang komprehensif, baik informasi mengenai tekanan, dampak, dan respon terhadap kegiatan sosial ekonomi pada lingkungan hidup4. Menyajikan data dan informasi tentang perkembangan keadaan dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia5. Menyajikan data kerusakan lingkungan alam, buatan, dan sosial6. Menyajikan data sumber daya alam yang tersedia di Indonesia7. Membantu para pengambil kebijakan dalam merencanakan, memonitor, dan menentukan program terkait lingkungan.



DATA

Variabel pengumpulan data	Lingkungan Alam; Lingkungan Buatan; Lingkungan Sosial
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	<ol style="list-style-type: none">1. BMKG (Seluruh Provinsi)2. Badan Lingkungan Hidup (Seluruh Provinsi)3. Dinas Kebersihan Kota (Seluruh Provinsi)
Unit Observasi	<ol style="list-style-type: none">1. BMKG (Seluruh Provinsi)2. Dinas Kelautan dan Perikanan (Seluruh Provinsi)3. Dinas Kebersihan Kota (Seluruh Provinsi)

Unit Analisis

Provinsi

Metode pengumpulan data

Kompilasi Produk Administrasi dengan cara Kompilasi data dan studi literatur



KELUARAN

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)	Provinsi	2012-2017

<https://www.bps.go.id>

Kompilasi Data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Lingkungan Hidup
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyajikan isu terkait laut dan pesisir, kondisi fisik, sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, jasa kelautan, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat pesisir.



DATA

Variabel pengumpulan data	Budidaya Laut; Sumber daya pesisir; Perikanan
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	<ol style="list-style-type: none">1. BMKG (Seluruh Provinsi)2. Dinas Kelautan dan Perikanan (Seluruh Provinsi)3. Badan Lingkungan Hidup (Seluruh Provinsi)4. Pemerintah daerah (Pemda) seluruh propinsi
Unit Observasi	<ol style="list-style-type: none">1. BMKG (Seluruh Provinsi)2. Dinas Kelautan dan Perikanan (Seluruh Provinsi)3. Badan Lingkungan Hidup (Seluruh Provinsi)4. Pemerintah daerah (Pemda) seluruh propinsi
Unit Analisis	Provinsi
Metode pengumpulan data	Kompilasi Produk Administrasi dengan cara Kompilasi data dan studi literatur



KELUARAN

Publikasi yang dihasilkan	
Judul Publikasi	level terendah penyajian data Tahun data yang disajikan
Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP) Provinsi	2012-2017

Kompilasi Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
	Subdit. Indikator Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyajikan indikator-indikator SDGs yang tersedia di Indonesia khususnya Badan Pusat Statistik dan beberapa instansi lain2. Mengetahui posisi capaian awal pembangunan berkelanjutan pada setiap tujuan SDGs dengan melakukan analisis terhadap indikator yang tersedia3. Mendorong kepada para pemangku kepentingan dalam menyediakan data dan informasi bagi ketersediaan indikator SDGs di Indonesia.



DATA

Variabel pengumpulan data	Kemiskinan; Kesehatan; Kelaparan; Pendidikan; Kesenjangan Gender; Akses Air Bersih dan Sanitasi; Energi Bersih; Pekerjaan Layak; Ketimpangan; Kota yang berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi; Perubahan Iklim; Ekosistem Darat; Ekosistem Laut; Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan; Kemitraan; Infrastruktur
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	<i>Subject Matter</i> terkait di BPS dan Berbagai Kementrian/Lembaga terkait
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara Kompilasi dan Olah Raw Data

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 2018	Provinsi	2012-2017

<https://www.bps.go.id>

Penyusunan Indeks Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Analisis Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kajian awal penyusunan GII atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG) untuk memperoleh IKG yang sesuai dengan kondisi Indonesia namun tetap ilmiah dan memperhatikan aspek konseptual2. Menyusun metodologi IKG yang sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan indikator-indikator yang ada di Indonesia3. Menghasilkan indikator komposit yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi wilayah di Indonesia/ <i>local specific issues</i>, ketersediaan data, maupun metodologi yang tepat secara statistik.



DATA

Variabel pengumpulan data	Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan; Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin dan berumur
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Unit Observasi	Provinsi dan Kabupaten/Kota
Unit Analisis	provinsi dan kabupaten/kota
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara Mengolah dari raw data



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	IKG (Indeks Ketimpangan Gender).
--------------------------------	----------------------------------

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Kajian Awal Indeks Ketimpangan Gender 2017	Provinsi	2015-2017

<https://www.bps.go.id>

**KOMPILASI
PRODUK
ADMINISTRASI
BIDANG EKONOMI**



<https://www.bps.go.id>

Analisis SE2016-L: Analisis Potensi Wilayah Indonesia



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Analisis Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan gambaran mengenai karakteristik/kualitas sumber daya manusia pada UMK2. Memberikan gambaran mengenai kondisi aksesibilitas permodalan dan faktor yang mempengaruhi kemudahan dalam mengakses permodalan3. Memberikan gambaran mengenai kinerja usaha dan determinannya yang ditinjau dari profitabilitas4. Menganalisis prospek usaha berdasarkan pengakuan responden dan faktor-faktor yang memengaruhinya.5. Menganalisis potensi yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja UMK



DATA

Variabel pengumpulan data	Kegiatan utama; Jumlah tenaga kerja; Status badan usaha; Nilai Pengeluaran selama satu bulan
Frekuensi Kegiatan	Sepuluh Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Unit Observasi	Perusahaan/Usaha
Unit Analisis	Usaha/perusahaan
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara (Mengambil tabulasi hasil Sensus Ekonomi 2016



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	-
--------------------------------	---

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil	Provinsi	2016-2017

<https://www.bps.go.id>

Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyediakan informasi data penunjang yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, monitor, dan evaluasi perkembangan di sektor pertanian seperti perkembangan produksi, lahan pertanian, upah tenaga kerja, harga, ekspor, impor, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, dan kontribusi subsektor pertanian terhadap PDB sektor pertanian.



DATA

Variabel pengumpulan data	Nilai Tukar Petani (NTP); Produksi Tanaman Padi; Produksi Tanaman Palawija; Produksi Tanaman Sayuran; Produksi Tanaman Perkebunan Besar Negara; Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta; Produk Domestik Bruto (PDB); Produksi Tanaman Buah-buahan; Produksi Tanaman Kehutanan; Upah Buruh Tani; Upah Nominal Buruh Tani; Produksi Perikanan Tangkap; Produktivitas Tanaman Pangan; Produktivitas tanaman hortikultura; Produktivitas tanaman perkebunan; Luas Panen Tanaman Pangan; Luas Lahan Pertanian; Luas Tanaman Perkebunan Besar Negara; Luas Lahan Usaha Budidaya Perikanan; Rumah Tangga Perikanan Budidaya; Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan di Perairan Umum; Harga tanaman perkebunan; Produksi peternakan; Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian; Upah Riil Buruh Tani; Harga Produsen; Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan di Laut; Luas Tanaman Perkebunan; Luas Tanaman Perkebunan Rakyat; Luas Tanaman Perkebunan Besar; Luas Tanaman Perkebunan Besar Swasta; Produksi; Produksi Perikanan Budidaya; Impor; Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat; Ekspor
---------------------------	--

Frekuensi Kegiatan Tahunan

Frekuensi pengumpulan data Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah Seluruh kabupaten/kota

Cakupan Responden	Unit kerja yang bekerja di bidang pertanian, harga perdesaaan, dan neraca produksi
Unit Analisis	Nasional
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara Data sekunder



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan Sumbangan Subsektor Pertanian; Indeks Produksi Subsektor Pertanian; Indeks Berantai Produksi Subsektor Pertanian; Produktivitas Tanaman.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Indikator Pertanian 2017	Nasional	2013-2017

<https://www.bps.go.id>

Kompilasi Data Indikator Ekonomi



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Indikator Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyajikan statistik ekonomi yang dibutuhkan para pemakai data untuk berbagai keperluan pengamatan dan analisa ekonomi.



DATA

Variabel pengumpulan data	Indeks Harga Konsumen; Indeks Harga Produsen; Nilai Tukar Petani; Indeks Harga Perdagangan Besar; Nilai Tukar Valuta; Keuangan; Perbankan; Penanaman modal; Produksi sektor Pertanian; Produksi Sektor Industri; Produksi Sektor Pertambangan; Konstruksi; Neraca Pembayaran; Perdagangan luar negeri; Perhubungan; Perhotelan; Pariwisata; Pendapatan Nasional
Frekuensi Kegiatan	Bulanan
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Penanggung jawab teknis di BPS, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan instansi lain
Unit Observasi	BPS, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan instansi lain
Metode pengumpulan data	Kompilasi Produk Administrasi dengan cara data sekunder

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Indikator Ekonomi Januari 2018	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi Agustus 2018	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi Februari 2018	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi Mei 2018	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi Maret 2018	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi Oktober 2018	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi Desember 2017	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi Juni 2018	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi November 2017	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi April 2018	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi September 2018	Provinsi	2005-2018
Indikator Ekonomi Juli 2018	Provinsi	2005-2018

<https://www.bps.go.id>

Kompilasi Data Laporan Perekonomian Indonesia



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
	Subdit. Indikator Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyajikan indikator-indikator statistik ekonomi secara berkala dan berkelanjutan sebagai informasi kepada masyarakat tentang perkembangan dan kondisi perekonomian di wilayah Indonesia2. Menyajikan perkembangan ekonomi Indonesia yang bisa digunakan pemerintah dan swasta sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan berbagai kebijakan.



DATA

Variabel pengumpulan data	Pertumbuhan ekonomi regional; Perkembangan poros ekonomi maritim Indonesia; Inflasi; Impor; Neraca perdagangan Indonesia; Kinerja sektor moneter; Ekspor; Daya beli masyarakat; Tinjauan perekonomian dunia; Tinjauan perekonomian Indonesia; Pertumbuhan ekonomi nasional; Perkembangan investasi; Perdagangan saham; Pariwisata; Ketenagakerjaan
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Penanggungjawab teknis di BPS dan Kementerian/Lembaga
Unit Observasi	BPS dan Kementerian/Lembaga (seperti Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan instansi lainnya)
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara pengumpulan data dari subject matter

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Laporan Perekonomian Indonesia 2018	Provinsi	2009-2018

<https://www.bps.go.id>

Kompilasi Data Statistik Ekspor



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Distribusi Subdit. Stat. Ekspor
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Memperoleh data Statistik Ekspor baik bulanan maupun tahunan secara rinci dan berkesinambungan.



DATA

Variabel pengumpulan data	Nilai FOB; Volume; Kode HS (Harmonize System); Negara Tujuan; Propinsi Asal; Moda Transportasi; Pelabuhan Muat Ekspor; Valuta
Frekuensi Kegiatan	Bulanan
Frekuensi pengumpulan data	Harian; Mingguan; Bulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Semua pelaku ekspor yang menggunakan data kepabeanan (PEB 3.0, PPFTZ-03)
Unit Observasi	Semua pelaku ekspor (eksportir)
Unit Analisis	Komoditi, Volume, Nilai FOB, Negara tujuan, Moda Transportasi, Propinsi Asal, Pelabuhan Muat, Valuta
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara Lainnya



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Total Nilai Ekspor Migas Indonesia; Total Nilai Ekspor Non Migas Indonesia; Unit Value Indeks.
--------------------------------	--

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Januari 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Juni 2017	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, September 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Pebruari 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Agustus 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Desember 2017	Provinsi	2017
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Juli 2018	Provinsi	2018
Indeks Unit Value Ekspor, Januari 2018	Provinsi	2018
Indeks Unit Value Ekspor, Maret 2018	Provinsi	2018
Analisa Komoditi Ekspor, 2011-2017, Sektor Pertanian, Industri dan Pertambangan	Provinsi	2017
Indeks Unit Value Ekspor, Agustus 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Pebruari 2018	Provinsi	2018
Indeks Unit Value Ekspor, Desember 2017	Provinsi	2017
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Januari 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, April 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Mei 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Juni 2018	Provinsi	2018
Indeks Unit Value Ekspor, Juni 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Juni 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Agustus 2018	Provinsi	2018
Indeks Unit Value Ekspor, Pebruari 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, September 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Oktober 2018	Provinsi	2018
Ekspor Indonesia Menurut Kode ISIC, Tahun 2016-2017	Provinsi	2017
Ekspor Indonesia Menurut Kode SITC, Tahun 2016-2017	Provinsi	2017
Indeks Unit Value Ekspor, April 2018	Provinsi	2018
Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2017, Jilid II	Provinsi	2017

Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, April 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, November 2017	Provinsi	2017
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Desember 2017	Provinsi	2017
Indeks Unit Value Ekspor, Juli 2018	Provinsi	2018
Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2017, Jilid I	Provinsi	2017
Direktori Eksportir Indonesia 2017	Provinsi	2017
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Oktober 2018	Provinsi	2018
Indeks Unit Value Ekspor, Oktober 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Mei 2018	Provinsi	2018
Indeks Unit Value Ekspor, Mei 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Maret 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, November 2017	Provinsi	2017
Indeks Unit Value Ekspor, September 2018	Provinsi	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Maret 2018	Provinsi	2018
Ekspor Menurut Moda Transportasi, Tahun 2016-2017	Provinsi	2017
Indeks Unit Value Ekspor, 2013-2017	Provinsi	2013-2017
Indeks Unit Value Ekspor, November 2017	Provinsi	2017

Kompilasi Data Statistik Impor



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Stat. Distribusi Subdit. Stat. Impor
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyajikan data statistik impor secara bulanan maupun tahunan.



DATA

Variabel pengumpulan data	Pelabuhan Bongkar; Komoditas menurut HS; Berat Bersih; Nilai CIF; Negara Asal
Frekuensi Kegiatan	Bulanan
Frekuensi pengumpulan data	Mingguan; Bulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Perusahaan impor
Unit Observasi	Transaksi impor
Unit Analisis	Komoditas
Metode pengumpulan data	Kompilasi Produk Administrasi dengan cara Dokumen PIB dari Bea cukai dan Perusahaan cargo
Jenis Kuesioner	-



Nama indikator yang dihasilkan Index Unit Value Impor.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Direktori Importir Indonesia Tahun 2017	Nasional	2017
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Februari 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Agustus 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor November 2017	Nasional	2017
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juni 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor September 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Maret 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juli 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Januari 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Mei 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Oktober 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Desember 2017	Nasional	2017
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor April 2018	Nasional	2018
Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor (Jilid I, II, III) Tahun 2017	Nasional	2017
Index Unit Value Impor Tahun 2017	Nasional	2017

Kompilasi Statistik Indonesia



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Diseminasi Statistik Subdit. Publikasi dan Kompilasi Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan data bagi Pemerintah sebagai bahan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang2. Menyediakan data bagi dunia usaha sebagai dasar pengembangan usaha, penentuan sumber pembiayaan, perkiraan produksi, perencanaan dan pengembangan pemasaran3. Menyediakan data bagi akademisi dan masyarakat lainnya sebagai bahan rujukan suatu penelitian atau perencanaan suatu kegiatan.



DATA

Variabel pengumpulan data	-
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Liaison Officer (LO) di BPS dan Kementerian/Lembaga
Unit Observasi	BPS dan Kementerian/Lembaga
Unit Analisis	-
Metode pengumpulan data	Kompilasi Produk Administrasi dengan cara Kompilasi Produk Administrasi
Jenis Kuesioner	-



Nama indikator yang dihasilkan -

Publikasi yang dihasilkan

<u>Judul Publikasi</u>	<u>level terendah penyajian data</u>	<u>Tahun data yang disajikan</u>
Statistik Indonesia	Provinsi	2015-2017

<https://www.bps.go.id>

Penyesuaian Musiman (*Seasonal Adjustment*) pada Data PDB Triwulanan menurut Pengeluaran



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Pengembangan Model Statistik
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Melakukan proses penyesuaian musiman pada data PDB triwulanan menurut pengeluaran



DATA

Variabel pengumpulan data	Produk Domestik Bruto (PDB); Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga; Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; Pembentukan Modal Tetap Bruto; Inventori; Ekspor dan Impor Barang dan Jasa
Frekuensi Kegiatan	Triwulanan
Frekuensi pengumpulan data	Triwulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	-
Unit Analisis	Jenis Lapangan Usaha
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara lainnya



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	-
Publikasi yang dihasilkan	

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Seasonally adjusted data PDB triwulanan menurut pengeluaran	Nasional	2010-2018

Penyusunan Konsumsi Pemerintah Triwulanan/Tahunan Tahun Dasar 2010



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara

Direktorat Neraca Pengeluaran

Subdit. Neraca Pemerintah dan Badan Usaha

Tahun kegiatan

2018

Tujuan dan manfaat kegiatan

1. Untuk mengetahui besaran pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
2. Untuk mengetahui pertumbuhan konsumsi pemerintah baik *Q to Q*, *Y on Y*, maupun *C to C*
3. Untuk mengetahui kontribusi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDB Pengeluaran.



DATA

Variabel pengumpulan data

Pendapatan Pemerintah (APBN dan APBD); Belanja Pemerintah (APBN dan APBD); Transfer ke Daerah; Output BI; Realisasi Raskin

Frekuensi Kegiatan

Triwulanan

Frekuensi pengumpulan data

Triwulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah

Seluruh kabupaten/kota

Cakupan Responden

-

Unit Observasi

Agregat pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Unit Analisis

Pemerintahan umum

Metode pengumpulan data

Kompilasi Produk Administrasi dengan cara Permintaan data melalui surat resmi



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan

Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.

Penyusunan Neraca Pemerintahan Pusat Triwulanan



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Neraca Pengeluaran Subdit. Neraca Pemerintah dan Badan Usaha
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Melihat dan mengevaluasi kinerja transaksi keuangan pemerintah pusat dalam jangka pendek yang disajikan dalam data neraca pemerintahan pusat triwulanan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Neraca Produksi2. Neraca Pendapatan yang Dihasilkan3. Neraca Alokasi Pendapatan Primer4. Neraca Distribusi Pendapatan Sekunder5. Neraca Penggunaan Pendapatan Disposabel6. Neraca Modal7. Neraca Finansial.



DATA

Variabel pengumpulan data	Output Pemerintahan Pusat; Nilai Tambah Pemerintahan Pusat; Konsumsi Akhir Pemerintahan Pusat
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Triwulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Kementerian/lembaga dan subject matter terkait
Unit Observasi	Kementerian/lembaga dan subject matter terkait
Unit Analisis	Pemerintah Pusat
Metode pengumpulan data	Kompilasi Produk Administrasi dengan cara Permintaan data melalui surat resmi
Jenis Kuesioner	-



Nama indikator yang dihasilkan -

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Neraca Pemerintahan Pusat Triwulanan 2011-2018:2	Nasional	2011-2017

<https://www.bps.go.id>

Penyusunan Neraca Pemerintahan Umum



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Neraca Pengeluaran Subdit. Neraca Pemerintah dan Badan Usaha
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Melihat dan mengevaluasi kinerja transaksi keuangan pemerintahan umum dalam jangka pendek yang disajikan dalam data neraca pemerintahan umum yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Neraca Produksi2. Neraca Pendapatan yang Dihasilkan3. Neraca Alokasi Pendapatan Primer4. Neraca Distribusi Pendapatan Sekunder5. Neraca Penggunaan Pendapatan Disposabel6. Neraca Modal7. Neraca Finansial.



DATA

Variabel pengumpulan data	Output Pemerintahan Umum; Nilai Tambah Pemerintahan Umum; Konsumsi Akhir Pemerintahan Umum
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Triwulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	-
Unit Observasi	-
Unit Analisis	Pemerintah Umum (pusat dan daerah)
Metode pengumpulan data	Kompilasi Produk Administrasi dengan cara Permintaan data melalui surat resmi
Jenis Kuesioner	-



Nama indikator yang dihasilkan -

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2011-2017 (General Government Accounts of Indonesia 2011-2017)	Nasional	2011-2017

<https://www.bps.go.id>

Penyusunan PDB Indonesia Tahunan



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Tersedianya publikasi Pendapatan Nasional Indonesia



DATA

Variabel pengumpulan data	Produk Domestik Bruto (PDB); Produk Nasional Bruto (PNB); Pendapatan Nasional
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Triwulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	-
Unit Observasi	-
Unit Analisis	Lapangan usaha
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara Pengamatan (Observasi)
Jenis Kuesioner	-



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Laju Pertumbuhan PDB Tahunan; Distribusi Persentase PDB Tahunan.
Publikasi yang dihasilkan	

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Pendapatan Nasional Indonesia Tahunan	Nasional	2012-2016

Penyusunan PDB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (2010=100)



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Tersedianya publikasi PDB Triwulanan



DATA

Variabel pengumpulan data	Produk Domestik Bruto (PDB)
Frekuensi Kegiatan	Triwulanan
Frekuensi pengumpulan data	Triwulanan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	-
Unit Observasi	-
Unit Analisis	Lapangan usaha
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara Lainnya
Jenis Kuesioner	-



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan; Distribusi Persentase PDB Triwulanan.
Publikasi yang dihasilkan	

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Produk Domestik Bruto Triwulanan Nasional		2014-2018

Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyediakan data PDRB kabupaten/kota secara tahunan menurut 17 lapangan usaha yang dirinci atas: <ol style="list-style-type: none">1. PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan2. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan3. Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku4. PDRB per kapita kabupaten/kota atas dasar harga berlaku.



DATA

Variabel pengumpulan data	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut 17 Lapangan Usaha; Jumlah penduduk; PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut 17 Lapangan Usaha
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi
Unit Observasi	Kabupaten/Kota
Unit Analisis	Kabupaten/kota
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara Lainnya



Nama indikator yang dihasilkan

Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/ Kota menurut Lapangan Usaha; PDRB Perkapita; Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017. Buku 3 Pulau Kalimantan	Kabupaten/Kota	2013-2017
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2013-2017	Kabupaten/Kota	2013-2017
Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017. Buku 4 Pulau Sulawesi	Kabupaten/Kota	2013-2017
Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017. Buku 1 Pulau Sumatera	Kabupaten/Kota	2013-2017
Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017. Buku 2 Pulau Jawa-Bali	Kabupaten/Kota	2013-2017

Penyusunan PDRB Provinsi Menurut Lapangan Usaha (2010=100)



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Menyediakan data PDRB Provinsi secara triwulanan (menurut 17 lapangan usaha) dan tahunan (menurut 52 lapangan usaha) yang dirinci atas: <ol style="list-style-type: none">1. PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan2. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku3. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan4. Laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan5. Indeks harga implisit PDRB.



DATA

Variabel pengumpulan data	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan menurut 52 Lapangan Usaha; PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahunan menurut 52 Lapangan Usaha; PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan menurut 17 Lapangan Usaha; PDRB Atas Dasar Harga Konstan Triwulanan menurut 17 Lapangan Usaha; Jumlah penduduk
Frekuensi Kegiatan	Tahunan
Frekuensi pengumpulan data	Triwulanan; Tahunan



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Seluruh kabupaten/kota
Cakupan Responden	Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi
Unit Observasi	Provinsi
Unit Analisis	Provinsi
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara Lainnya



Nama indikator yang dihasilkan

Distribusi PDRB terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi menurut lapangan Usaha; PDRB Per Kapita; Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha; Indeks Harga Implisit menurut Lapangan Usaha.

Publikasi yang dihasilkan

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2012-2016	Provinsi	2013-2017

<https://www.bps.go.id>

PENYUSUNAN TABEL I-O PARIWISATA



IDENTITAS KEGIATAN

Penyelenggara	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
Tahun kegiatan	2018
Tujuan dan manfaat kegiatan	Tersedianya Tabel I-O Pariwisata



DATA

Variabel pengumpulan data	Tabel Input-Output (I-O) Pariwisata
Frekuensi Kegiatan	Ad hoc
Frekuensi pengumpulan data	Ad hoc



METODOLOGI

Cakupan Wilayah	Sebagian kabupaten/kota
Cakupan Responden	Perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata
Unit Observasi	Establishment
Unit Analisis	-
Metode pengumpulan data	Kompilasi Statisti dengan cara FGD dan indepth study
Jenis Kuesioner	-



KELUARAN

Nama indikator yang dihasilkan	-
Publikasi yang dihasilkan	

Judul Publikasi	level terendah penyajian data	Tahun data yang disajikan
Tabel Input-Output (I-O) Pariwisata Nasional		2014

**INDIKATOR
KEGIATAN
STATISTIK DASAR
BIDANG SOSIAL**



<https://www.bps.go.id>

Angka Buta Huruf (ABH)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang masih buta huruf.2. Dapat digunakan sebagai tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf.3. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.
Rumus Perhitungan	$ABH_{15+} = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>a : jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis</p> <p>b : jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas</p>
Interpretasi	Angka Buta Huruf berkisar antara 0-100. Tingkat buta huruf rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
P. 32 PILOT SP2020-C2, P. 07 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
Manfaat	Untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$CBR = \frac{B}{P} \times 1000$ <p>keterangan</p> <p>B : Jumlah kelahiran selama 1 tahun</p> <p>P : Jumlah penduduk pertengahan tahun</p>
Interpretasi	CBR tahun 2004 sebesar 20, artinya terdapat 20 kelahiran per 1000 penduduk Indonesia pada tahun
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Jumlah penduduk	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah anak yang dilahirkan hidup selama 1 tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Banyaknya kelahiran selama setahun per 1000, 100.000, atau 1.000.000 wanita pada kelompok umur tertentu
Manfaat	Sebagai dasar rujukan pembangunan kependudukan terkait kelahiran misalnya SDGs goal 3, indikator ke 3.7.2. angka kelahiran usia remaja (wanita umur 15-19 tahun)
Rumus Perhitungan	$ASFR = \frac{B_i}{P_i} \times 1000$ <p>Bi : jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i i : kelompok umur 15-19, ..., 45-49 Pi : jumlah wanita kelompok umur i Metode Tidak Langsung ASFR metode tidak langsung didapatkan dari hasil penghitungan fertilitas dengan metode anak kandung (<i>own children</i>)</p>
Interpretasi	ASFR 15-19 sebesar 38 berarti bahwa dalam satu juta wanita usia 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 38 anak selama masa usia suburnya.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah anak yang dimiliki wanita menurut kelompok umur	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah wanita umur 15 -49 tahun.	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah wanita umur 15-65 tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah anak kandung umur 0 - 14 tahun yang dimiliki oleh ibu berumur 15 - 65 tahun (Own Children)	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah anak yang Non Own Children (NOC) umur 0 - 14 tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020
Angka harapan hidup	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka kelahiran umum (General Fertility Rate/GFR)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Jumlah kelahiran hidup per 1000 wanita usia 15-49 atau 15-44 tahun.
Manfaat	Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.
Rumus Perhitungan	$GFR = \frac{B}{Pf_{15-49}} \times 1000$ <p>atau</p> $GFR = \frac{B}{Pf_{15-44}} \times 1000$ <p>keterangan : B : Jumlah kelahiran selama 1 tahun Pf 15-49 : jumlah wanita 15-49 Pf 15-44 : jumlah wanita 15-44</p>
Interpretasi	GFR sebesar 103, artinya terdapat 103 kelahiran hidup oleh wanita usia subur (15-49 tahun)
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Jumlah anak yang dilahirkan hidup selama 1 tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah wanita umur 15 -49 tahun.	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka Kematian Anak (AKA/Child Mortality Rate)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, Angka Kematian Anak tidak termasuk kematian bayi.
Manfaat	Dibandingkan dengan angka kematian bayi, angka kematian anak lebih merefleksikan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak yang tinggi mengindikasikan bahwa terjadinya salah gizi, hygiene buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, dan insiden kecelakaan di dalam atau sekitar rumah.
Rumus Perhitungan	AKA dihitung dengan dua cara yaitu a) Metode langsung: $D(12-59) = \frac{\text{Jumlah kematian anak umur 12-59 bulan}}{\text{Jumlah penduduk usis 12 - 59 bulan}} \times 1000$ pada pertengahan tahun. b) Metode tidak langsung: menggunakan model dari life table dan dihitung dengan aplikasi mortpak
Interpretasi	Misalnya dari data SUPAS2015 diperoleh perkiraan Angka Kematian Anak 1-4 tahun sebesar 4 per 1000 anak berusia (1-4) tahun dengan referensi waktu Mei 2011. Artinya pada pertengahan 2011 diantara 1000 anak yang berumur antara 1 sampai 4 tahun, 11 bulan 29 hari, 4 orang diantaranya tidak dapat mencapai usia 5 tahun..

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Jumlah kematian anak berusia 1 sampai 4 tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah penduduk berumur 1-4 tahun pada pertengahan tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020
Anak Lahir Hidup (ALH)	Pilot Sensus Penduduk 2020
Anak Masih Hidup (AMH)	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka Kematian Balita (AKBa/ Childhood Mortality Rate)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).
Manfaat	Angka ini sekaligus merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.
Rumus Perhitungan	a) Metode langsung: $D(0-59) = \frac{\text{Jumlah kematian anak umur 0-59 bulan}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 59 bulan}} \times 1000$ b) Metode tidak langsung: menggunakan model dari life table dan dihitung dengan aplikasi mortpak
Interpretasi	Misalnya dari data SUPAS 2015 mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar 26 per 1000 balita, dengan referensi waktu Mei 2011. Artinya, pada tahun 2011 setiap 1000 balita (umur 0 sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari) pada tahun 2011, 26 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah kematian anak berusia kurang dari 5 tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah penduduk berumur kurang dari 5 tahun pada pertengahan tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020
Anak Lahir Hidup (ALH)	Pilot Sensus Penduduk 2020
Anak Masih Hidup (AMH)	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka Kematian Baru Lahir (Neo-Natal Death Rate)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	$AK_{Neo} = D_{(0-1bln)} / B \times 1000$
Manfaat	$D_{(0-1bln)}$ = Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 bulan
Rumus Perhitungan	Metode langsung: $AK_{Neo} = D_{(0-1bln)} / B \times 1000$ $D_{(0-1bln)}$ = Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 bulan B = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu
Interpretasi	Dari SDKI 2012 hasil perhitungan Angka Kematian Baru Lahir adalah 19 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu tahun 2008-2012. Artinya di Indonesia pada tahun 2008-2012, diantara 1000 kelahiran hidup ada 19 bayi yang meninggal sebelum usia 1 bulan.

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Jumlah kematian anak berusia dibawah satu bulan	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu.	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka kematian bayi (AKB/IMR)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu
Manfaat	Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untyk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.
Rumus Perhitungan	a) Metode langsung: $D0 = \text{Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun} / B = \text{Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu}$ b) Metode tidak langsung: menggunakan model dari life table dan dihitung dengan aplikasi mortpak
Interpretasi	Dari SUPAS2015 hasil perhitungan AKB adalah 22 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu Mei tahun 2011. Artinya di Indonesia pada tahun 2011 diantara 1000 kelahiran hidup ada 22 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah kematian anak berusia dibawah satu tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu.	Pilot Sensus Penduduk 2020
Anak Lahir Hidup (ALH)	Pilot Sensus Penduduk 2020
Anak Masih Hidup (AMH)	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka Kematian Ibu (AKI)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985).
Manfaat	Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.
Rumus Perhitungan	MMR dihitung dengan dua cara yaitu
Interpretasi	Berdasarkan SUPAS2015, Angka Kematian Ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Indonesia untuk periode tahun 2011-2014, adalah sebesar 305. Artinya terdapat 305 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup.
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Metode langsung dan tidak langsung	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan/keguguran, persalinan dan masa 2 bulan setelah persalinan/keguguran	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu.	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka Melek Huruf (AMH)

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian, dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya diberbagai bidang kehidupan.2. Dapat digunakan sebagai tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf.3. Dapat digunakan untuk mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan, program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan manusia lainnya.4. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.
Rumus Perhitungan	$AMH_{15+} = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>a : jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis b : jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas</p>
Interpretasi	Angka Melek Huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel

P. 32 PILOT SP2020-C2, P. 07 PILOT SP2020-C2

Sumber data

Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SM, PT (19-24 tahun) dan PT (19-23 tahun)

Unit kerja penghasil

BPS

BPS

Definisi

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan NonFormal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan

Manfaat

1. Untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan.
2. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu.
3. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Rumus Perhitungan

$$APKSD = \frac{a_1}{b_1} \times 100\%$$

a1 : jumlah murid SD/ sederajat

b1 : jumlah penduduk usia 7-12 tahun

$$APKSMP = \frac{a_2}{b_2} \times 100\%$$

a2 : jumlah murid SMP/ sederajat

b2 : jumlah penduduk usia 13-15 tahun

$$APKSM = \frac{a_3}{b_3} \times 100\%$$

a3 : jumlah murid SM/ sederajat

b3 : jumlah penduduk usia 16-18 tahun

$$APKPT = \frac{a_4}{b_4} \times 100\%$$

a4 : jumlah murid PT/ sederajat
 b4 : jumlah penduduk 19-24 tahun

$$APKPT = \frac{a_5}{b_5} \times 100\%$$

a5 : jumlah murid PT/ sederajat
 b5 : jumlah penduduk 19-23 tahun

Interpretasi

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
P.33 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020
P. 34 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020
P.07 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020

Angka Partisipasi Murni

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.2. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
Rumus Perhitungan	$APMSD = \frac{a_1}{b_1} \times 100\%$ <p>a1 : jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun b1 : jumlah penduduk usia 7-12 tahun</p> $APMSMP = \frac{a_2}{b_2} \times 100\%$ <p>a2 : jumlah murid SMP/ sederajat usia 13-15 tahun b2 : jumlah penduduk usia 13-15 tahun</p> $APMSM = \frac{a_3}{b_3} \times 100\%$ <p>a3 : jumlah murid SM/ sederajat usia 16-18 tahun b3 : jumlah penduduk usia 16-18 tahun</p> $APMPT = \frac{a_4}{b_4} \times 100\%$ <p>a4 : jumlah murid PT/ sederajat usia 19-24 tahun b4 : jumlah penduduk 19-24 tahun</p>
Interpretasi	Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Level Estimasi -

Publikasi Keberadaan Indikator -

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
P.33 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020
P. 34 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020
P.07 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020

<https://www.bps.go.id>

Angka Partisipasi Sekolah

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.
Manfaat	Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.
Rumus Perhitungan	$APS_{7-12\text{tahun}} = \frac{a_1}{b_1} \times 100\%$ <p>a1 : jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun yang masih bersekolah b1 : jumlah penduduk usia 7-12 tahun</p> $APS_{13-15\text{tahun}} = \frac{a_2}{b_2} \times 100\%$ <p>a2 : jumlah murid SMP/ sederajat usia 13-15 tahun yang masih bersekolah b2 : jumlah penduduk usia 13-15 tahun</p> $APS_{16-18\text{tahun}} = \frac{a_3}{b_3} \times 100\%$ <p>a3 : jumlah murid SM/ sederajat usia 16-18 tahun yang masih bersekolah b3 : jumlah penduduk usia 16-18 tahun</p> $APS_{19-24\text{tahun}} = \frac{a_4}{b_4} \times 100\%$ <p>a4 : jumlah murid PT/ sederajat usia 19-24 tahun yang masih bersekolah b4 : jumlah penduduk 19-24 tahun</p>
Interpretasi	Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel

P. 32 PILOT SP2020-C2, P. 07 PILOT SP2020-C2

Sumber data

Pilot Sensus Penduduk 2020

Content Error

Unit kerja penghasil

Direktorat Peng. Metodologi Sensus dan Survei

Subdit. Pengembangan Desain Sensus dan Survei

Definisi

Kesalahan yang disebabkan oleh jawaban responden maupun kesalahan pencatatan oleh petugas. Pengukuran dilakukan dengan mengukur perbedaan isian yang tercantum pada dokumen hasil pencacahan GB SE dengan UC PES.

Manfaat

Melihat tingkat kesalahan isian.

Rumus Perhitungan

$$NDR = \frac{Y_{.i} - Y_{i.}}{n} \times 100$$

$$\hat{I} = \frac{(Y_{.i} + Y_{i.} - 2Y_{ii})}{\frac{1}{n}[Y_{.i}(n - Y_{i.}) + Y_{i.}(n - Y_{.i})]} \times 100$$

Interpretasi

- $NDR < 0.01$, perbedaan rendah
- $NDR = 0.01-0.05$, perbedaan sedang
- $NDR > 0.05$, perbedaan tinggi
- $lol < 20$, ketidakkonsistenan rendah
- $lol = 20-50$, ketidakkonsistenan sedang
- $lol > 50$, ketidakkonsistenan tinggi

Level Estimasi

Provinsi

Publikasi Keberadaan Indikator

-

Coverage Error

Unit kerja penghasil	Direktorat Peng. Metodologi Sensus dan Survei Subdit. Pengembangan Desain Sensus dan Survei
Definisi	Kesalahan yang disebabkan kesalahan cakupan oleh petugas.
Manfaat	Melihat tingkat kesalahan cakupan.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Kesalahan Cakupan Kotor} = \frac{\text{Lewat cacah SE} + \text{Salah cakup GBSE}}{\text{Populasi GBSE}}$
Interpretasi	Proporsi jumlah unit observasi yang salah cakup.
Level Estimasi	Provinsi

Jumlah Desa/Kelurahan dengan Keluarga Pengguna Listrik

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Ketahanan Wilayah
Definisi	Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) yang penduduknya menggunakan listrik.
Manfaat	Mengetahui jumlah desa/kelurahan di Indonesia tahun 2018 yang penduduknya menggunakan listrik.
Rumus Perhitungan	$Y = \sum_{i=1}^{34} N_i = N_1 + N_2 + \dots + N_{34}$ <p>Dimana:</p> <p>Y = Jumlah desa/kelurahan dengan keluarga pengguna listrik</p> <p>N_i = Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) di provinsi ke-i yang penduduknya menggunakan listrik</p>
Interpretasi	Jumlah desa/kelurahan yang penduduknya menggunakan listrik pada tahun tertentu.
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	STATISTIK POTENSI DESA 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah Desa/Kelurahan dengan Keluarga Pengguna Listrik	PODES2018-DESA

Jumlah Desa/Kelurahan dengan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk Pertanian

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Ketahanan Wilayah
Definisi	Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) yang sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya dari sektor pertanian.
Manfaat	Mengetahui jumlah desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2018 yang sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya dari sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	$Y = \sum_{i=1}^{34} N_i = N_1 + N_2 + \dots + N_{34}$ <p>Dimana:</p> <p>Y = Jumlah desa/kelurahan dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk pertanian</p> <p>N_i = Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) di provinsi ke-i yang sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya dari sektor pertanian</p>
Interpretasi	Jumlah desa/kelurahan dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dari sektor pertanian pada tahun tertentu.
Publikasi Keberadaan Indikator	STATISTIK POTENSI DESA 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah Desa/Kelurahan dengan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk Pertanian	PODES2018-DESA

Jumlah Desa/Kelurahan dengan Tenaga Kesehatan yang Tinggal/Menetap di Desa/Kelurahan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Ketahanan Wilayah
Definisi	Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) memiliki tenaga kesehatan yang tinggal/menetap.
Manfaat	Mengetahui jumlah desa/kelurahan di Indonesia tahun 2018 yang memiliki tenaga kesehatan yang tinggal/menetap.
Rumus Perhitungan	$Y = \sum_{i=1}^{34} N_i = N_1 + N_2 + \dots + N_{34}$ <p>Dimana: Y = Jumlah desa/kelurahan dengan tenaga kesehatan yang tinggal atau menetap pada tahun tertentu N_i = Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) di provinsi ke-i yang tenaga kesehatannya tinggal/menetap di desa/kelurahan.</p>
Interpretasi	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki tenaga kesehatan yang tinggal/menetap pada tahun tertentu.
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	STATISTIK POTENSI DESA 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah Desa/Kelurahan dengan Tenaga Kesehatan yang Tinggal/Menetap di Desa/Kelurahan	PODES2018-DESA

Jumlah Desa Kelurahan Tepi Laut

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Ketahanan Wilayah
Definisi	Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.
Manfaat	Mengetahui jumlah desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2018 yang berbatasan dengan laut. Indikator ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan kebijakan yang berbasis wilayah. Mengetahui jumlah desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2014 yang berbatasan dengan laut. Indikator ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan kebijakan yang berbasis wilayah.
Rumus Perhitungan	$Y = \sum_{i=1}^{34} N_i = N_1 + N_2 + \dots + N_{34}$ <p>Dimana:</p> <p>Y = Jumlah desa/kelurahan tepi laut</p> <p>N_i = Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya di provinsi ke-i yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang)</p>
Interpretasi	Jumlah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan laut pada tahun tertentu. Jumlah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan laut pada tahun tertentu.
Publikasi Keberadaan Indikator	STATISTIK POTENSI DESA 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah desa/kelurahan tepi laut	PODES2018-DESA

Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Ketahanan Wilayah
Definisi	Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) yang mengalami bencana alam.
Manfaat	Mengetahui jumlah desa/kelurahan di Indonesia tahun 2018 yang mengalami bencana alam.
Rumus Perhitungan	$Y = \sum_{i=1}^{34} N_i = N_1 + N_2 + \dots + N_{34}$ <p>Dimana:</p> <p>Y = Jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam</p> <p>N_i = Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) di provinsi ke-i yang mengalami bencana alam</p>
Interpretasi	Jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam pada tahun tertentu.
Publikasi Keberadaan Indikator	STATISTIK POTENSI DESA 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam	PODES2018-DESA

Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki SD

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Ketahanan Wilayah
Definisi	Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) yang tidak memiliki fasilitas pendidikan dasar berupa SD atau sederajat.
Manfaat	Mengetahui jumlah desa/kelurahan di Indonesia tahun 2018 yang tidak memiliki SD.
Rumus Perhitungan	$Y = \sum_{i=1}^{34} N_i = N_1 + N_2 + \dots + N_{34}$ <p>Dimana:</p> <p>Y = Jumlah desa/kelurahan yang tidak memiliki SD</p> <p>N_i = Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa (desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya) di provinsi ke-i yang tidak memiliki fasilitas pendidikan dasar berupa SD atau sederajat</p>
Interpretasi	Jumlah desa/kelurahan yang tidak memiliki SD pada tahun tertentu.
Publikasi Keberadaan Indikator	STATISTIK POTENSI DESA 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Fasilitas Pendidikan (jumlah fasilitas, jumlah penduduk, jarak)	PODES2018-DESA

Jumlah Penduduk

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam ribuan jiwa atau jutaan jiwa.
Manfaat	Jumlah penduduk menjadi denominator bagi indikator statistik lainnya. Selain jumlah penduduk hasil sensus, terdapat juga jumlah penduduk hasil proyeksi.
Rumus Perhitungan	$\sum P_i$ <p>keterangan : Pi : Jumlah ART</p>
Interpretasi	Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel

Anggota Rumah Tangga

Sumber data

Pilot Sensus Penduduk 2020

Jumlah Penduduk Bekerja (agregat) Menurut 17 Kategori Lapangan Usaha

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Jumlah absolut penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja secara agregat menurut 17 kategori lapangan usaha
Manfaat	Menghitung besarnya jumlah penduduk yang bekerja menurut 17 kategori lapangan usaha
Rumus Perhitungan	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut 17 Kategori Lapangan Usaha

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel

Bekerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) Menurut 17 Kategori Lapangan Usaha

Sumber data

Pilot Sensus Penduduk 2020

Jumlah Penduduk Bekerja (agregat) Menurut Karakteristik Lapangan Usaha dan Status

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Jumlah absolut penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja secara agregat menurut karakteristik lapangan usaha dan status pekerjaan
Manfaat	Menghitung besarnya jumlah penduduk yang bekerja menurut karakteristik lapangan usaha dan status pekerjaan
Rumus Perhitungan	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Karakteristik Lapangan Usaha dan Status

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel

Bekerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) Menurut Karakteristik Lapangan Usaha dan Status

Sumber data

Pilot Sensus Penduduk 2020

Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Ketahanan Sosial Subdit. Stat. Ketahanan Wilayah
Definisi	Banyaknya wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia, yaitu mencakup: desa, kelurahan, UPT/SPT, dan lainnya.
Manfaat	Mengetahui jumlah desa di Indonesia pada tahun 2018
Rumus Perhitungan	$\sum_{i=1}^{34} N_i = N_1 + N_2 + \dots + N_{34}$ <p>Dimana:</p> <p>N_i = Banyaknya wilayah administrasi pemerintahan pada provinsi ke-1,2,..,34</p>
Interpretasi	Jumlah desa/kelurahan pada tahun tertentu.
Publikasi Keberadaan Indikator	STATISTIK POTENSI DESA 2018

Nilai Impor dan Ekspor Non Dokumen PEB/PIB di Wilayah Perbatasan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Distribusi Subdit. Stat. Impor
Definisi	Kompilasi nilai penjualan/pembelian barang oleh pelintas batas yang melakukan aktivitas perdagangan ke/dari negara tetangga di wilayah perbatasan
Manfaat	Mendapatkan nilai perdagangan di wilayah perbatasan yang tidak tercatat dalam dokumen PEB/PIB
Rumus Perhitungan	$N_i = \sum_{j=1}^n N_{ij}$ <p>Dimana: N_i = Total nilai impor non PIB HS 2 digit ke-i N_{ij} = Nilai impor non PIB HS 2 Digit ke-i dokumen ke-j</p>
Interpretasi	Menunjukkan total nilai transaksi perdagangan ekspor/impor di wilayah perbatasan (dalam USD)

Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 tahun ke atas

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya. 2. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan analisis pasar kerja.
Rumus Perhitungan	$TamatSD = \frac{a_w}{b} \times 100\%$ $TamatSMP = \frac{a_x}{b} \times 100\%$ $TamatSM = \frac{a_y}{b} \times 100\%$ $TamatPT = \frac{a_z}{b} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>aw : jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat SD/ sederajat</p> <p>ax : jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat SMP/ sederajat</p> <p>ay : jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat SM/ sederajat</p> <p>az : jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat PT</p> <p>b : jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas</p>
Interpretasi	Nilai Angka Tamat berkisar antara 0-100. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
P.14 PILOT SP2020-C1	Pilot Sensus Penduduk 2020
P. 07 PILOT SP2020-C1	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Penyandang disabilitas

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Persentase penduduk usia 2 tahun ke atas penyandang disabilitas terhadap jumlah penduduk 2 tahun ke atas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk mengetahui prevalensi penyandang disabilitas (per kelompok umur, jenis kelamin, jenis penyandang disabilitas)2. Sebagai dasar untuk untuk pelaksanaan program penanganan penyandang disabilitas bagi K/L terkait.
Rumus Perhitungan	$\% \text{Penyandangdisabilitas} = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>a :Jumlah penduduk berumur 2 tahun keatas penyandang disabilitas</p> <p>b : Jumlah penduduk berumur 2 tahun keatas</p>
Interpretasi	Semakin tingi proporsi penyandang disabilitas di suatu daerah dapat dijadikan sebagai sinyal untuk prioritas pelaksanaan program penanganan disabilitas di daerah tersebut.

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
P.07 PILOT SP2020- C2	Pilot Sensus Penduduk 2020
P.22 sd P 29 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Komuter

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Proporsi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang melakukan kegiatan komuting/ulang-alik/nglaju/pp terhadap penduduk 5 tahun ke atas.
Manfaat	Biasanya kegiatan komuting/ulang-alik/nglaju/pp dilakukan untuk tujuan bekerja. Oleh karenanya indikator ini dapat digunakan untuk melihat aspek ekonomi mobilitas non permanen
Rumus Perhitungan	$K = \frac{\sum_{i=1}^{n_5+} k_i}{\sum_{i=1}^{n_5+} P_i} \times 100$
Interpretasi	Semakin besar persentase komuter menunjukkan semakin banyak penduduk berumur 5 tahun ke atas yang melakukan kegiatan komuting/ulang-alik/nglaju/pp menuju tempat kegiatannya
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Penduduk berumur 5+ yang melakukan kegiatan komuting/ulang-alik/nglaju/pp	Pilot Sensus Penduduk 2020
Penduduk berumur 5+	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Migran Risen

Unit kerja penghasil	BPS
	BPS
Definisi	Proporsi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang berstatus migran risen terhadap penduduk 5 tahun ke atas.
Manfaat	Untuk melihat pola pergerakan penduduk pada jangka pendek yang lebih dinamis.
Rumus Perhitungan	$M_{sk} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{r5+}} m_{ri}}{\sum_{i=1}^n P_i} \times 100$
Interpretasi	Semakin besar persentase migran risen menunjukkan semakin banyak penduduk Provinsi A berumur 5 tahun ke atas yang tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu di luar Provinsi A.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Penduduk berumur 5+ yang berstatus migran risen	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Migran Seumur Hidup

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Proporsi penduduk berumur 0 tahun ke atas yang berstatus migran seumur hidup terhadap penduduk 0 tahun ke atas.
Manfaat	Untuk melihat pola pergerakan penduduk pada jangka panjang.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Semakin besar persentase migran seumur hidup di Provinsi A menunjukkan semakin banyak penduduk Provinsi A yang lahirnya di luar Provinsi A.
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Penduduk berumur 0+ yang berstatus migran seumur hidup	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Migran Total

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Proporsi penduduk berumur 0 tahun ke atas yang berstatus migran total terhadap penduduk 0 tahun ke atas.
Manfaat	Untuk melihat dinamika mobilitas penduduk secara umum.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Semakin besar persentase migran total menunjukkan semakin banyak penduduk Provinsi A yang tempat tinggal sebelumnya di luar Provinsi A
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel

Penduduk berumur 0+ yang berstatus migran total dan penduduk berumur 0+

Sumber data

Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri dan Tidak Memiliki Rumah Lain Selain yang Ditempati

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah lain selain yang ditempati adalah pendekatan untuk mengukur backlog perumahan dari perspektif kepemilikan. Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah lain selain yang ditempati adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah lain selain yang ditempati terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).
Manfaat	Indikator ini digunakan sebagai pendekatan penghitungan backlog perumahan dari perspektif kepemilikan. Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.
Rumus Perhitungan	$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>a : Jumlah RT dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah lain selain yang ditempati</p> <p>b : Jumlah RT</p>
Interpretasi	Sebuah pendekatan untuk menunjukkan jumlah kebutuhan rumah di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 72	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 71	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara jumlah rumah tangga menurut bahan bakar utama untuk memasak tertentu terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).
Manfaat	Indikator ini memberikan informasi mengenai bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak oleh suatu rumah tangga.
Rumus Perhitungan	

$$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$$

dimana :

a : Jumlah RT dengan bahan bakar utama untuk memasak tertentu

b : Jumlah RT

Interpretasi	Persentase rumah tangga menurut bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak tertentu di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 77	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Atap Terluas

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara jumlah rumah tangga menurut bahan bangunan utama atap rumah terluas tertentu terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).
Manfaat	Indikator ini memberikan informasi mengenai bahan bangunan utama atap terluas suatu rumah tangga.
Rumus Perhitungan	$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana : a : Jumlah RT dengan bahan bangunan utama atap rumah terluas tertentu b : Jumlah RT</p>
Interpretasi	Persentase rumah tangga menurut bahan bangunan utama atap terluas tertentu di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 75	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara jumlah rumah tangga menurut bahan bangunan utama dinding rumah terluas tertentu terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).
Manfaat	Indikator ini memberikan informasi mengenai bahan bangunan utama dinding terluas suatu rumah tangga.
Rumus Perhitungan	$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana : a : Jumlah RT dengan bahan bangunan utama dinding rumah terluas tertentu b : Jumlah RT</p>
Interpretasi	Persentase rumah tangga menurut bahan bangunan utama dinding terluas tertentu di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 76	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara jumlah rumah tangga menurut bahan bangunan utama lantai rumah terluas tertentu terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).
Manfaat	Indikator ini memberikan informasi mengenai bahan bangunan utama lantai terluas suatu rumah tangga.
Rumus Perhitungan	$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana : a : Jumlah RT dengan bahan bangunan utama lantai rumah terluas tertentu b : Jumlah RT</p>
Interpretasi	Persentase rumah tangga menurut bahan bangunan utama lantai terluas tertentu di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 73	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Perkapita

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara jumlah rumah tangga menurut luas lantai per kapita tertentu terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).
Manfaat	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa salah satu kriteria rumah layak huni adalah memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m ² /orang sampai dengan 12 m ² /orang.
Rumus Perhitungan	$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana : a : Jumlah RT dengan luas lantai per kapita tertentu b : Jumlah RT</p>
Interpretasi	Rata-rata luas lantai yang ditempati setiap penduduk di suatu wilayah
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 2	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 74	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara jumlah rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal tertentu terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).
Manfaat	Indikator ini memberikan informasi mengenai status kepemilikan bangunan tempat tinggal.
Rumus Perhitungan	$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana : a : Jumlah RT dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal tertentu b : Jumlah RT</p>
Interpretasi	Persentase rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal tertentu di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 71	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan utama tertentu terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).
Manfaat	Indikator ini memberikan informasi mengenai sumber penerangan utama suatu rumah tangga.
Rumus Perhitungan	$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana : a : Jumlah RT dengan sumber penerangan utama tertentu b : Jumlah RT</p>
Interpretasi	Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama tertentu di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 78	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Manfaat	Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.
Rumus Perhitungan	$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana : a : Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak b : Jumlah RT</p>
Interpretasi	Menunjukkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 82	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 83	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 84	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Selain mempertimbangkan sumber air minum, penghitungan akses terhadap air minum layak yang digunakan oleh BPS juga mempertimbangkan sumber air yang digunakan untuk memasak/mandi/cuci/dll.
Manfaat	<p>Indikator ini digunakan untuk memantau akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak berdasarkan asumsi bahwa sumber air minum menyediakan akses dasar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari rumah tangga tersebut.</p> <p>Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).</p>
Rumus Perhitungan	$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>a : Jumlah RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak</p> <p>b : Jumlah RT</p>
Interpretasi	Menunjukkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 79	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 80	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 81	Pilot Sensus Penduduk 2020

<https://www.bps.go.id>

Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni

Unit kerja penghasil

BPS

Definisi

Persentase rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Terdapat 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak yaitu:

1. Sufficient living area Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m² karena tidak memenuhi sufficient living area atau kecukupan luas lantai hunian.
2. Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya.
3. Jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas adalah bambu atau lainnya.
4. Jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas adalah tanah atau lainnya.
5. Kepemilikan akses terhadap layanan sanitasi layak Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
6. Kepemilikan akses terhadap sumber air minum layak Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak.
7. Sumber utama penerangan Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila sumber utama penerangan rumah tangga adalah non listrik. Dari 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak huni, rumah tangga dikategorikan menempati rumah tidak layak huni apabila memenuhi 3 (tiga) atau lebih indikator penyusun.

Manfaat Indikator ini memberikan informasi mengenai rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

Rumus Perhitungan

$$Rumus = \frac{a}{b} \times 100\%$$

dimana :

a : Jumlah RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak

b : Jumlah RT

Interpretasi Menunjukkan rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni di suatu wilayah.

Level Estimasi Kabupaten/kota

Publikasi Keberadaan Indikator Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 73	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 74	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 75	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 76	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 78	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 79	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 80	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 81	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 82	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 83	Pilot Sensus Penduduk 2020
Pilot SP2020-C2 pertanyaan 84	Pilot Sensus Penduduk 2020

Persentase Sirkuler

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Proporsi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang melakukan kegiatan sirkuler terhadap penduduk 5 tahun ke atas.
Manfaat	Dapat melihat mobilitas non permanen untuk dinamika pergerakan penduduk wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$S = \frac{\sum_{i=1}^{n_{5+}} S_i}{\sum_{i=1}^{n_{5+}} P_i} \times 100$
Interpretasi	Semakin besar persentase sirkuler menunjukkan semakin banyak penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengunjungi kediaman/rumah/ tempat tinggal di kabupaten/kota lain secara rutin mingguan atau bulanan.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Penduduk berumur 5+ yang melakukan kegiatan sirkuler	Pilot Sensus Penduduk 2020
Penduduk berumur 5+	Pilot Sensus Penduduk 2020

Rasio Anak Ibu (Child Woman Rate/CWR)

Unit kerja penghasil	BPS BPS
Definisi	Rasio antara jumlah anak di bawah 5 tahun di suatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk wanita usia 15-49 tahun. Jumlah anak berusia 5 tahun kebawah mencerminkan kelahiran dalam 5 tahun sebelum pencacahan.
Manfaat	Melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah kecil tertentu. CWR ini digunakan apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.
Rumus Perhitungan	$CWR = \frac{P_{0-4}}{P_{15-44}} \times 1000$ $CWR = \frac{P_{0-4}}{P_{15-49}} \times 1000$ <p>keterangan : P 0-4 : Jumlah Penduduk umur 0-4 tahun Pf 15-49 : Jumlah wanita 15-49 Pf 15-44 : Jumlah wanita 15-44</p>
Interpretasi	CWR tahun 2004 sebesar 33 artinya pada tahun 2004 terdapat 33 anak usia dibawah lima tahun pada setiap 100 wanita usia 15-49 tahun. CWR tinggi berarti di wilayah tersebut banyak terdapat balita, dengan kata lain kelahiran yang terjadi cukup tinggi.
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah penduduk menurut kelompok umur	Pilot Sensus Penduduk 2020

Rasio Jenis Kelamin

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan
Manfaat	Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.
Rumus Perhitungan	$SR = \frac{P_L}{P_W} \times 100\%$ <p>SR : Rasio jenis kelamin PL : Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki Pw: Jumlah penduduk berjenis kelamin wanita</p>
Interpretasi	a. $SR > 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. b. $SR = 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. c. $SR < 100$ berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel

Jumlah penduduk

Sumber data

Pilot Sensus Penduduk 2020

Rasio Ketergantungan

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja/usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/ usia produktif).
Manfaat	Rasio ketergantungan merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui bonus demografi yang akan berguna bagi pembangunan di bidang kependudukan.
Rumus Perhitungan	$DR = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100\%$ <p>DR : Rasio ketergantungan P0-14: Jumlah penduduk usia muda (0 -14 tahun) P65+: Jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas) P15-64: Jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun)</p>
Interpretasi	Misalnya rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja(dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah penduduk	Pilot Sensus Penduduk 2020

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Unit kerja penghasil

BPS

BPS

Definisi

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Manfaat

1. Untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.
2. Untuk perencanaan dan evaluasi capaian program wajib belajar.

Rumus Perhitungan

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (LamaSekolahPendudukke - i)$$

Keterangan:

1. P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
2. Lama sekolah penduduk ke-i:
 - > Tidak pernah sekolah = 0
 - > Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - > Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
 - > Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
 - > Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
3. Tahun konversi ijazah
 - > Tidak punya ijazah = 0
 - > SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun
 - > D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun
 - > S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun

Interpretasi

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
P.33 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020
P. 34 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020
P. 35 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020
P.36 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020
P.07 PILOT SP2020-C2	Pilot Sensus Penduduk 2020

<https://www.bps.go.id>

Rate Emigran

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Perbandingan antara jumlah penduduk yang keluar Indonesia dan sekarang tinggal/menetap di negara lain dengan jumlah penduduk Indonesia.
Manfaat	Untuk melihat perubahan penduduk level internasional
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Semakin besar rate emigran menunjukkan semakin banyak penduduk Indonesia yang ke luar negeri selama 5 tahun terakhir dengan tujuan untuk tinggal/ menetap per 1000 penduduk.

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel

Sumber data

Penduduk berumur 5+ yang sekarang tinggal/menetap di luar negeri

Pilot Sensus Penduduk 2020

Penduduk berumur 5+

Pilot Sensus Penduduk 2020

Setengah penganggur

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Subdit. Stat. Ketenagakerjaan
Definisi	Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
Manfaat	Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.
Rumus Perhitungan	$TSP = \frac{A}{JPB} \times 100$ <p>dimana : TSP = Tingkat Setengah Pengangguran A = Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal JPB = Jumlah Penduduk Bekerja</p>
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran, maka semakin banyak tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan menggambarkan semakin banyaknya pekerjaan tidak layak yang tersedia.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Subdit. Stat. Ketenagakerjaan
Definisi	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja.
Manfaat	Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja.
Rumus Perhitungan	$TKK = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana: a = Jumlah Penduduk Bekerja b = Jumlah Angkatan Kerja</p>
Interpretasi	Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia; Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia; Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional; Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Bekerja	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Subdit. Stat. Ketenagakerjaan
Definisi	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.
Manfaat	Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.
Rumus Perhitungan	$TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana: a = Jumlah Angkatan Kerja b = Jumlah penduduk 15thn keatas</p>
Interpretasi	Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (<i>labour supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia; Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia; Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Angkatan kerja	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Subdit. Stat. Ketenagakerjaan
Definisi	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Manfaat	Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana: a = Jumlah Pengangguran b = Jumlah Angkatan Kerja</p>
Interpretasi	TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia; Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia; Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Pengangguran	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Total Fertility Rate

Unit kerja penghasil	BPS
Definisi	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.
Manfaat	Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.
Rumus Perhitungan	<p>Metode Langsung :</p> $5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok umur i I : kelompok umur 15-19, ..., 45-49</p> <p>Metode Tidak Langsung : Menggunakan metode anak kandung (<i>Own Children</i>). Metode OC memperkirakan angka kelahiran beberapa tahun sebelum sensus berdasarkan tabulasi dari anak-anak yang tinggal bersama ibunya pada saat pencacahan.</p>
Interpretasi	TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah anak yang dimiliki wanita menurut kelompok umur	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah wanita umur 15 -49 tahun.	Pilot Sensus Penduduk 2020
Angka harapan hidup	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah anak kandung umur 0 - 14 tahun yang dimiliki oleh ibu berumur 15 - 65 tahun (Own Children)	Pilot Sensus Penduduk 2020
Jumlah anak yang Non Own Children (NOC) umur 0 - 14 tahun	Pilot Sensus Penduduk 2020

<https://www.bps.go.id>

Volume Impor dan Ekspor Non Dokumen PEB/PIB di Wilayah Perbatasan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Distribusi Subdit. Stat. Impor
Definisi	Kompilasi volume penjualan/pembelian barang oleh pelintas batas yang melakukan aktivitas perdagangan ke/dari negara tetangga di wilayah perbatasan
Manfaat	Mendapatkan volume perdagangan di wilayah perbatasan yang tidak tercatat dalam dokumen PEB/PIB
Rumus Perhitungan	$B_i = \sum_{j=1}^n B_{ij}$ <p>Dimana: B_i = Total volume impor non PIB HS 2 digit ke-i B_{ij} = Volume impor non PIB HS 2 Digit ke-i dokumen ke-j</p>
Interpretasi	Menunjukkan total volume transaksi perdagangan ekspor/impor di wilayah perbatasan (dalam USD)
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

**INDIKATOR
KEGIATAN
STATISTIK DASAR
BIDANG EKONOMI**



<https://www.bps.go.id>

Banyaknya dan Nilai Pengadaan dan Penggunaan Produksi Perusahaan HTI, Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Banyaknya dan nilai kayu bulat yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan budidaya tanaman kehutanan.
Manfaat	Untuk mengetahui perkembangan jumlah dan nilai produksi kayu bulat antar tahun.
Rumus Perhitungan	$Produksi\ Kayu\ Bulat = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n Y_{ij}$ <p>dimana: i = Provinsi ke i (m=33) j = Kabupaten/kota ke j pada provinsi ke i Y_{ij} = Produksi kayu bulat pada provinsi ke i kabupaten/kota ke j</p>
Interpretasi	Menunjukkan banyaknya dan nilai kayu bulat yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan budidaya tanaman kehutanan.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Banyaknya dan Nilai Pengadaan dan Penggunaan Produksi Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan lainnya	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Banyaknya Pekerja Tetap Perusahaan HTI, Perum Perhutani dan Perusahaan Lainnya

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Banyaknya orang yang bekerja pada perusahaan budidaya tanaman kehutanan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jenis pekerjaan, dan jenis kelamin.
Manfaat	Untuk mengetahui perkembangan jumlah tenaga kerja perusahaan HPHT antar tahun.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Menunjukkan banyaknya orang yang bekerja pada perusahaan budidaya tanaman kehutanan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jenis pekerjaan dan jenis kelamin.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Banyaknya pekerja tetap perusahaan HTI, Perum Perhutani dan Perusahaan lainnya	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Current Ratio BUMD

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	Perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang jangka pendek, dalam persen.
Manfaat	Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya
Rumus Perhitungan	$(\text{aktiva lancar} / \text{hutang jangka pendek}) \times 100$
Interpretasi	Semakin besar <i>current ratio</i> maka semakin baik karena <i>current ratio</i> menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Setiap Rp. 100 hutang lancar dijamin oleh Aktiva lancar Rp. <i>current ratio</i> .
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Aset Lancar atau Aktiva Lancar	Survei Statistik Keuangan BUMD
Kewajiban Jangka Pendek atau Hutang Jangka Pendek	Survei Statistik Keuangan BUMD

Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Hortikultura

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan pengeluaran petani di subsektor hortikultura untuk menghasilkan produksi pertanian termasuk didalamnya konsumsi rumah tangga.
Manfaat	Melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi petani di subsektor hortikultura serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	$Ib_{HT} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)HT}} P_{(n-1)HT} Q_{oHT}}{\sum P_{oHT} Q_{oHT}} \times 100$
Interpretasi	Ibht Nasional Juli 2015 (2012=100) = 116,25 artinya tingkat harga kebutuhan petani subsektor hortikultura mengalami kenaikan sebesar 16,25 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai tukar Petani (NTP)

Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Perikanan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan pengeluaran petani di subsektor perikanan/budidaya untuk menghasilkan produksi pertanian termasuk didalamnya konsumsi rumah tangga
Manfaat	Melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi petani di subsektor perikanan/budidaya serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	$Ib_{IK} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)IK}} P_{(n-1)IK} Q_{oIK}}{\sum P_{oIK} Q_{oIK}} \times 100$
Interpretasi	Ib_{ik} Nasional Juni 2016 (2012=100) = 123,41 artinya tingkat harga kebutuhan petani subsektor perikanan mengalami kenaikan sebesar 23,41 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Peternakan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan pengeluaran petani di subsektor peternakan untuk menghasilkan produksi pertanian termasuk didalamnya konsumsi rumah tangga.
Manfaat	Melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi petani di subsektor peternakan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	$Ib_{TRK} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)TRK}} P_{(n-1)TRK} Q_{oTRK}}{\sum P_{oTRK} Q_{oTRK}} \times 100$
Interpretasi	Ib_{trk} Nasional Juli 2015 (2012=100) = 113,41 artinya tingkat harga kebutuhan petani subsektor peternakan mengalami kenaikan sebesar 13,41 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Tanaman Pangan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan pengeluaran petani di subsektor tanaman pangan untuk menghasilkan produksi pertanian termasuk didalamnya konsumsi rumah tangga.
Manfaat	Melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi petani di subsektor tanaman pangan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	$Ib_{TP} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)TP}} P_{(n-1)TP} Q_{oTP}}{\sum P_{oTP} Q_{oTP}} \times 100$
Interpretasi	Ibtp Nasional Juli 2015 (2012=100) = 116,25 artinya tingkat harga kebutuhan petani subsektor tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 16,25 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan pengeluaran petani di subsektor tanaman perkebunan rakyat untuk menghasilkan produksi pertanian termasuk didalamnya konsumsi rumah tangga.
Manfaat	Melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi petani di subsektor tanaman perkebunan rakyat serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	$Ib_{TPR} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)TPR}} P_{(n-1)TPR} Q_{oTPR}}{\sum P_{oTPR} Q_{oTPR}} \times 100$
Interpretasi	Ibtpr Nasional Juli 2015 (2012=100) = 108,75 artinya tingkat harga kebutuhan petani subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan sebesar 8,75 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga konsumen
Definisi	Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
Manfaat	Mengukur tingkat inflasi suatu negara.
Rumus Perhitungan	$IHK = \frac{NK_n}{NK_0} \times 100$ <p>Dengan : NK_n = Nilai konsumsi bulan ke-n NK₀ = Nilai konsumsi tahun dasar</p>
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none">1. $IHK = 100$, secara umum harga relative tidak mengalami perubahan;2. $IHK > 100$, secara umum harga mengalami kenaikan dibanding dengan tahun dasar;3. $IHK < 100$, secara umum harga mengalami penurunan dibanding dengan tahun dasar.
Level Estimasi	Nasional dan Kabupaten/Kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Publikasi Indeks harga

Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan pengeluaran petani untuk menghasilkan produksi pertanian termasuk didalamnya konsumsi rumah tangga.
Manfaat	Melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi petani serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib ini juga dapat menggambarkan inflasi pedesaan
Rumus Perhitungan	$Ib = \frac{\sum P_n Q_o}{\sum P_o Q_o} \times 100$
Interpretasi	Ib Nasional Juni 2016 (2012=100)=123,41 artinya tingkat harga kebutuhan petani mengalami kenaikan sebesar 23,41 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan hasil produksi pertanian.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani;2. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	$It = \frac{\sum P_n Q_o}{\sum P_o Q_o} \times 100$
Interpretasi	It Nasional Juni 2016 (2012=100)=125,13 artinya tingkat harga produksi pertanian mengalami kenaikan sebesar 25,13 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Indeks Indikator Kini (IIK)

Unit kerja penghasil	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Analisis Statistik
Definisi	Indeks komposit dari beberapa indeks variabel yang dapat mengidentifikasi secara umum tentang kondisi perusahaan dan bisnis pada saat triwulan berjalan (saat survei) dibandingkan triwulan sebelumnya.
Manfaat	Memberikan informasi keadaan bisnis dan perekonomian dari sisi pengusaha pada periode berjalan.
Rumus Perhitungan	<p>Indeks Setiap Variabel</p> $I_{vt} = \left[\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n_i} T_inc_i}{\frac{\sum_{i=1}^{n_i} T_inc_i + \sum_{j=1}^{n_j} T_dec_j}{n}} \right] \times 100$ <p>I_{vt} : Indeks setiap variabel T_inc_i : Responden yang menjawab meningkat T_dec_j : Responden yang menjawab menurun n_i : Jumlah responden yang menjawab meningkat n_j : Jumlah responden yang menjawab menurun</p> <p>Indeks Kini</p> $I_{vg} = \frac{1}{n_{vt}} \sum_{k=1}^{n_{vt}} (I_{vt})_k$ <p>I_{vg} : Indeks gabungan I_{vt} : Indeks setiap variabel n_{vt} : Jumlah variabel</p>
Interpretasi	
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Indikator Mendatang (IIM)

Unit kerja penghasil	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Analisis Statistik
Definisi	Indeks komposit dari beberapa indeks variabel yang dapat mengidentifikasi secara umum tentang kondisi perusahaan dan bisnis pada periode tiga bulan mendatang.
Manfaat	Memberikan perkiraan kondisi bisnis tiga bulan mendatang.
Rumus Perhitungan	<p>Indeks Setiap Variabel</p> $I_{vt} = \left[\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n_i} T_inc_i}{\frac{\sum_{i=1}^{n_i} T_inc_i + \sum_{j=1}^{n_j} T_dec_j}{n}} \right] \times 100$ <p>I_{vt} : Indeks setiap variabel T_inc_i : Responden yang menjawab meningkat T_dec_j : Responden yang menjawab menurun n_i : Jumlah responden yang menjawab meningkat n_j : Jumlah responden yang menjawab menurun</p> <p>Indeks Mendatang</p> $I_{vg} = \frac{1}{n_{vt}} \sum_{k=1}^{n_{vt}} (I_{vt})_k$ <p>I_{vg} : Indeks gabungan I_{vt} : Indeks setiap variabel n_{vt} : Jumlah variabel</p>
Interpretasi	
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Yang Dibayar (IB)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan pengeluaran petani untuk menghasilkan produksi pertanian termasuk didalamnya konsumsi rumah tangga
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi petani serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.2. Perkembangan Ib ini juga dapat menggambarkan inflasi pedesaan (khususnya komponen konsumsi rumah tangga)
Rumus Perhitungan	$Ib = \frac{\sum P_n Q_o}{\sum P_o Q_o} \times 100$
Interpretasi	Ib Nasional Juni 2016 (2012=100)=123,41 artinya tingkat harga kebutuhan petani mengalami kenaikan secara rata-rata 1,23 kali lipat dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Indeks Yang Diterima (IT)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan hasil produksi pertanian
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani.2. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	$It = \frac{\sum P_n Q_o}{\sum P_o Q_o} \times 100$
Interpretasi	It Nasional Juni 2016 (2012=100)=125,13 artinya tingkat harga produksi pertanian mengalami kenaikan secara rata-rata 1,25 kali lipat dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012
Level Estimasi	-
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Intensitas Energi

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Banyaknya energi yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 1 satuan moneter
Manfaat	Untuk melihat pencapaian tujuan ke-7 SDGs
Rumus Perhitungan	$IE = \frac{\text{penggunaan energi}}{\text{nilai tambah bruto}}$
Interpretasi	Menurunnya nilai intensitas energi menunjukkan penggunaan energi dalam proses produksi semakin efisien
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Laporan Uji Coba Neraca Arus Energi

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Penggunaan energi	Subdit. Statistik Pertambangan dan Energi
Nilai Tambah Bruto	Direktorat Neraca Produksi

It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Hortikultura

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan hasil produksi pertanian subsektor hortikultura.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani subsektor hortikultura; 2. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	$It_{HT} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)HT}} P_{(n-1)HT} Q_{oHT}}{\sum P_{oHT} Q_{oHT}} \times 100$
Interpretasi	It _{HT} Nasional Juni 2016 (2012=100)= 125,13 artinya tingkat harga produksi pertanian subsektor hortikultura mengalami kenaikan sebesar 25,13 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Perikanan/Budidaya

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan hasil produksi pertanian subsektor perikanan/budidaya.
Manfaat	1. Melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani subsektor perikanan/budidaya; 2. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	$It_{IK} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)IK}} P_{(n-1)IK} Q_{oIK}}{\sum P_{oIK} Q_{oIK}} \times 100$
Interpretasi	Itik Nasional Juni 2016 (2012=100)= 125,13 artinya tingkat harga produksi pertanian subsektor perikanan/budidaya mengalami kenaikan sebesar 25,13 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Peternakan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan hasil produksi pertanian subsektor peternakan.
Manfaat	1. Melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani subsektor peternakan; 2. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	$It_{TPK} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)TPK}} P_{(n-1)TPK} Q_{oTPK}}{\sum P_{oTPK} Q_{oTPK}} \times 100$
Interpretasi	Ittrk Nasional Juni 2016 (2012=100)= 125,13 artinya tingkat harga produksi pertanian subsektor peternakan mengalami kenaikan sebesar 25,13 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Tanaman Pangan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan hasil produksi pertanian subsektor tanaman pangan.
Manfaat	1. Melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani subsektor tanaman pangan; 2. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	$It_{TP} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)TP}} P_{(n-1)TP} Q_{oTP}}{\sum P_{oTP} Q_{oTP}} \times 100$
Interpretasi	Ittp Nasional Juni 2016 (2012=100)= 125,13 artinya tingkat harga produksi pertanian subsektor tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 25,13 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

It (Indeks Harga yang Diterima Petani) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	Indeks yang disusun berdasarkan hasil produksi pertanian subsektor tanaman perkebunan rakyat.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani subsektor tanaman perkebunan rakyat; 2. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	$It_{TPR} = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{(n-1)TPR}} P_{(n-1)TPR} Q_{oTPR}}{\sum P_{oTPR} Q_{oTPR}} \times 100$
Interpretasi	Itpr Nasional Juni 2016 (2012=100)= 125,13 artinya tingkat harga produksi pertanian subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan sebesar 25,13 persen dibanding dengan produk yang sama pada tahun 2012.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

Jumlah Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan menurut Provinsi dan Luas Areal

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Banyaknya perusahaan berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
Manfaat	Menyajikan data jumlah perusahaan hak pengusahaan hutan menurut provinsi dan luas areal.
Rumus Perhitungan	$X = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>dimana: X = Jumlah perusahaan hak pengusahaan hutan X_i = Perusahaan pada provinsi ke i atau perusahaan dengan luas areal ke i</p>
Interpretasi	Banyaknya perusahaan berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
jumlah perusahaan hak pengusahaan hutan menurut provinsi dan luas areal	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

Jumlah Perusahaan Hortikultura Berbadan Hukum

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Merupakan jumlah perusahaan hortikultura berbadan hukum yang dirinci menurut provinsi, badan hukum kelompok tanaman.
Manfaat	Mengetahui banyaknya perusahaan hortikultura berbadan hukum di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$Jumlah = \sum PerusahaanAktif$ <p>dimana: Jumlah = Jumlah Perusahaan Hortikultura Berbadan Hukum Perusahaan Aktif = Perusahaan Hortikultura yang masih aktif (VP-Horti rincian 201 berkode 1)</p>
Interpretasi	Jumlah perusahaan hortikultura berbadan hukum yang aktif.
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2018

Jumlah Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Banyaknya perusahaan berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman kehutanan.
Manfaat	Untuk mengetahui perkembangan jumlah perusahaan HPHT setiap tahun.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Menunjukkan banyaknya perusahaan berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman kehutanan.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Jumlah perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Jumlah Perusahaan Penangkapan Ikan menurut Badan Hukum

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Perikanan
Definisi	Jumlah perusahaan penangkapan ikan di Indonesia yang mempunyai badan hukum.
Manfaat	Mengetahui jumlah perusahaan penangkapan ikan menurut badan hukum.
Rumus Perhitungan	$P = \sum P_i$ <p>P = Jumlah perusahaan penangkapan ikan P_i = Jumlah perusahaan penangkapan ikan di provinsi i</p>
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah perusahaan penangkapan ikan di Indonesia maka semakin tinggi pula kontribusinya pada sektor ekonomi.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Perikanan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Nama Perusahaan Penangkapan Ikan	DAFTAR-LTP

Jumlah Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).
Manfaat	Mengetahui perkembangan jumlah perusahaan TSL antar tahun.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Banyaknya Perusahaan Pemegang Ijin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Direktori Perusahaan Kehutanan Tahun 2017

Jumlah Perusahaan Pengelola Hasil Hutan Alam (HPH)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
Manfaat	Mengetahui perkembangan jumlah perusahaan HPH antar tahun.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Banyaknya Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Direktori Perusahaan Kehutanan Tahun 2017

Jumlah Perusahaan Pengelola Hasil Hutan Tanaman (HPHT)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
Manfaat	Mengetahui perkembangan jumlah perusahaan HPHT antar tahun.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Banyaknya Perusahaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Direktori Perusahaan Kehutanan Tahun 2017

<https://www.kps.go.id>

Jumlah Usaha Non Rumah Tangga Hortikultura

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Merupakan jumlah Usaha Non Rumah Tangga Hortikultura yang dirinci menurut provinsi dan kelompok tanaman.
Manfaat	Mengetahui banyaknya Usaha Non Rumah Tangga Hortikultura di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$Jumlah = \sum UsahaNRT Hortikultura$ <p>dimana: Jumlah = Jumlah Usaha Non Rumah Tangga Hortikultura Usaha NRT Hortikultura = Usaha NRT Hortikultura yang masih aktif (VN-Horti rincian 201 berkode 1)</p>
Interpretasi	Jumlah Usaha Non Rumah Tangga Hortikultura yang aktif.
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2018

Luas Lahan yang dikuasai Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan lainnya

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Luas lahan yang dikuasai perusahaan budidaya tanaman kehutanan menurut provinsi dan status lahan
Manfaat	Untuk mengetahui jumlah luas lahan kehutanan.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Menunjukkan luas lahan yang dikuasai perusahaan budidaya tanaman kehutanan menurut provinsi dan status lahan.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Luas Lahan yang Dikuasai Perusahaan HTI	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Luas lahan yang dikuasai Perum perhutani dan Perusahaan lainnya	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Nilai Penggunaan Produksi Kayu Bulat

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Nilai perkiraan kayu bulat, baik yang digunakan untuk bahan baku sendiri maupun yang dijual ke instansi terkait yang nilainya diperkirakan sesuai harga jual setempat.
Manfaat	Menyajikan data nilai perkiraan produksi kayu bulat.
Rumus Perhitungan	$X = \sum_{i=1}^n Xi$ <p>dimana: X = nilai penggunaan produksi kayubulat i = perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam</p>
Interpretasi	Nilai perkiraan kayu bulat, baik yang digunakan untuk bahan baku sendiri maupun yang dijual ke instansi terkait yang nilainya diperkirakan sesuai harga jual setempat.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
nilai penggunaan produksi kayu bulat	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

Nilai Produksi Kayu Bulat Menurut Provinsi dan Jenis Kayu

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Perkalian jumlah produksi kayu bulat yang ditebang sesuai jatah tebang pada rencana karya tahunan yang terdapat di areal yang tertera di SK dengan harga berlaku.
Manfaat	Menyajikan data nilai produksi kayu bulat menurut provinsi dan jenis kayu.
Rumus Perhitungan	$Y = \sum_{i=1}^n X_i \times Y_i$ <p>dimana: Y = Nilai produksi kayu bulat X_i = Jumlah produksi kayu bulat yang ditebang pada provinsi ke i atau jenis kayu ke i Y_i = Harga kayu bulat yang berlaku pada provinsi ke i atau jenis kayu ke i</p>
Interpretasi	Perkalian jumlah produksi kayu bulat yang ditebang sesuai jatah tebang pada rencana karya tahunan yang terdapat di areal yang tertera di SK dengan harga berlaku.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Nilai Produksi Kayu Bulat	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

Nilai Produksi Perusahaan Penangkapan Ikan yang Berbadan Hukum

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Perikanan
Definisi	Nilai produksi perikanan tangkap mencakup nilai semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap oleh perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum dari sumber perikanan alami dilaut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan.
Manfaat	Mengetahui perkembangan nilai produksi ikan di perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum.
Rumus Perhitungan	$N = \sum N_i$ <p>dengan: N = Nilai produksi ikan di perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum N_i = Nilai produksi ikan di perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum di provinsi i</p>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai produksi ikan di perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum maka semakin tinggi kontribusinya ke sektor ekonomi.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Perikanan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Nilai produksi perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum	DAFTAR-LTP

Nilai Tukar Petani (NTP)

Unit kerja penghasil

Direktorat Stat. Harga

Subdit. Stat. Harga Pedesaan

Definisi

- Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima (I_t) dengan indeks yang dibayar petani (I_b).
- Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (I_t) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (I_b) dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index.
- Penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi yang memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual, petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi hasil pertanian.

Manfaat

Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani (I_t) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani (I_b) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTP menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi.

Rumus Perhitungan

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Interpretasi

1. $NTP > 100$: petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.
2. $NTP = 100$: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.
3. $NTP < 100$: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.

Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTPH)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (ItHT) dengan indeks yang dibayar petani (IbHT) pada subsektor hortikultura;2. Masih-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index.
Manfaat	Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani subsektor hortikultura (Itht) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani subsektor hortikultura (Ibht) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTPH, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani subsektor hortikultura dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTPH menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian subsektor hortikultura dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi.
Rumus Perhitungan	$NTPH = \frac{It_{HT}}{Ib_{HT}} \times 100$
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none">1. NTPH>100 : petani subsektor hortikultura mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar;2. NTPH=100 : petani subsektor hortikultura tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar;3. NTPH<100 : petani subsektor hortikultura mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan (NTN)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (ItIK) dengan indeks yang dibayar petani (IbIK) pada subsektor perikanan;2. Masih-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index.
Manfaat	Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani subsektor perikanan (Itik) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani subsektor perikanan (Ibik) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTPN, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani subsektor perikanan dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTPN menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian subsektor perikanan dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi.
Rumus Perhitungan	$NTN = \frac{It_{IK}}{Ib_{IK}} \times 100$
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none">1. NTN > 100 : petani subsektor perikanan mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar;2. NTN = 100 : petani subsektor perikanan tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar;3. NTN < 100 : petani subsektor perikanan mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	1. Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_{tTRK}) dengan indeks yang dibayar petani (I_{bTRK}) pada subsektor peternakan; 2. Masih-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index.
Manfaat	Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani subsektor peternakan (I_{ttrk}) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani subsektor peternakan (I_{btrk}) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTPT, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani subsektor peternakan dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTPT menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian subsektor peternakan dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi.
Rumus Perhitungan	$NTPT = \frac{I_{tTRK}}{I_{bTRK}} \times 100$
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none">1. $NTPT > 100$: petani subsektor peternakan mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar;2. $NTPT = 100$: petani subsektor peternakan tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar;3. $NTPT < 100$: petani subsektor peternakan mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	1. Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_{tTP}) dengan indeks yang dibayar petani (I_{bTP}) pada subsektor tanaman pangan; 2. Masih-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index.
Manfaat	Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani subsektor tanaman pangan (I_{tTP}) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani subsektor tanaman pangan (I_{bTP}) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTPP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani subsektor tanaman pangan dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTPP menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian subsektor tanaman pangan dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi.
Rumus Perhitungan	$NTPP = \frac{I_{tTP}}{I_{bTP}} \times 100$
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none">1. $NTPP > 100$: petani subsektor tanaman pangan mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar;2. $NTPP = 100$: petani subsektor tanaman pangan tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar;3. $NTPP < 100$: petani subsektor tanaman pangan mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	1. Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_{tTPR}) dengan indeks yang dibayar petani (I_{bTPR}) pada subsektor tanaman perkebunan rakyat; 2. Masih-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index.
Manfaat	Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani subsektor tanaman perkebunan rakyat (I_{tTPR}) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani subsektor tanaman perkebunan rakyat (I_{bTPR}) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTPR, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani subsektor tanaman perkebunan rakyat dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTPR menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian subsektor tanaman perkebunan rakyat dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi.
Rumus Perhitungan	$NTPR = \frac{I_{tTPR}}{I_{bTPR}} \times 100$
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none">1. $NTPR > 100$: petani subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar;2. $NTPR = 100$: petani subsektor tanaman perkebunan rakyat tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar;3. $NTPR < 100$: petani subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Nilai Tukar petani (NTP)

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga Pedesaan
Definisi	1. Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (I_{bBPPBM}); 2. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (I_t) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani untuk produksi dan penambahan barang modal (I_{bBPPBM}) dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index.
Manfaat	Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani (I_t) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani untuk produksi pertaniannya (I_{bup}) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTUP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk produksi dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTUP menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan biaya produksi (profitabilitas).
Rumus Perhitungan	$NTUP = \frac{I_t}{I_{bBPPBM}} \times 100$
Interpretasi	1. $NTUP > 100$: petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk biaya produksinya terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk produksinya terhadap tahun dasar; 2. $NTUP = 100$: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani untuk produksinya terhadap tahun dasar; 3. $NTUP < 100$: petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.
Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Hanya BRS (Belum tercantum di publikasi)

Pengeluaran Perusahaan Penangkapan Ikan yang Berbadan Hukum

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Perikanan
Definisi	Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan penangkapan ikan yang meliputi pengeluaran untuk pekerja, pengeluaran bahan bakar, listrik, air dan gas, serta pengeluaran bahan-bahan, jasa dan lainnya.
Manfaat	Mengetahui besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan penangkapan ikan.
Rumus Perhitungan	Total biaya perusahaan penangkapan ikan = $a+b+c$ dimana: a = Pengeluaran untuk pekerja b = Pengeluaran untuk bahan bakar, listrik, air dan gas c = Pengeluaran untuk bahan-bahan, jasa dan lainnya
Interpretasi	Banyaknya pengeluaran perusahaan penangkapan ikan.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Perikanan

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Pengeluaran untuk Pekerja	DAFTAR-LTP
Pengeluaran untuk Bahan Bakar, Listrik, Air dan Gas	DAFTAR-LTP
Pengeluaran untuk Bahan-bahan, Jasa dan lainnya	DAFTAR-LTP

Penggunaan Lahan yang dikuasai Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Penggunaan lahan yang dikuasai perusahaan budidaya tanaman kehutanan menurut provinsi dan status lahan.
Manfaat	Untuk mengetahui jenis penggunaan lahan kehutanan.
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Menunjukkan penggunaan lahan yang dikuasai perusahaan budidaya tanaman kehutanan menurut provinsi dan status lahan
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Penggunaan Lahan yang Dikuasai Perusahaan HTI	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Penggunaan Lahan Yang dikuasai Perum Perhutani dan Perusahaan lainnya	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Persentase jenis/kualitas beras terbesar

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Harga Subdit. Stat. Harga konsumen
Definisi	Persentase jenis/kualitas beras terbesar diperoleh dari volume penjualan 6 (enam) jenis/kualitas yang banyak terjual di seluruh pasar. Dari masing-masing jenis/kualitas beras diproporsikan terhadap total/jumlah volume 6 jenis/kualitas beras tersebut untuk mendapatkan persentase dari masing-masing jenis/kualitas beras.
Manfaat	Sebagai bobot untuk penghitungan harga beras umum tertimbang.
Rumus Perhitungan	$W_i = \frac{V_i}{V_{total}} \times 100$
Interpretasi	Jenis/kualitas beras yang mempunyai peranan terbesar di kota bersangkutan.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Pertumbuhan Produksi Jenis Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan (BST)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Persentase perubahan produksi tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan pada tahun tertentu
Manfaat	Mengetahui perubahan produksi apakah mengalami kenaikan atau penurunan pada periode berjalan untuk jenis tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan tertentu
Rumus Perhitungan	$G_t = \frac{(Q_t - Q_{t-1})}{Q_{t-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Misalkan pertumbuhan melinjo tahun 2016 sebesar 7,78% berarti terjadi kenaikan produksi sebanyak 7,78 % produksi Melinjo tahun 2016 terhadap tahun 2015.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Indonesia

Produk Domestik Neto 1 (PDN 1)

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Nilai produk domestik neto dikurangi dengan biaya deplesi sumber daya alam di suatu wilayah pada periode waktu tertentu
Manfaat	Sebagai indikator pembangunan ekonomi yang memperhitungkan kesinambungan lingkungan
Rumus Perhitungan	$PDN_i = PDB - \text{konsumsi barang modal tetap} - \text{deplesi sumber daya alam}$
Interpretasi	Rasio antara PDN1 dan PDB yang lebih rendah daripada rasio antara PDN dan PDB mengindikasikan eksploitasi SDA yang relatif tinggi
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Produk Domestik Bruto (PDB)	Direktorat Neraca Produksi
Konsumsi modal tetap bruto	Direktorat Neraca Pengeluaran
Deplesi sumber daya alam	Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Produksi Hasil Hutan Non Kayu

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Hasil hutan non kayu adalah semua material biologi selain kayu yang diambil dari kawasan hutan untuk dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti untuk bahan makanan, obat-obatan, bumbu, minyak alami, resin, latek, tanin, pewarna, tanaman hias, bahan kerajinan, rotan, bambu, dan produk non kayu lainnya.
Manfaat	Mengetahui jumlah produksi total hasil hutan non kayu Indonesia dan per provinsi beserta perkembangannya dari tahun ke tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{Produksi Hasil Hutan Non Kayu} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n X_{ij}$ <p>dimana: i = Provinsi (m=33) j = Kabupaten/kota pada provinsi ke-i X_{ij} = Jumlah produksi hasil hutan non kayu provinsi ke-i kabupaten/kota ke-j</p>
Interpretasi	Jumlah produksi hasil hutan non kayumenurut pulau-pulau di Indonesia
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Produksi Kehutanan Tahun 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Produksi hasil hutan non kayu	Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan

Produksi Kayu Bulat

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Kayu bulat adalah semua kayu bulat (gelondongan) yang ditebang atau dipanen yang bisa dijadikan sebagai bahan baku produksi pengolahan kayu hulu (IPKH).
Manfaat	Mengetahui jumlah produksi total kayu bulat Indonesia dan per provinsi beserta perkembangannya dari tahun ke tahun.
Rumus Perhitungan	$Produksi\text{KayuBulat} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n X_{ij}$ <p>dimana: i = Provinsi (m=33) j = Kabupaten/kota pada provinsi ke-i X_{ij} = Jumlah produksi kayu bulat provinsi ke-i kabupaten/kota ke-j</p>
Interpretasi	Jumlah produksi kayu bulat menurut pulau-pulau di Indonesia
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Produksi Kehutanan Tahun 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Produksi Kayu Kehutanan	Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan

Produksi Kayu Bulat Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Banyaknya kayu bulat yang dihasilkan oleh perusahaan budidaya tanaman kehutanan.
Manfaat	Untuk mengetahui perkembangan jumlah produksi kayu bulat antar tahun.
Rumus Perhitungan	$Produksi\ Kayu\ Bulat = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n Y_{ij}$ <p>dimana: i = Provinsi ke i (m=33) j = Kabupaten/kota ke j pada provinsi ke i Y_{ij} = Produksi kayu bulat pada provinsi ke i kabupaten/kota ke j</p>
Interpretasi	Semakin tinggi angka produksi kayu bulat pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin tinggi pula jumlah kayu bulat yang dihasilkan pada tahun itu.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
produksi kayu bulat perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Produksi Kayu Bulat Perusahaan Pengelola Hutan Alam

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Realisasi Produksi kayu bulat yang ditebang sesuai jatah tebang pada Rencana Karya Tahunan yang terdapat di areal yang tertera di SK.
Manfaat	Mengetahui rencana dan realisasi produksi kayu bulat di Indonesia.
Rumus Perhitungan	$Produksi\text{Kayu}\text{Bulat} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n Y_{ij}$ <p>dimana: i = Provinsi ke i (m=33) j = Kabupaten/kota ke j pada provinsi ke i Y_{ij} = Produksi kayu bulat pada provinsi ke i kabupaten/kota ke j</p>
Interpretasi	Realisasi Produksi kayu bulat yang ditebang sesuai jatah tebang pada Rencana Karya Tahunan yang terdapat di areal yang tertera di SK.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
produksi kayu bulat perusahaan pengelola hutan alam	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

Produksi Kayu Olahan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Kayu olahan adalah kayu dalam bentuk olahan dari kayu bulat yang berasal dari pohon yang tumbuh di kawasan hutan. Beberapa jenis kayu olahan antara lain berupa kayu gergajian (sawn timber), kayu lapis (plywood), veneer, particle board, chipwood, pulp, dan olahan kayu lainnya.
Manfaat	Mengetahui jumlah produksi total kayu olahan Indonesia dan per provinsi beserta perkembangannya dari tahun ke tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{Produksi Kayu Olahan} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n X_{ij}$ <p>dimana:</p> <p>i = Provinsi (m=33) j = Kabupaten/kota pada provinsi ke-i X_{ij} = Jumlah produksi kayu olahan provinsi ke-i kabupaten/kota ke-j</p>
Interpretasi	Jumlah produksi kayu olahan menurut pulau-pulau di Indonesia
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Produksi Kehutanan Tahun 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Produksi kayu olahan	Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan

Produksi Perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya Menurut Jenis Tanaman dan Jenis Produksi

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Banyaknya kayu bulat yang dihasilkan oleh perusahaan budidaya tanaman kehutanan menurut jenis tanaman dan jenis produksi.
Manfaat	Untuk mengetahui perkembangan jumlah produksi kayu bulat antar tahun.
Rumus Perhitungan	$Produksi\text{KayuBulat} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n Y_{ij}$ <p>dimana: <i>i</i> = Provinsi ke <i>i</i> (<i>m</i>=33) <i>j</i> = Kabupaten/kota ke <i>j</i> pada provinsi ke <i>i</i> <i>Y_{ij}</i> = Produksi kayu bulat pada provinsi ke <i>i</i> kabupaten/kota ke <i>j</i></p>
Interpretasi	Menunjukkan banyaknya kayu bulat yang dihasilkan oleh perusahaan budidaya tanaman kehutanan.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Produksi Perusahaan HTI	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Produksi Perusahaan Perum Perhutani, dan Perusahaan Lainnya Menurut Jenis Tanaman dan Jenis Produksi	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Produktivitas Tanaman Biofarmaka

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Jumlah produksi tanaman biofarmaka per satuan luas (produksi per luasan).
Manfaat	Mengetahui produktivitas dari tanaman biofarmaka pada bulan tertentu di provinsi tertentu.
Rumus Perhitungan	$PR_{tbf} = \frac{(P_h + P_{bh})}{(L_h + L_{bh})}$ <p>dimana : PRtbf : Produktivitas tanaman biofarmaka Ph : Produksi habis dipanen/dibongkar Pbh : Produksi belum habis Lh : Luas panen habis/dibongkar Lbh : Luas panen belum habis</p>
Interpretasi	Misalkan produktivitas temulawak adalah 10 kg/m ² , berarti satu m ² tanaman temulawak rata-rata menghasilkan produksi sebanyak 10 kg.
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Tanaman Biofarmaka

Produktivitas Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan (BST)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Jumlah produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per tanaman (produksi per tanaman).
Manfaat	Mengetahui produktivitas dari tanaman BST pada periode tertentu di provinsi tertentu.
Rumus Perhitungan	$P = \frac{TP}{M}$ <p>dimana: P = Produktivitas Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan (BST) TP = Total Produksi tanaman BST M = Banyaknya tanaman BST yang menghasilkan</p>
Interpretasi	Misalkan produktivitas mangga adalah 30 kg/pohon, berarti luas satu pohon mangga rata-rata menghasilkan produksi sebanyak 30 kg.
Level Estimasi	Tingkat Kabupaten per Komoditas terpilih
Publikasi Keberadaan Indikator	Laporan Hasil Survei Hortikultura Potensi dengan Menggunakan Teknologi Pengumpulan Data Berbasis Computer Assisted Personal Interviewing Tahun 2017

Produktivitas Tanaman Hias

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Jumlah produksi tanaman hias per satuan luas (produksi per luasan).
Manfaat	Mengetahui produktivitas dari tanaman hias pada bulan tertentu di provinsi tertentu.
Rumus Perhitungan	$PR_{th} = \frac{(P_h + P_{bh})}{(L_h + L_{bh})}$ <p>dimana : PRth : Produktivitas tanaman hias Ph : Produksi dipanen habis/dibongkar Pbh : Produksi belum habis Lh : Luas panen habis/dibongkar Lbh : Luas panen belum habis</p>
Interpretasi	Misalkan produktivitas melati adalah 20 kg/m ² , berarti satu m ² tanaman bunga melati akan menghasilkan produksi sebanyak 20 kg.
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Tanaman Hias

Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Jumlah produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per satuan luas (produksi per luasan).
Manfaat	Mengetahui produktivitas dari tanaman sayuran dan buah-buahan semusim pada bulan tertentu di provinsi tertentu.
Rumus Perhitungan	$PR_{sbs} = \frac{(P_h + P_{bh})}{(L_h + L_{bh})}$ <p>dimana :</p> <p>PRsbs : Produktivitas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim Ph : Produksi dipanen habis/dibongkar Pbh : Produksi belum habis Lh : Luas panen habis/bongkar Lbh : Luas panen belum habis</p>
Interpretasi	Misalkan produktivitas bawang merah adalah 20 kw/ha, berarti satu hektar tanaman bawang merah akan menghasilkan produksi sebanyak 20 kuintal.
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim

Produktivitas Tanaman Tebu

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Tanaman Perkebunan
Definisi	Tingkat kemampuan tanaman tebu dalam menghasilkan produksi per hektar
Manfaat	Memberikan gambaran tentang tingkat kemampuan tanaman tebu dalam menghasilkan produksi
Rumus Perhitungan	$Pv = \frac{P}{LP}$ <p>dimana :</p> <p>Pv = Produktivitas Tanaman Tebu (Kg/hektar) P = Produksi Tebu (Kg) LP = Luas Panen (Hektar)</p>
Interpretasi	Nilai produktivitas menunjukkan besarnya produksi per hektar dari tanaman tebu
Level Estimasi	Kabupaten
Publikasi Keberadaan Indikator	Laporan Kegiatan Survei Komoditas Strategis Perkebunan Untuk Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga Tahun 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Luas Panen Tanaman Tebu	Survei Komoditas Strategis Perkebunan Untuk Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga
Produksi Tebu	Survei Komoditas Strategis Perkebunan Untuk Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga

Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim (SBS), dan Tanaman Biofarmaka (TBF)

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Jumlah produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, dan TBF per satuan luas (produksi per luasan).
Manfaat	Mengetahui produktivitas dari tanaman sayuran dan buah-buahan semusim (SBS) dan TBF pada periode tertentu di provinsi tertentu.
Rumus Perhitungan	$P = \frac{\text{Total Produksi}}{\text{Total Luas Panen}}$ <p>dimana: P = Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim (SBS) dan Tanaman Biofarmaka (TBF) Total Produksi = Produksi Dipanen Habis/Dibongkar ditambah Produksi Belum Habis Tanaman SBS atau TBF. Total Luas Panen = Luas Panen Habis/Dibongkar ditambah Luas Panen Belum Habis Tanaman SBS atau TBF.</p>
Interpretasi	Misalkan produktivitas bawang merah adalah 20 kw/ha, berarti luas satu hektar tanaman bawang merah rata-rata menghasilkan produksi sebanyak 20 kuintal.
Level Estimasi	Tingkat Kabupaten per Komoditas terpilih
Publikasi Keberadaan Indikator	Laporan Hasil Survei Hortikultura Potensi dengan Menggunakan Teknologi Pengumpulan Data Berbasis Computer Assisted Personal Interviewing Tahun 2017

Profit Margin BUMN

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	Perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan usaha, dalam persen.
Manfaat	Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan cara mengukur persentase dari profit yang diperoleh perusahaan dari tiap penjualan.
Rumus Perhitungan	$(\text{laba bersih} / \text{pendapatan usaha}) \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi profit margin maka kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba per rupiah penjualan semakin baik
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017 Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Kewajiban atau Hutang	Survei Statistik Keuangan BUMN dan BUMD
Aset atau Aktiva	Survei Statistik Keuangan BUMN dan BUMD

Proporsi Tutupan Hutan

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Proporsi luas tutupan hutan terhadap luas daratan
Manfaat	Untuk melihat pencapaian tujuan ke-15 SDGs
Rumus Perhitungan	$PLTH = \frac{\text{luas tutupan hutan}}{\text{total luas daratan}} \times 100\%$
Interpretasi	Proporsi tutupan hutan yang menurun menunjukkan berkurangnya area kawasan hutan
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Luas tutupan hutan dan luas daratan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rata-rata Produksi Tanaman Perkebunan

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Tanaman Perkebunan
Definisi	Tingkat kemampuan tanaman dalam menghasilkan produksi per hektar selama setahun.
Manfaat	Memberikan gambaran tentang tingkat kemampuan tanaman dalam menghasilkan produksi.
Rumus Perhitungan	$Pv = \frac{P}{LTM}$ <p>dimana: Pv = Rata-rata Produksi (Kg/Hektar) P = Produksi (Kg) LTM = Luas Tanaman Menghasilkan (Hektar)</p>
Interpretasi	Nilai rata-rata produksi menunjukkan besarnya produksi per hektar dari tanaman yang bersangkutan.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Teh Indonesia; Statistik Kelapa Sawit Indonesia; Statistik Karet Indonesia; Statistik Tebu Indonesia; Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit; Direktori Perusahaan Perkebunan Karet

R/C Ratio

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Perbandingan antara nilai produksi terhadap biaya total produksi
Manfaat	Indikator ini menginformasikan efisiensi usaha tani
Rumus Perhitungan	$Ratio = \frac{NilaiProduksi}{TotalBiayaProduksi}$
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none">• Jika nilai Ratio > 1, maka usaha tani mengalami keuntungan.• Jika nilai Ratio = 1, maka usaha tani mengalami break even (impas).• Jika nilai Ratio < 1, maka usaha tani mengalami kerugian.
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Total Ongkos/Biaya Produksi	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Nilai produksi utama	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Nilai produksi ikutan	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura

Return On Asset (ROA) BUMD

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	Perbandingan antara laba bersih dengan aktiva, dalam persen
Manfaat	Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada.
Rumus Perhitungan	$(\text{laba bersih} / \text{aktiva}) \times 100$
Interpretasi	ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan memberikan kerugian.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Survei Statistik Keuangan BUMD
Aset atau Aktiva	Survei Statistik Keuangan BUMD

Return On Asset (ROA) BUMN

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	Perbandingan antara laba bersih dengan aktiva, dalam persen.
Manfaat	Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada.
Rumus Perhitungan	$(\text{laba bersih} / \text{aktiva}) \times 100$
Interpretasi	ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan memberikan kerugian.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017 Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Survei Statistik Keuangan BUMN dan BUMD
Aset atau Aktiva	Survei Statistik Keuangan BUMN dan BUMD

Return On Equity (ROE) BUMD

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	Perbandingan antara laba bersih dengan modal, dalam persen.
Manfaat	Sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan sebelum melakukan investasi. Peningkatan profitabilitas perusahaan menjadi cerminan dari efisiensi yang tinggi di perusahaan.
Rumus Perhitungan	$(\text{laba bersih} / \text{modal}) \times 100$
Interpretasi	ROE yang baik setinggi mungkin. Perusahaan yang sehat memiliki ROE jauh di atas bunga bank. ROE yang lebih kecil dari bunga bank menunjukkan perusahaan sedang bermasalah. Perusahaan dengan ROE yang sedikit di atas bunga bank juga bisa dianggap kurang sehat. Investor saham fundamental akan menghindari perusahaan dengan ROE kecil karena terlalu berisiko.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Survei Statistik Keuangan BUMD
Ekuitas atau Modal	Survei Statistik Keuangan BUMD

Return On Equity (ROE) BUMN

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	Perbandingan antara laba bersih dengan modal, dalam persen.
Manfaat	Sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan sebelum melakukan investasi. Peningkatan profitabilitas perusahaan menjadi cerminan dari efisiensi yang tinggi di perusahaan.
Rumus Perhitungan	$(\text{laba bersih} / \text{modal}) \times 100$
Interpretasi	ROE yang baik setinggi mungkin. Perusahaan yang sehat memiliki ROE jauh di atas bunga bank. ROE yang lebih kecil dari bunga bank menunjukkan perusahaan sedang bermasalah. Perusahaan dengan ROE yang sedikit di atas bunga bank juga bisa dianggap kurang sehat. Investor saham fundamental akan menghindari perusahaan dengan ROE kecil karena terlalu berisiko.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017 Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	Survei Statistik Keuangan BUMN dan BUMD 2017
Ekuitas atau Modal	Survei Statistik Keuangan BUMN dan BUMD 2017

Solvabilitas/Total Debt to Total Assets BUMD

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	Perbandingan antara hutang dengan aktiva, dalam persen.
Manfaat	Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.
Rumus Perhitungan	$(\text{hutang} / \text{aktiva}) \times 100$
Interpretasi	Semakin rendah solvabilitas maka semakin baik karena solvabilitas mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank).
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Kewajiban atau Hutang	Survei Statistik Keuangan BUMD
Aset atau Aktiva	Survei Statistik Keuangan BUMD

Solvabilitas/Total Debt to Total Assets BUMN

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	Perbandingan antara hutang dengan aktiva, dalam persen.
Manfaat	Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.
Rumus Perhitungan	$(\text{hutang} / \text{aktiva}) \times 100$
Interpretasi	Semakin rendah solvabilitas maka semakin baik karena solvabilitas mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank).
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017 Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Kewajiban Jangka Pendek atau Hutang Jangka Pendek	Survei Statistik Keuangan BUMN dan BUMD
Aset Lancar atau Aktiva Lancar	Survei Statistik Keuangan BUMN dan BUMD

Struktur Biaya Produksi

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Besar kontribusi tiap-tiap komponen biaya terhadap biaya total produksi yang dikeluarkan petani dalam satu kali proses produksi.
Manfaat	Mengetahui kontribusi tiap-tiap komponen biaya terhadap biaya total yang dikeluarkan petani dalam satu kali proses produksi
Rumus Perhitungan	Komponen biaya tertentu dibagi dengan biaya total produksi
Interpretasi	Misalkan komponen biaya tenaga kerja mencapai 20%, yang berarti andil biaya tenaga kerja terhadap keseluruhan biaya produksi
Level Estimasi	Provinsi

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Total Ongkos/Biaya Produksi	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi benih	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi pupuk	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi pestisida	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi bahan bakar	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi listrik	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi jaring pelindung/perangkap hama	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi jaring pelindung/perangkap mulsa	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi wadah, polibag, ajir, tali	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi tenaga kerja	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi sewa lahan	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura
Ongkos/biaya produksi lainnya	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura

Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil.
Manfaat	Mengukur tingkat kemandirian suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$Y = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$ <p>Dimana, Y: Tingkat Kemandirian</p>
Interpretasi	Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017-2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
PAD	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
APBD	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tingkat Kemandirian Pemerintah Desa

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil.
Manfaat	Mengukur tingkat kemandirian suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$Y = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$ <p>Dimana, Y: Tingkat Kemandirian</p>
Interpretasi	Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
PAD	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa
APBD	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa

Tingkat Kemandirian Pemerintah Provinsi

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil.
Manfaat	Mengukur tingkat kemandirian suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$Y = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$ Dimana, Y: Tingkat Kemandirian
Interpretasi	Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015-2018

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
PAD	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi
APBD	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Total Debt to Equity Ratio (DER) BUMD

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Subdit. Stat. Keuangan
Definisi	Perbandingan antara hutang dengan modal, dalam persen.
Manfaat	Menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
Rumus Perhitungan	$(\text{hutang} / \text{modal}) \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi DER maka semakin besar risiko yang dihadapi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Kreditur dapat saja memberikan bunga yang cukup besar sehingga kemampuan perusahaan untuk mendapatkan uang dari sumber-sumber luar terbatas.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Kewajiban atau Hutang	Survei Statistik Keuangan BUMD
Kewajiban atau Hutang	Survei Statistik Keuangan BUMD

Upah/Gaji Pekerja Tetap

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Upah/gaji pekerja tetap adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja tetap sebelum dipotong pajak upah/pendapatan, baik dalam bentuk uang maupun barang kepada pekerja tetap.
Manfaat	Menyajikan data upa/gaji pekerja tetap.
Rumus Perhitungan	$X = \sum_{i=1}^n Xi$ <p>dimana: X = upah/gaji pekerja tetap i = perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam</p>
Interpretasi	Upah/gaji pekerja tetap adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja tetap sebelum dipotong pajak upah/pendapatan, baik dalam bentuk uang maupun barang kepada pekerja tetap.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Upah/gaji pekerja tetap	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

Volume Penggunaan Produksi Kayu Bulat

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Kehutanan
Definisi	Jumlah perkiraan kayu bulat yang digunakan untuk bahan baku sendiri dan yang dijual ke instansi terkait.
Manfaat	Menyajikan data volume penggunaan produksi kayu bulat.
Rumus Perhitungan	$X = \sum_{i=1}^n Xi$ <p>dimana: X = volume penggunaan produksi kayu bulat i = perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam</p>
Interpretasi	Jumlah perkiraan kayu bulat yang digunakan untuk bahan baku sendiri dan yang dijual ke instansi terkait.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Volume Penggunaan Produksi Kayu Bulat	Survei Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

Volume Produksi Perusahaan Penangkapan Ikan yang Berbadan Hukum

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Subdit. Stat. Perikanan
Definisi	Semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap oleh perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum dari sumber perikanan alami dilaut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan.
Manfaat	Mengetahui perkembangan volume produksi ikan di perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum.
Rumus Perhitungan	$V = \sum V_i$ <p>dengan: V = Volume produksi perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum V_i = Volume produksi perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum di provinsi i</p>
Interpretasi	Semakin tinggi volume produksi ikan di perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum maka semakin tinggi kontribusinya ke sektor ekonomi.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Perusahaan Perikanan

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Volume produksi perusahaan penangkapan ikan yang berbadan hukum	DAFTAR-LTP

**KOMPILASI
PRODUK
ADMINISTRASI
IDANG SOSIAL**



<https://www.bps.go.id>

IKG (Indeks Ketimpangan Gender)

Unit kerja penghasil	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Subdit. Analisis Statistik
Definisi	GII (Gender Inequality Indeks atau IKG (Indeks Ketimpangan Gender) merupakan Indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Ukuran yang mampu menunjukkan capaian-capaian pembangunan berbasis gender;2. Memberikan gambaran tentang capaian program-program pengarusutamaan gender di Indonesia.
Rumus Perhitungan	$G_F = \sqrt[3]{\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{ABR}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PR_F \cdot SE_F)^{\frac{1}{2}} \cdot LFPR_F}$ $G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot SE_M)^{\frac{1}{2}} \cdot LFPR_M}$ dimana: G _F : Indeks Perempuan G _M : Indeks Laki-laki MMR : Maternal Mortality Ratio ABR : Adolescent Birth Rate PR _F : Persentase perempuan yang duduk di parlemen PR _M : Persentase laki-laki yang duduk di parlemen SE _F : Persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMP SE _M : Persentase laki-laki dengan pendidikan minimal SMP LFPR _F : Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja LFPR _M : Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja
Interpretasi	Besaran Indeks antara 0 s/d 1. Semakin tinggi indeks semakin timpang capaian keberhasilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	-

**KOMPILASI
PRODUK
ADMINISTRASI
DAN EKONOMI**



<https://www.bps.go.id>

Distribusi PDRB terhadap Jumlah PDRB 34 Prrovinsi menurut lapangan Usaha

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Persentase besaran PDRB suatu provinsi terhadap jumlah PDRB 34 provinsi
Manfaat	Menunjukkan struktur perekonomian atau peranan wilayah dalam perekonomian negara
Rumus Perhitungan	$Dist_i = \frac{I_i}{\sum_{i=1}^{34} I_i} \times 100\%$ <p>dengan : Dist i = Distribusi PDRB Provinsi i; I i = PDRB atas dasar harga berlaku provinsi i;</p>
Interpretasi	Semakin besar distribusi PDRB provinsi, semakin besar peranan provinsi tersebut dalam perekonomian nasional
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut lapangan Usaha, 2013-2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha	BPS Provinsi

Distribusi Persentase PDB Tahunan

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
Definisi	Sumbangan per lapangan usaha.
Manfaat	Mengetahui struktur ekonomi.
Rumus Perhitungan	$Distribusi = \frac{PDB_i}{PDB_{total}} \times 100$ <p>dimana: PDB_i = Produk Domestik Bruto untuk lapangan usaha ke-i PDB_{total} = Produk Domestik Bruto total</p>
Interpretasi	Distribusi persentase PDB memperlihatkan struktur ekonomi suatu wilayah menurut lapangan usaha.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Pendapatan Nasional Indonesia Tahunan

Distribusi Persentase PDB Triwulanan

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
Definisi	Sumbangan per lapangan usaha.
Manfaat	Mengetahui struktur ekonomi.
Rumus Perhitungan	$Distribusi = \frac{PDB_i}{PDB_{total}} \times 100$ <p>dimana: PDB_i = Produk Domestik Bruto untuk lapangan usaha ke i PDB_{total} = Produk Domestik Bruto total</p>
Interpretasi	Distribusi persentase PDB memperlihatkan struktur ekonomi suatu wilayah menurut lapangan usaha.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	PDB Triwulanan

Indeks Berantai Produksi Subsektor Pertanian

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Angka yang menunjukkan perbandingan produksi suatu komoditas pertanian tertentu pada tahun t terhadap periode tahun sebelumnya (t -1). Subsektor pertanian meliputi tanaman pangan (tanaman padi dan tanaman palawija), tanaman hortikultura (dicakup hanya tanaman sayuran dan buah-buahan), tanaman perkebunan (meliputi perkebunan rakyat, besar negara, dan besar swasta), tanaman kehutanan, perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), dan perternakan.
Manfaat	Indeks ini dapat memberikan informasi tentang perkembangan produksi subsektor pertanian tertentu setiap tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Rumus Perhitungan	$IB_{it} = \frac{\sum q_{it}}{\sum q_{i(t-1)}} \times 100$ <p>dimana: IB_{it} = Indeks berantai produksi subsektor pertanian i pada tahun t q_{it} = Produksi dari subsektor pertanian i pada tahun t q_{i(t-1)} = Produksi dari subsektor pertanian i pada tahun t - 1</p>
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jika angka indeks yang dihasilkan = 100, berarti tidak ada perkembangan produksi antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;2. Jika angka indeks yang dihasilkan > 100, berarti ada perkembangan produksi antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;3. Jika angka indeks yang dihasilkan < 100, berarti ada penurunan produksi antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Produksi Tanaman Pangan; Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim Indonesia; Statistik Tanaman Buah-buahan dan sayuran tahunan Indonesia; Statistik Teh Indonesia; Statistik Tebu Indonesia; Statistik Kelapa Sawit Indonesia; Statistik Karet Indonesia

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Perkebunan Besar Negara	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Kehutanan	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Perikanan Budidaya	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Perikanan Tangkap	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Padi	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Palawija	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Sayuran	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Buah-buahan	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian

<https://www.bps.go.id>

Indeks Harga Implisit menurut Lapangan Usaha

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan
Manfaat	Mencerminkan kenaikan harga pada periode tertentu terhadap periode tahun dasar
Rumus Perhitungan	$P_t = \frac{I_t}{Y_t} \times 100$ <p>dengan : Pt = Indeks harga implisit periode t It = PDRB atas dasar harga berlaku periode t Yt = PDRB atas dasar harga konstan periode t</p>
Interpretasi	Nilai indeks implisit yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan periode tahun dasar.
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Produk Domestik Bruto Provinsi - Provinsi di Indonesia menurut lapangan Usaha, 2013-2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan menurut lapangan usaha	BPS Provinsi

Indeks Produksi Subsektor Pertanian

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Angka yang menunjukkan perbandingan nilai produksi subsektor tertentu dalam dua waktu yang berbeda dan telah ditentukan waktunya. Subsektor pertanian meliputi tanaman pangan (tanaman padi dan tanaman palawija), tanaman hortikultura (dicakup hanya tanaman sayuran dan buah-buahan), tanaman perkebunan (meliputi perkebunan rakyat, besar negara, dan besar swasta), tanaman kehutanan, perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), dan peternakan.
Manfaat	Mengukur kenaikan dan penurunan hasil produksi subsektor pertanian tertentu.
Rumus Perhitungan	$IP_{it} = \frac{\sum (p_{it}q_{it})}{\sum (p_{it}q_{io})} \times 100$ <p>dimana :</p> <p>IP_{it} = Indeks produksi subsektor pertanian i pada tahun t p_{it} = Harga pada komoditas subsektor pertanian i pada tahun t q_{io} = Produksi dari subsektor pertanian i tertentu pada tahun dasar 2010 q_{it} = Produksi dari subsektor pertanian i tertentu pada tahun t</p>
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jika angka indeks yang dihasilkan = 100 berarti tidak ada perkembangan produksi antara tahun berjalan dengan tahun dasar;2. Jika angka indeks yang dihasilkan > 100 berarti ada perkembangan produksi padi antara tahun berjalan dengan tahun dasar;3. Jika angka indeks yang dihasilkan < 100 berarti ada penurunan produksi padi antara tahun berjalan dengan tahun dasar.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat; Statistik Harga Produsen Perikanan dan Peternakan; Produksi Tanaman Pangan; Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim Indonesia; Statistik Tanaman Buah-buahan dan sayuran tahunan Indonesia; Statistik Teh Indonesia; Statistik Tebu Indonesia; Statistik Kelapa Sawit Indonesia; Statistik Karet Indonesia

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Harga Produsen	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Padi	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Palawija	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Sayuran	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Buah-buahan	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Perkebunan Besar Negara	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Tanaman Kehutanan	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Perikanan Budidaya	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produksi Perikanan Tangkap	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian

Index Unit Value Impor

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Distribusi Subdit. Stat. Impor
Definisi	Perubahan unit value (rata-rata nilai impor per satu unit produk barang yang diimpor) pada satu waktu dibandingkan unit value pada tahun dasar. Transaksi yang dicatat adalah jika barang melintasi perbatasan pabean selama periode yang ditentukan dan terdaftar di Bea Cukai.
Manfaat	Pendekatan untuk mengukur perubahan harga barang-barang yang diimpor.
Rumus Perhitungan	$UVI_{jmt} = \sum_{i=1}^{n=jmt} PR_{jmt} \times W_{jmt}$ <p>dimana: UVI_{jmt} = Index Unit Value <i>section</i> ke-j, bulan ke-m, tahun ke-t PR_{jmt} = Harga relatif <i>section</i> ke-j, bulan ke-m, tahun ke-t W_{jmt} = Penimbang <i>section</i> ke-j, bulan ke-m, tahun ke-t</p>
Interpretasi	Jika UVI _{jmt} > 100 artinya harga barang-barang yang diimpor pada <i>section</i> ke-j bulan ke-m tahun ke-t lebih tinggi dari harga barang-barang yang diimpor pada <i>section</i> ke-j tahun dasar.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Kontribusi terhadap Jumlah PDRB Seluruh Kabupaten/ Kota menurut Lapangan Usaha

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Persentase besaran PDRB suatu kabupaten/kota terhadap jumlah PDRB seluruh kabupaten/kota
Manfaat	Menunjukkan struktur perekonomian atau peranan kabupaten/kota dalam perekonomian provinsi
Rumus Perhitungan	$Cont_t = \frac{I_t}{\sum_{i=1}^n I_i} \times 100\%$ <p>dengan: <i>Count_i</i> = Kontribusi PDRB Kab/Kota i; <i>I_i</i> = PDRB atas dasar harga berlaku kab/kota i</p>
Interpretasi	Semakin besar kontribusi PDRB kabupaten/kota, semakin besar peranan kabupaten/kota tersebut dalam perekonomian provinsi
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia 2013-2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha	BPS Kabupaten/kota

Laju Pertumbuhan PDB Tahunan

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
Definisi	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun t-1 ke tahun t.
Manfaat	Mengetahui perkembangan ekonomi.
Rumus Perhitungan	$LajuPertumbuhan = \frac{PDB_t}{PDB_{t-1}} \times 100 - 100$ <p>dimana: PDB_t = Produk Domestik Bruto pada tahun ke t PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto pada tahun ke t-1</p>
Interpretasi	Laju pertumbuhan memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada waktu tertentu.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Pendapatan Nasional Indonesia Tahunan

Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
Definisi	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari triwulan t-1 ke triwulan t.
Manfaat	Mengetahui perkembangan ekonomi.
Rumus Perhitungan	$\text{LajuPertumbuhan} = \frac{PDB_t}{PDB_{t-1}} \times 100 - 100$ <p>dimana: PDB_t = Produk Domestik Bruto pada triwulan ke t PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto pada triwulan ke t-1</p>
Interpretasi	Laju pertumbuhan memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada waktu tertentu.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	PDB Triwulanan

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun t-1 ke tahun t
Manfaat	Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$ dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB tahun t; Yt = PDRB atas dasar harga konstan tahun t; $Yt-1$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun t-1.
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun ke-t dan tahun sebelumnya	BPS Provinsi

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun t-1 ke tahun t
Manfaat	Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan: r_t = laju pertumbuhan PDRB tahun t; Y_t = PDRB atas dasar harga konstan tahun t; Y_{t-1} = PDRB atas dasar harga konstan tahun t-1.</p>
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia 2013-2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun ke-t dan tahun sebelumnya	BPS Kabupaten/kota

PDRB Perkapita

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu
Manfaat	Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum
Rumus Perhitungan	$PDRBPK_i = \frac{PDRB_i}{JP_i}$ <p>dengan: PDRBPK_i = PDRB perkapita kab/kota i; PDRB_i = PDRB kab/kota i; JP_i = jumlah penduduk kab/kota i</p>
Interpretasi	Semakin besar angka PDRB perkapita, semakin sejahtera penduduk suatu wilayah
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Publikasi Keberadaan Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota di Indonesia 2013-2017

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha serta jumlah penduduk	BPS Kabupaten/kota dan Subdit. Statistik Demografi BPS RI

PDRB Per Kapita

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Produksi Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
Definisi	Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu.
Manfaat	Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum.
Rumus Perhitungan	$PDRBK_i = \frac{PDRB_i}{JP_i}$ <p>dengan: PDRBK i = PDRB perkapita provinsi i; PDRB i = PDRB Provinsi i; JP i = jumlah penduduk provinsi i</p>
Interpretasi	Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.
Level Estimasi	Provinsi
Publikasi Keberadaan Indikator	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha	BPS Provinsi dan Subdit Statistik Demografi BPS RI

Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Unit kerja penghasil	Direktorat Neraca Pengeluaran Subdit. Neraca Pemerintah dan Badan Usaha
Definisi	Persentase perubahan konsumsi akhir pemerintah antar triwulan.
Manfaat	Menunjukkan pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$G_t = \left[\frac{C_t - C_{t-1}}{C_{t-1}} \right] \times 100$
Interpretasi	Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah periode t dibanding t-1 adalah sebesar G persen.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan

Produktivitas Tanaman

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Rata-rata hasil produksi per satuan luas komoditas tanaman tertentu pada periode tertentu.
Manfaat	Melihat kemampuan areal lahan dalam menghasilkan output komoditas tanaman tertentu.
Rumus Perhitungan	$R_{it} = \frac{Q_{it}}{A_{it}} \times 100$ <p>dimana :</p> <p>Rit : Produktivitas komoditas tanaman <i>i</i> pada tahun <i>t</i> Qit : Produksi dari komoditas tanaman <i>i</i> pada tahun <i>t</i> Ait : Luas areal komoditas tanaman <i>i</i> pada tahun <i>t</i></p>
Interpretasi	Misalkan produktivitas bawang merah adalah 20 kw/ha, berarti luas satu hektar tanaman bawang merah rata-rata menghasilkan produksi sebanyak 20 kuintal.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Produksi Tanaman Pangan; Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan semusim Indonesia; Statistik Tanaman Buah-buahan dan sayuran tahunan Indonesia; Statistik Teh Indonesia; Statistik Tebu Indonesia; Statistik Kelapa Sawit Indonesia; Statistik Karet Indonesia

Input/Variabel pembentuk indikator

Nama Variabel	Sumber data
Produksi Komoditas Tanaman	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Luas Areal Komoditas Tanaman	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian

Sumbangan Subsektor Pertanian

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. TP, Hortikultura, dan Perkebunan Subdit. Stat. Hortikultura
Definisi	Proporsi PDB subsektor pertanian tertentu terhadap PDB pertanian.
Manfaat	Melihat sumbangan/ share/ andil subsektor tertentu terhadap PDB pertanian.
Rumus Perhitungan	$S_i = \frac{N_i}{N} \times 100$ <p>dimana: S_i = Sumbangan/Andil/Share subsektor pertanian i N_i = PDB subsektor pertanian i N = PDB sektor pertanian</p>
Interpretasi	Subsektor yang memiliki sumbangan terbesar menunjukkan pengaruh yang paling besar terhadap pembentukan PDB pertanian.
Level Estimasi	Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Tabel Web BPS

Input/Variabel pembentuk indikator

<u>Nama Variabel</u>	<u>Sumber data</u>
Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian
Produk Domestik Bruto (PDB) Subsektor Pertanian	Kompilasi Data Statistik Indikator Pertanian

Total Nilai Ekspor Migas Indonesia

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Distribusi Subdit. Stat. Ekspor
Definisi	Total Nilai Ekspor Migas Indonesia adalah nilai ekspor komoditas Minyak dan Gas yang terdiri atas ekspor Minyak Mentah, Hasil Minyak dan Gas berdasarkan harga FOB (Free on Bord), yaitu harga barang/komoditi sampai di pelabuhan muat/sebelum barang dimuat ke kapal dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).
Manfaat	Mengetahui total nilai ekspor Migas
Rumus Perhitungan	$N_{mt} = \sum_i^n N_{imt}$ <p>dimana: n = Jumlah transaksi ekspor Migas selama bulan m di tahun ke-t m = Bulan t = Tahun</p>
Interpretasi	Menunjukkan total nilai FOB ekspor Migas yang keluar dari Indonesia dalam satuan US\$ (Dolar Amerika).
Level Estimasi	Tingkat Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Total Nilai Ekspor Non Migas Indonesia

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Distribusi Subdit. Stat. Ekspor
Definisi	Nilai Ekspor Non Migas adalah nilai ekspor komoditas Non Migas yang terdiri dari komoditi Pertambangan, Industri dan Pertanian berdasarkan harga FOB (Free on Board) yaitu barang/komoditi sampai di pelabuhan muat sebelum barang dimuat ke kapal dengan satuan mata uang dollar Amerika Serikat (US\$).
Manfaat	Mengetahui total nilai ekspor Non Migas.
Rumus Perhitungan	$N_{mt} = \sum_i^n N_{imt}$ <p>dimana: n = Jumlah transaksi ekspor Non Migas selama bulan m di tahun ke-t m = Bulan t = Tahun</p>
Interpretasi	Menunjukkan total nilai FOB ekspor Non Migas yang keluar dari Indonesia dalam satuan US\$ (Dolar Amerika).
Level Estimasi	Tingkat Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	-

Unit Value Indeks

Unit kerja penghasil	Direktorat Stat. Distribusi Subdit. Stat. Ekspor
Definisi	Indeks relatif harga ekspor yang menggambarkan perkembangan harga-harga dari ekspor Indonesia. Indeks ini dihitung berdasarkan perubahan relatif harga ekspor pada setiap kode 2 digit Standard International Trade Classification (SITC) yang ditimbang berdasarkan nilai ekspor pada masing-masing kode SITC pada tahun dasar tertentu.
Manfaat	<ol style="list-style-type: none">1. Menghitung perubahan relatif harga ekspor pada setiap kode <i>Standard International Trade Classification</i> (SITC) yang ditimbang berdasarkan nilai ekspor pada masing-masing kode SITC pada tahun dasar tertentu;2. Menghitung nilai tukar perdagangan yaitu dengan membandingkan perkembangan indeks harga ekspor dan impor;3. Mendapatkan harga ekspor/impor apakah deflasi atau inflasi;4. Mengukur perubahan ekspor/impor riil.
Rumus Perhitungan	$P_{t0} = 100 \times \left[\sum_i \frac{V_{it}}{I_{i0}} \right]^{-1}$ <p>dimana: Pt0 = Indeks bulan t, tahun dasar 0 Vit = Nilai kelompok barang i, pada bulan t $\sum V_{it}$ = Nilai keseluruhan kelompok barang yang termasuk indeks Iit = Indeks untuk kelompok barang i, pada bulan t dengan tahun dasar 0 Ii0 = Rata-rata Iit, tahun dasar 0</p>
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jika $P_{t,0} > 100$ maka unit value barang ekspor pada periode tahun t lebih tinggi dari unit value pada tahun dasar;2. Jika $P_{t,0} = 100$ maka unit value barang ekspor pada periode tahun t sama dengan unit value pada tahun dasar;3. Jika $P_{t,0} < 100$ maka unit value barang ekspor pada periode tahun t lebih rendah dari unit value pada tahun dasar.
Level Estimasi	Tingkat Nasional
Publikasi Keberadaan Indikator	Unit Value Indeks Ekspor

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2598-568X



9 772598 568002